Politik Inklusif di Kehidupan Pesantren

KM. Luthfi Yusuf NZ, MA

(Pembina Pondok Pesantren Al Khiyaroh Buntet Cirebon)

(Studi Naratif Kiyai Muhammad Luthfi Yahya NZ dalam Komunikasi Politik di Era Digital)

Dr. H. Cecep Suryana, M.Si.
Ahmad Husain Haekal, S.Sos.
Aprilia Nur Islami, S.Sos.
Dias Ashari, S.Sos.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Politik Inklusif di Kehidupan Pesantren

KM. Luthfi Yusuf NZ, MA

(Pembina Pondok
Pesantren Al Khiyaroh Buntet Cirebon)

(Studi Naratif Kiyai Muhammad Luthfi Yahya NZ dalam Komunikasi Politik di Era Digital)

Dr. H. Cecep Suryana, M.Si.
Ahmad Husain Haekal, S.Sos.
Aprilia Nur Islami, S.Sos.
Dias Ashari, S.Sos.

Pasal 44

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

POLITIK INKLUSIF DI KEHIDUPAN PESANTREN
(Studi Naratif Kiyai Muhammad Luthfi Yahya NZ dalam Komunikasi Politik di Era Digital)

Penulis:
Dr. H. Cecep Suryana, M.Si.
A. Husain Haekal, S.Sos
Aprilia Nur Islami, S.Sos
Dias Ashari, S.Sos

Editor:
Asep Iwan Setiawan

GUNUNG DJATI PUBLISHING
2024

POLITIK INKLUSIF DI KEHIDUPAN PESANTREN
(Studi Naratif Kiyai Muhammad Luthfi Yahya NZ dalam Komunikasi Politik di Era Digital)

Penulis:
Dr. H. Cecep Suryana, M.Si.
A. Husain Haekal, S.Sos
Aprilia Nur Islami, S.Sos
Dias Ashari, S.Sos

Editor:
Asep Iwan Setiawn

ISBN: 978-623-5485-70-6

Penerbit: Gunung Djati Publishing
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarkat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. A.H. Nasution 105, Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Indonesia https://lp2m.uinsgd.ac.id

Cetakan Pertama, Januari 2024

Hak Cipta dilindugi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., kepada para sahabatnya dan keluarganya hingga umatnya.

Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya buku Komunikasi Politik ini mulai dari proses penulisan hingga proses cetak, yakni dosen pembimbing kami, rekan-rekan kami, penerbit, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun, buku ini kami yang berjudul "Politik Inklusif di Kehidupan Pesantren: Studi Naratif Kiyai Muhamad Luthfi Yahya NZ dalam Komuniasi Politik di Era Digital" ini telah selesai kami buat secara semaksimal dan sebaik mungkin agar menjadi manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan mengenai bagaimana proses politik dalam keseharian di pondok pesantren.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang buku ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku.

Demikian buku ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang Studi Komunikasi Politik serta dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam arti luas. Terima kasih.

Bandung, 22 Desember 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB 1 BIOGRAFI TOKOH **1**

- **A. Identitas Tokoh** 1
- **B. Ciri Khas Tokoh** 6
- **C. Karakter Kepemimpinan Tokoh** 11
- **D. Spirit Yang Dibangun** 15
- **E. Lokasi Pondok Pesantren** 21

BAB 2 PERSPEKTIF KIAI TENTANG POLITIK **23**

- **A. Pengertian Politik** 23
- **B. Komunikasi Politik** 32
- **C. Bentuk-Bentuk Pesan Komunikasi Politik** 41
- **D. Politik Ideal Menurut Tokoh** 53

BAB 3 PONDOK PESANTREN DAN RUANG POLITIK **57**

- **A. Kunjungan Politisi ke Pesantren** 57
- **B. Pondok Pesantren Ruang Masuk Politisi** 60
- **C. Pondok Pesantren dalam Menentukan Kecondongan Terhadap Politik** 62

BAB 4 SANTRI DAN IDE DI MASA DEPAN **65**

- **A. Ilmu Yang Dimiliki Untuk Pembebasan Atau Penindasan** 65
- **B. Santri, Agen Perubahan dan Panutan Masyarakat** 71
- **C. Santri Pembentuk Budaya Gagasan Bukan Politik Praktis** 74

BAB 5 KIAI, SANTRI DAN MASYARAKAT **79**

- **A. Kebijaksanaan Kiyai Dalam Mengkomunikasikan Politik** 79
- **B. Sikap Santri Dan Budaya Politik** 85
- **C. Sikap Masyarakat Terhadap Politik Pondok Pesantren** 93

BAB 6 PENGINTEGRASIAN ANTARA ILMU AGAMA DAN POLITIK **100**

- **A. Islamisasi Ilmu** 100
- **B. Orientasi Amaliyah harus Kepada Ibadah** 106
- **C. Dualisme dalam satu Tubuh** 125

BAB 7 POLITIK AGAMA ATAU AGAMA POLITIK 137

A. Pandangan Tokoh tentang Ideologi Khilafah 137
B. Sikap Tokoh Terhadap Ideologi Khilafah 144
C. Kritik Terhadap Ideologi Khilafah 148
D. Proteksi Terhadap paham Khilafah 149

KESIMPULAN 150

DAFTAR PUSTAKA 151

PROFIL PENULIS 157

معهد الخيرة للتربية الاسلامية
KH. Moh. Nashiruddin Zahid (Alm)
(Pendiri Pondok Putra-Putri Al-Khiyaroh)
Ny. Hj. Khotimah Nashiruddin
(Ummul Ma'had Pondok Putra-Putri Al-Khiyaroh)
KH. Mohammad. Farid NZ.
(Pengasuh)
Ny. Hj. Laili Khiyaroh NZ.
(Pembimbing)
KH. Ahmad Haris NZ.
(Pembimbing)
K. MH. Lutfi Yusuf NZ., MA.
(Pembimbing)
K. Raden MH. Zidni Ilman NZ., S. Fils, M.Pd
(Pembimbing)
PONDOK PESANTREN PUTRA PUTRI
AL KHIYAROH

BAB 1
BIOGRAFI TOKOH

A. Identitas Tokoh

Nama lengkapnya Muhamad Luthfi Yusuf NZ, MA. Beliau lahir di Kota Cirebon atau tepatnya di Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 april tahun 1979. Beliau merupakan kiai kharismatik dengan ekspresi canda dan tawa. Selain itu beliau sosok kiai yang begitu menjaga data privasinya di ruang publik, sehingga jejak digital akan biografinya pun hampir tidak ada hanya lampiran foto dan video, bahkan nomor *whatsapp* (WA) pun tidak boleh dibagikan ke sembarang orang. Di ruang maya hanya bertaburan ceramah-ceramah beliau yang sejuk dan inspiratif serta bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Mungkin, biasanya ketika kita mencari nama salah satu tokoh dan biodatanya, maka akan muncul riwayat hidup misalanya dari nama lengkap hingga jenjang sekolah yang ditempuhnya. Uniknya nama Kiai Luthfi justru tidak ada, yang ada hanya foto-foto dan video ceramah-cermahnya saja.

Akan tetapi dari ceramah-ceramah yang bertaburan di internet (*Youtube* terutama) kita bisa mengetahui sosoknya yang begitu *humble* atau rendah hati dan tidak *riya'*. Karena sesungguhnya foto-foto dan video itu seakan-akan berbicara, bahwa sosok Kiai Luthfi merupakan sosok kiai yang memiliki kepribadian yang sederhana dan hati yang lembut serta

kedalaman ilmu syariatnya, luas wawasannya dan tinggi akhlaknya.

Kiai atau Kang Luthfi biasa akrab disapa (Panggilan kiai di Buntet Pesantren lebih khas dan lebih sering dipanggil "Kang" namun dalam hal ini penulis sengaja memanggil kiai untuk menghormati atau *ta'dzim* kepada beliau, semoga beliau menerima hormat kami). Beliau merupakan anak dari salah satu kiai *sepuh* di Buntet Pesantren ialah KH. Nashirudin Zahid (almarhum) dan Nyai Hj. Khotimah Yusuf. Bapaknya Kiai Luthfi telah meninggal sejak lama pada tahun 1991[1], saat beliau masih menimba ilmu serta usia beliau yang masih anak-anak. Saat itu usianya sekitar 12 tahun. Sejak kecil beliau sudah menjadi yatim, kasih sayang ibundanya yakni Nyai Hj. Khotimah Yusuf berhasil mendidik Kiai Luthfi dan saudara-saudaranya dengan dasar-dasar pendidikan agama yang cakupannya sangat luas. Sehingga anak-anaknya menjadi alim ulama yang tersohor dan menjadi panutan umat.

Sosok Kiai Luthfi yang sederhana dan menjunjung tinggi toleransi membuat beliau banyak disegani oleh berbagai kalangan, bahkan dari kalangan kiai-kiai maupun santri dan siswanya juga banyak yang kagum akan sosok kharsimatik beliau.

Aktivitas beliau merupakan seorang pengajar, di sekolah beliau diangkat menjadi kepala sekolah SMK Mekanika Buntet Pesantren dan sedangkan di pondok ia menjadi penasehat

[1] https://alkhiyarohbuntet.wordpress.com/2020/11/03/sejarah-pondok-al-khiyaroh-buntet-pesantren/ dikunjungi pada tanggal 27 november 2023 pukul 03.26

Pondok Pesantren Al-Khiyaroh. Aktivitasnya itu menjadikannya banyak pengalaman dalam mengenal berbagai karkater anak-anak sehingga tidak jarang Kiai Luthfi saat mengajar banyak diganderungi oleh siswa-siswinya. Karakter tegas dan humoris membuatnya diterima dengan mudah oleh kalangan siswa dan santerinya.

Nama Muhamad Luthfi Yusuf NZ, yang di ujungnya bergelar "NZ" merupakan nama orang tua atau bapaknya ialah Almarhum **N**ashirudin **Z**ahid, beliau memiliki lima anak. Anak *pertama* bernama Nyai Laili Khiyaroh, anak pertama ini lah yang dijadikan sebagai nama pondok pesantrennya. Anak *kedua*, KH. Moh Farid NZ. Anak *ketiga*, KH. Ahmad Haris NZ. Anak *keempat* K. Moh Lutfi Yusuf NZ, dan anak *kelima* K. Moh. Raden Zidni Ilman NZ[2].

Kiai Luthfi dalam beberapa kesempatan menceritakan pendidikannya, dikatakan bahwa beliau sangat mendukung santri yang memiliki keinginan menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi. Seperti halnya dengan beliau, hingga menempuh magister di salah satu kampus negeri di Jakarta yakni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, akan tetapi beliau tidak menyebutkan fakultas dan jurusan apa. Kepribadiannya yang rendah hati dan tidak ingin tampak *riya'* membuat penulis terkagum-kagum akan kerendahan hatinya. Ketika penulis menanyakan prestasi dan pencapaian-pencapaian yang sudah ia gapainya, beliau hanya mencawab itu semua tidak penting yang penting kebermanfaatnnya kepadanya banyak orang.

[2] Ibid, alkhiyarohbuntet.

Penulis mencoba mencari identitas beliau di salah satu kegiatan mahasiswa yang sedang PKKMB yaitu Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru di Kampus STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah) Buntet Pesantren Cirebon Yang diunggah di channel Lutfinz.[3] Menurut moderator acara tersebut bahwa Kiai Luthfi memiliki riwayat pendidikan berjenjang: saat masih madrasah beliau sekolah di SDN 1 MERTAPADA KULON, kemudian beliau melanjutkan ke *tsanawaiyah* di MTS NU PUTERA 2, setelah lulus beliau melanjutkan ke MAN BUNTET PESANTREN (Sekarang MAN 3 BUNTET PESANTREN CIREBON), setelah lulus beliau melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Cirebon yakni S1 STAI Sunan Gunung Djati (Sekarang IAIN SYEKH NURJATI CIREBON) beliau mengambil jurusan Bahasa Arab, setelah lulus sarjana beliau melanjutkan ke jenjang magister, beliau kuliah di S2 Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan fokus Kajian Hukum Islam Modern.

Pengalaman organisasi, beliau menjadi Kepala Sekolah SMK MEKANIKA Pondok Buntet Pesantren, Menjadi Pembimbing Pondok Pesantren Al Khiyaroh, Ketua Forum Kepala Sekolah NU di Kabupaten Cirebon[4].

Kemudian saat ini, Kiai Luthfi dalam struktur keorganisasian Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Buntet Pesantren Cirebon oleh para kiai sepuh Buntet Pesantren

[3] https://www.youtube.com/watch?v=hwz5cHRnP9c&t=927s dikunjungi pada tanggal 29 November 2023 pukul 16.40
[4] https://www.youtube.com/watch?v=hwz5cHRnP9c&t=927s dikunjungi pada tanggal 29 November 2023 pukul 16.40

diamanati sebagai ketua bidang Kepesantrenan dan Litbang yakni sebuah bidang dalam memajukan kaum intelektual santri, bahwa santri hari ini bukan saja harus pandai dalam ilmu agama tapi harus aktif, kreatif dan inovatif karena yang dihadapi bukan masa-masa klasik, tapi masa digitalisasi.[5]

Sebenarnya untuk pengalaman dan jabatan dalam struktur organisasi masih banyak yang belum penulis ungkap tentang sosok Kiai Luthfi, akan tetapi sikap rendah hati dan takut *riya'* beliau sengaja menyembunyikan identitas dan prestasinya. Tetapi, penulis bersyukur sudah bisa mendengar, melihat dan bersentuhan langsung dengan beliau tentang pandangan-pandangan politiknya.

Penulis sadari Identitas tokoh menjadi penting, karena identitas merupakan kepala yang menjadi ciri bahwa seseorang itu memiliki wujudnya dan menjadi fokus pembahasan. Kalau kita bertanya:

> "Kenal sama si fulan tidak? Yang tinggal disitu.., Ciri-cirinya seperti ini..seperti ini.., ya kebiasaannya seperti ini, yang biasa di tempat tongkrongan itu..".

Dari ilustrasi tersebut tentunya kita bisa mengenali sosok yang dibicarakan, karena penanya sudah memberikan identitas dan juga ciri. Maka identitas merupakan simbol penting dari sebuah komunikasi, sehingga kita bisa mengenal dan berlanjut menjadi keakraban dengan tokoh tersebut.

[5] Wawancara pada salah satu tokoh Kiyai Buntet Pesantren K.M Luthfi Yusuf NZ MA bidang pendidikan YLPI Buntet Pesantren pada tanggal 29/10/2023

B. Ciri Khas Tokoh

Kiai Luthfi ialah sosok yang ramah, dalam dirinya mengalir darah atau keturunan kiai sehingga terpancar kearifan dan keluhuran budi pekertinya, beliau dapat berbaur dengan santri dan siswanya, maka tidak heran dilingkungan santri dan siswanya sangat dikagumi bahkan di luar lingkungan pondok pesantren pun disegani. Pembawaannya yang santun, santai dan tegas membuat sosoknya tampil kharismatik serta tidak sedikit para tokoh-tokoh non-Islam pun merapat dalam diskusi-diskusi keagamaan, moderasi beragama bersama beliau.

Secara fisik beliau memiliki postur tubuh cukup ideal bagi sosok laki-laki. Beliau memiliki badan yang tegap serta memiliki bentuk tubuh yang berisi, kekar dan tinggi semampai. Pada dirinya selalu melekat peci hitam dan kacamata pipih bening, dengan balutan jenggot dan kumis tipis yang terukir rapih menjadikan wajahnya begitu menampilkan ketegasan, serta tidak ketinggalan sarung khas kaum pesantren. Namun tidak jarang juga beliau memakai celana yang sedang hit hari ini, beliau mengikuti mode fesyen kekinian. Tampil nyentrik bergaya pemuda zaman sekrang.

Beliau memiliki suara yang khas, yakni suara yang bulat dengan pembawaan yang tegas namun saat didengar ringan suaranya. Derap langkahnya seperti Bung Karno yang disaat sedang berjalan, langkahnya mantap dan menancap di tanah tidak goyah mundur ke belakang. Tawanya menggelegar, hingga membuat suasana menjadi segar dengan obrolan yang menarik

tanpa pagar batasan. Dari mulai berbicara kitab-kitab hingga buku-buku modern barat terutama kajian-kajian sosial.

Kiai Luthfi juga memiliki hobi berolahraga, wajar saja jika tubuhnya tampak ateletis karena memang memiliki minat terhadap olahraga. Dalam beberapa kesempatan pernah melihat beliau sedang asik bercanda ria dengan para santeri atau siswanya sambil memainkan bola voly di jemarinya, bola tersebut diputarkan di atas jari telunjuknya dan cukup lama berputar sehingga membuat sorak tawa dari murid-muridnya akan kelihaian memainkan bola di jemarinya yang kekar itu begitu terkagum-kagum.[6]

Konon dahulu Kiai Luthfi dan Kiai Farid (kakaknya) merupakan pemain bola, dimana setiap terdapat turnamen bola di desanya beliau selalu ikut untuk memperkuat timnya. Setiap ada kiai Luthfi pasti menang timnya. Kiai Luthfi sangat hobi bermain bola sejak kecil, banyak hal yang beliau pelajari dari sepak bola tentang kerjasama, cara atau taktik, kontrol bola yang baik dan yang paling penting kecerdasan dalam melihat setiap peluang.

Disamping keramahannya, tuturkatanya yang dijaga halus dan ketajaman berpikirnya sosok Kiai Luthfi memiliki wawasan luas tentang sosial, sejarah dan kenegaraan. Hal itulah yang membentuk corak berpikirnya yag khas, yakni bebas dan tak terbatas. Cara berpikir beliau tidak mengkotak-kotan suatu pengetahuan akan tetapi menyatukan atau mengintegrasikan

[6] https://www.youtube.com/watch?v=0Y8rg93dMgY dikunjungi pada tanggal 29 November 2023 pukul 15.57

ilmu dan pengetahuan, sains dengan agama dan politik dengan agama.

Tokoh-tokoh kiai Buntet Pesantren sudah banyak melahirkan intelektual-intelektual muslim dan tokoh-tokoh nasional, membuat Buntet Pesantren di kenal luas. Salahsatunya Kiai Luthfi, ciri khas beliau ialah dengan corak pemikirannya inklusif, yang selalu terbuka menerima siapapun yang datang berkunjung ke Buntet Pesantren.

Menurut beliau siapapun yang berkunjung atau bertamu ke Buntet Pesantren wajib disambut dengan baik dan diterima dengan baik dan didoakan dengan baik serta yang terpenting tidak mengenal suku, agama, ras dan golongan dari mana pun.

Kiai Luthfi memiliki tingkat humor yang cukup membuat orang asik tertawa, bercanda ria bersamanya, namun yang paling utama ialah kata-kata *quots*nya yang keluar dari lisannya untuk nasehat-nasehat kehidupan bagi generasi sekarang. Hal seperti itu membuat terjalinnya hubungan antara murid dan gurunya menjadi lebih efektif dan efisien.

Dikutip dari *chanel youtube*nya yakni "Lutfinz Channel"[7] salah satu quotsnya yakni, "*Ketinggian akhlak dan kesuksesan seseorang itu bisa dilihat dari cara bagaimana dia memperlakukan dan menghargai seorang gurunya*".

Gaya bahasanya yang semantik dan diksinya menarik dengan didorong suaranya yang menggelegar, membuat di setiap cermah maupun orasinya begitu diminati banyak kalangan. Gaya

[7] https://youtube.com/shorts/mKvwcW8gmp0?si=kWluWaB3dGylaCb dikunjungi pada tanggal 29 November 2023 pukul 15.35

retorikanya dalam menyusun kata-kata lebih filosofi, menata diksi yang tidak berat namun dalam sehingga mudah dipahami dan dimaknai oleh semua lapisan dan kalangan, baik akademisi maupun santri dan masyarkat umum.

Kiai Luthfi memiliki gaya bahasa yang khas, suaranya yang segar dengan pemanfaatan diksi yang lugas dan pas selalu berhasil tampil memukau. Dirinya memiliki daya kharismatik, sehingga bagi santri dan murid-muridnya memiliki kesan tersendiri terhadap guru yang membimbingnya itu.

Gaya komunikasi Kiai Luthfi jika dilihat secara perpektif komunikasi, beliau termasuk ke dalam komunikator asertif, dimana bentuk komunikasi yang menampilkan hubungan terbuka tanpa bersikap sombong. Komunikator asertif dapat mengekspresikan kebutuhan, keinginan, ide, dan perasaan mereka, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Komunikator asertif bertujuan menyeimbangkan hak seseorang dengan hak lainnya.[8]

Kiai Luthfi dalam berpakain sangat rapih, detil dalam menjaga kerapihan hingga kancing paling atas pun tidak luput dikancing. Pakaian yang digunakan tidak pernah terlihat kusut, salur pakaiannya rapih seperti distrika tiap hendak dipakai. Wangi pakaiannya semerbak dihiasi bau-bau yang mendamaikan dan membuat orang di sampingnya betah untuk berdekatan hanya sekedar bincang-bincang belaka.

[8] https://binus.ac.id/malang/communication/2022/06/21/4-jenis-gaya-komunikasi/ dikunjungi pada tanggal 29 November 2023 pukul 15.47

Aksesoris jam tangan warna silver terus bergelayut dan bertengger di pergelangan tangannya, sesekali saat ceramah beliau melihat jam tangan hanya ingin memastikan pukul berapa sekarang atau barang kali durasi ceramahnya sudah masuk waktu habis.

Kiai Luthfi ciri lainnya ialah, beliau saat menjelaskan sesuatu yang belum dipahami mad'u nya selalu menggunakan analogi-analogi yang sumbernya dekat dengan lingkungan dan aktivitas masyarakat pada umumnya. Kekuatan beranalogi inilah yang membuat setiap ceramahnya berhasil diminati masyarakat, di samping itu disertakan juga dalilnya.

Beliau termasuk kiai yang mdoreat, tidak ekstrim kanan dan ektrim kiri. Segala hal diukur secara proporsional, jika tidak menyukai suatu hal tidak terlalu membencinya karena masih ada kebaikan. Mencari sisi kebaikannya. Begitu juga sebaliknya.

Wawasan politik beliau begitu luas, kajian *fiqih siyasah* sudah menjadi makanan bacaan tiap harinya. Akan tetapi beliau tipe orang yang tidak menyukai politik praktis, sebatas menyukai ilmu dan kajian politik. Saat penulis bertanya "Pak Kiai kenapa tidak menyukai Politik". Beliau menjawaban dengan gurauan "Karena di politik orang yang cerdas, dibuat bodoh. Dan orang bodoh dipinter-pinterin, enggak punya gagasan". Jawaban itu membuat kami tertawa terpingkal-pingkal.

Dalam hal politik walau tidak seahli KH. Anas Arsyad Buntet dan juga tidak begitu tersohor seperti nama-nama kiai Buntet lainnya, tetapi Kiai Luthfi merupakan kiai muda yang mampu membawa arah pergerakan santri dalam berpolitik.

mengajarkan kita, masyarkat untuk berwawasan politik yang bersifat ideologis, bukan politik praktis atau pragmatis.

C. Karakter Kepemimpinan Tokoh

Satu dari sekian hal unik tentang sosok Kiai Luthfi yang membuat menarik dari sosoknya ialah, beliau mengagumi tokoh pemimpin yang tidak umum dari kebanyakan lainnya, sosok non muslim yang ia begitu kagumi sehingga menjadikanya tokoh kiai unik, sosok tersebut ialah Napoleon Bonaparte. Padahal Napoleon merupakan kaisar yang kontroversial dalam sejarah Revolusi Perancis, akan tetapi Napoleon memang dikenal orang yang mampu membawa perubahan bagi Eropa.

Kontroversialnya bahwa Napoleon merupakan pemimpin yang lalim dan penghasut kejam, bagi para pengkritik Napoleon melakukan negosisasi, manipulatif dan mempolitisasi upayanya untuk mencapai kekuasaan tunggal melalui kudeta berdarah pada tahun 1799.[9]

Lagi-lagi penulis dibuat kagum dengan Kiai Luthfi, sosok Napoleon dimodif menjadi sosok politisi yang dijadikan panutan yang dalam pandangannya tidak diprasangkai sebagai kejahatan akan tetapi kesuksesan dalam pencapaian dan keberhasilannya menjadi pemimpin, serta menempatkannya sebagai tokoh revolusioner Perancis.

Sedangkan karakternya yang supel, mudah bergaul ternyata beliau juga mengagumi tokoh Soekarno, proklamator

[9] https://www.nationalgeographic.com/premium/article/napoleon-bonaparte-enlightened-leader-or-tyrant dikunjungi pada tanggal 28 November 2023 pukul 02.36

negara Indonesia. Karakternya yang tegas dan cerdas rupanya telah mengalir dalam kehidupan sosok Kiai Luthfi seperti idolanya.

Sosok Kiai Luthfi menjadi panutan karena apa pun dalam pandangannya akan diubah menjadi hal yang netral, bahkan baik. Dalam pandangan politisnya, ketika orang-orang ramai mengkritisi kondisi demokrasi hari ini yang abu-abu, yang hanya tampak kenegaraan banyak diisi atau dikuasi oleh oligarki dan kapitalis. Kiai Luthfi mengarahkan kita akan pentingnya berpikir yang jernih, tidak boleh mengikuti prasangka yang ujungnya merugikan. Seperti presiden saat ini, dimana-mana banyak kritik tetapi bagi Kiai Luthfi justeru menyanjung presiden republik Indonesia kita ini.

Memuji akan kepemimpinan presiden tentang sosok pemimpin yang baik, mengucapkan syukur atas dedikasinya terhadap santri dengan membuatkan hari peringatan, yakni hari santri nasional. Kiai Luthfi memandang sesuatu berdasarkan logika yang komperhensif atau lengkap. Tidak hanya kesalahan-kesalahan dan kekurangan, tetapi melihat kelebihan sebagai pengisi kekurangannya dengan seperti itu menjadikan suhu politik bergerak ke arah positif, tidak terbawa propaganda.

Kiai Luthfi menekankan aspek politik yang netral, tidak tempramental yang hanya memperkeruh suasana kisruh dalam negeri. Melalui pandangan-pandangannya, politik tidaklah senegatif dan apa yang diprasangkai oleh kebanyakan orang. Politik akan lebih baik jika dikendalikan oleh pikiran-pikiran

yang positif, dibawa humoris dan dibahas secara santai tidak melulu politik praktis yang mendulang prasangka angkara.

Kecerdasan dan keberanian beliau tampak terlukis layaknya Napoleon yang dijiwai Soekarno, sebuah perpaduan antara globalis dan nasionalis sehingga membawa karakternya menjadi kuat dan lekat di kalangan Kiya-Kiyai Pondok Pesantren dan juga santri dan siswa-siswanya serta masyarakat umum. Beliau saat berbicara lantang, tegas, lugas dan membekas.

Melalui motto hidupnya yang menurut penulis unik, ialah "*Santai Tapi Pasti Dengan Ngopi Semuanya Akan Berjalan dengan Lancar Serta Mendapatkan Ridlo Dari Allah Subhanahuwata'ala*". Lagi-lagi kita disuguhkan akan pemilihan diksi yang sederhana tetapi memiliki filosofi yang mendalam. Singkatnya, hanya dengan secangkir kopi, manusia mampu berkomunikasi transendental dengan Tuhannya dari kedekatan itulah jalan hidup kita akan tenang dan damai.

Karakter kepemimpinan beliau jika dilihat dari pendekatan komunikasi, gaya kepemimpinannya termasuk pemimpin yang demokratis. Hal itu berdasarkan pendapat White dan Lippit mengidentifikasi tiga gaya kepemimpinan:

Pertama Authoritarian Leaders, pemimpin melakukan kontrol terhadap keputusan dan tugas serta memastikan bahwa rencana yang dibuat bisa dieksekusi dengan benar.

Kedua, Democratic Leaders, pemimpin lebih berorientasi membimbing dibanding mengkontrol aktivitas kelompok; berbagi kewenangan dan mempertimbangkan

masukan dari bawahan dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Ketiga Laissez-Faire Leaders, pemimpin menyerahkan hampir semua keputusan kepada bawahan; pemimpin menerima konsultasi dari bawahan tapi biasanya ia mendelegasikan semua kewenangan pada bawahan.[10]

Kiyai Luthfi masuk kedalam gaya kepemimpinan demkoratis, hal itu karena orientasi kepemimpinannya lebih kepada mengajak, menyeru, membimbing, berbagi wacana dan gagasan, dan banyak lainnya terkait sikap kepemimpinannya dan pandangan politiknya hari ini.

Sikap tersebut terbentuk tidak jauh dari lingkungan tempat tinggalnya, dimana beliau secara historis tinggal di Pondok Pesantren yang sosialnya sudah dikonstruk menjadi sosiologi dakwah. Sehingga tidak heran, segala aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai agama yang diajarkan dan dihormati oleh masyarakat. Faktor sosiologi dawkah ini lah yang membentuk kepribadian seorang Kiyai Luthfi lebih moderat atau demokratis dalam menimbang dan menentukan arah gerak kepemimpinannya maupun dalam pergaulannya.

Sebagai seorang tokoh, Kiai Luthfi dalam mengontrol bahasanya selalu melihat konteks, adakalanya saat di desa bahasanya menggunakan jawa *bebasan* (Bahasa Jawa Halus) tapi jika dengan orang kota yang plural menggunakan bahasa indonesia kadang dengan nonformal dan berbeda juga saat di

[10] Mahmudah, Dede. Komunikasi, Gaya Kepemimpinan, Dan Motivasi Dalam Organisasi. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 19(2) (Juli-Desember 2015) Hlm: 285 – 302.

kalangan mahasiswa dan santri yang intelek. Kiai Luthfi menjadikan bahasa sebaagai metode dalam menyampaikan gagasan-gagasan politik dalam khazanah syariat Islam tentunya.

Walaupun tokoh yang dikagumi non-Islam dan tokoh nasionalis, tetapi Kiai Luthfi mampu membawa gagasan luar tersebut untuk masuk ke dalam wawasan fiqih *siyasah* sebagai sebuah warna dalam khazanah berpikir. Sebagai bahan kajian untuk memperkaya keilmuan yang multidisipliner.

Karakteristik ketokohan beliau yang demokratis, membuat siapapun segan untuk berdiskusi. Cara berpikirnya inklusif dan pluralistik, menjadikan banyak orang yang tertarik untuk beridiskusi banyak hal dan sepanjang waktu apalagi tentang politik inklusif pondok pesntren Buntet. Kiai Luthfi berharap santri dan siswanya belajar tidak hanya berhenti di lingkungan pesantren atau pendidikan, belajar bisa dimana pun dan terus menggali keilmuan semata untuk menggapai *barokahnya* ilmu yang mereka pelajari.

D. Spirit Yang Dibangun

Kiai Luthfi sebagai seorang pendidik yang memiliki wawasan keIslaman yang mendalam, pengetahuan yang luas dan mampu beradaptasi dengan teknologi kekinian. Mengerahkan segala pemikirannya untuk menggeser cara berpikir santri saat ini, bahwa santri harus berada dimana pun tidak melulu di masjid-masjid, mushola-mushola maupun tempat ibadah-ibadah saja tetapi harus ada di setiap lini seperti di bengkel, di sekolah, di perguruan tinggi, di kedokteran, bahkan di politik.

Spirit atau semangat yang dibangun oleh Kiai Luthfi kepada santri-santri maupun siswa-siswanya tertuang dalam gagasan pemikirannya, ialah bahwa sosok Kang Luthifi berpandangan agar santri bukan saja pandai ilmu agama tapi harus aktif, kreatif dan inovatif karena yang dihadapi bukan bukan masa masa klasik, tapi masa digitalisasi. Jadi santri itu bukan hanya pandai ilmu agama saja, melainkan ilmu etika, estetika, budaya, sosial, politik, maupun filsafat harus dikaji semua, dimakan semua. Supaya santri itu ada dimana-mana.[11]

Seakan dedikasi terhadap pendidikan benar-benar yang utama sehingga beliau fokuskan untuk kecerdasan anak-anak bangsa, yang beliau dituangkan ke dalam ide-ide tentang perubahan arah dan menjadi kebutuhan santri maupun siswanya kelak setelah mereka tamat dari sekolah atau *boyong* dari pondok ke tempat asal mereka. Nantinya anak-anak bisa mandiri, mendirikan bengkel misalnya atau mendirikan perusahaan karena diajarkan *enterpreneurship* dalam pondoknya.

Politik yang diajarkan Kiai Luthfi dalam konteks ini bahwa kita harus bisa menguasai pengetahuan, sains, teknologi dan ilmu. Santri diajarkan ilmu politik misalnya, supaya kelak ketika sudah di masyarakat akan mengajarkan pendidikan politik. Politik yang baik itu seperti apa dan bagaimana, sehingga masyarakat yang memiliki sikap golput tercerahkan, bahwa suaranya itu jauh lebih penting dari keegoisannya yang membawa pada terpilihnya pemimpin yang lalim.

[11] Ibid, wawancara Kang Luthfi

Semangat itulah yang Kiai Luthfi ajarkan dan tumbuhkan baik di kalangan santri maupun siswanya di sekolah dan pesantren. Santri tidak hanya pandai dalam ilmu agama, melainkan praktisi *IT developmen* program aplikasi misalnya. Tidak hanya pandai dalam mengoprek ilmu *nahu shorof* dengan *wazan-wazan fiil-failnya* tetapi juga pandai mengoprek kelistrikan, sasis motor dan mesin motor misalnya. Dan juga tidak hanya pandai ilmu *mantik* dan *balagho* tetapi juga mapu mengamati retorika politisi dalam ruang politik.

Bagi beliau politik tidaklah negatif, melainkan suatu cara untuk mencapai sesuatu yang menjadi bermanfaat jika bisa diraih untuk mencapai tujuan bersama. Politik dan ilmu agama harus terintegrasi supaya menjadi daya gedor yang kuat dalam perubahan yang berdimensi luas, spirit perubahan yang terus digaungkan Kiyi Luthfi kepada para santrinya supaya kelak santri menjadi suritauladan yang baik di mata masyarakat dunia.

Jadi terdapat paradigma yang berbeda dalam mendekati kajian politik, bagi tokoh kiai muda ini, Kiai Luthfi. Seakan terdapat garis vertikal yang membentang luas dan panjang yang membedakan antara politik agama dan politik bukan agama dalam melihat dasar atau pijakan berpikirnya.

Terdapat definisi yang secara kebetulan *rilet* dengan pandangan ini. Ada yang berpendapat bahwa Islam politik adalah konfrontasi antara Islam dan kekuasaan dan negara, yang menghasilkan sikap dan perilaku politik serta budaya politik

yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.[12] Sedangkan politisasi Islam ialah segala hal yang bernilai Islami digunakan dalam politik terdapat penekanan adanya nilai-niali agama hanya berupa simbol-simbol yang tidak memiliki fungsi.

Sederhananya, dalam berpolitik harus berlandaskan agama sehingga sikap dan perilaku dalam berpolitik menggunakan nilai-nilai agama seperti jujur, tidak menjelekkan lawan politik berusaha untuk bermain *supportif*, tidak curang hanya untuk kepentingan sendiri tapi berguna bagi rakyat dan negara dan lain sebagainya. Sehingga nilai-nilai agama hidup dalam praktik bernegara.

Akan berbeda jika cara berpikirnya berangkat dari awal ingin menggunakan nilai-nilai agama demi mendapatkan kekuasaan, maka nilai-nilai agama itu hanya sebuah simbol belaka tanpa makna seperti politik identitas misalnya.

Kiai Luthfi berpijak dari nilai-nilai agama yang telah menjadi paradigma berpikir politik, menjadikan politik lebih agung, politik yang berwibawa. Jika selama ini politisi mengikuti kampanye-kampanye demi memenangkan suara rakyat, padahal untuk kepentingan pribadinya dalam mencapai kemenangan untuk kekuasaan. Akan berbeda, jika cara berpikinya berangkat dari agama, mendapatkan kemenangan untuk kedaulatan rakyat.

Spirit itulah yang Kiai Luthfi ajarkan, bahwa politik dan agama harus berjalan beriringan. Ibarat sebuah rel kereta kata

[12] Ahmad, Jafar. Ilmu Politik Praktis (Dari Teori Ke Implementasi). Jambi: Akademia Virtual Media. Hlm 470

beliau, walau terdapat pemisah antara jalur kanan dan kiri dan tidak akan pernah menyatu, tetapi rel kereta mampu menjadi pijakan, mampu membawa kereta sampai tujuan yang diinginkan. Analogi itu berarti, anatara ulama dan umaroh itu harus tetap komunikatif, berjalan bersama-sama dan bergerak bersama untuk mencapai tujuan bernegara yang telah dicita-citakan, yakni kedaulatan rakyat.

Konsep dasar berpolitik menjadi awal bagi pemimpin dalam merancang tugasnya yang diberikan negara, jika sejak awal pijakannya hanya untuk mencari kekuasaan dan keuntungan maka dalam proses perjalanannya pun kepemimpinannya akan terus bergelombang, banyak tipu-tipu dan alasan muslihat yang pandai menjilat atas nama pembangunan dan kepentingan rakyat.

Menurut Kiai Luthfi bahwa berpolitik itu harus memiliki ilmunya, jangan pernah serahkan kedaulatan rakyat kepada pemimpin yang tidak memiliki keahlian bidangnya, karena kelak jika dipegang oleh orang yang bukan spesialisasinya maka sesuatu yang dipegangnya akan hancur, rusak dan luluh lantak. Masih mending mundur teratur sejak awal, jika tidak ingin kemusnahan itu terjadi.

Semangat yang dibangun Kiai Luthfi dalam membangun negara harus diawali niat yang lurus, hati yang teguh dan tidak mudah tergoyahkan oleh "*cawe-cawe*" yang diiming-imingi oleh lawan politik ketika dijanjikan kekuasaan. Berpolitik bukan hanya tentang mendapatkan prestise, namun jauh dari itu ada yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi

berpolitik tujuannya bukan pribadi atau golongan, tapi ada namanya “rakyat”. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di penguasa negara. Penguasa negara hanya instrumen pendukung dalam mengurus ketatanegaraan, yang mengurus rumahtangga negara itulah penguasa negara sedangkan yang punya rumahnya itu rakyat.

Fenomena hari ini, para pembantu yang menyuruh tuannya. Mereka harusnya mengurus keperluan rumah, malah menguasai rumah dan ironisnya tuannya disuruh dan dikomodifikasi sebagai bentuk komoditas yang bernilai jual di sekala sektor data-data nasional. Artinya bergesernya pola politik negara, yang sejak awal negara ini dibangun untuk kepentingan rakyat, diubah menjadi kepentingan negara.

Padahal secara logika negara itu hanya institusi yang tidak memiliki perasaan, keinginan tidur. Justeru yang memiliki rasa ingin tidur, perlindungan itu rakyat, itu lah mengapa kedaulatan berada di tangan rakyat.

Satu hal tentang politik, menurut Kiai Luthfi dalam membangun spirit bernegara ialah menjadi orang yang bermanfaat bagi umat manusia. Karena sebaik-baiknya manusia ialah orang yang hidup untuk kemaslahatan umat, untuk bermanfat bagi masyarakat dalam berinteraksi sosial. Gapailah cita-cita, keinginan atau apa pun yang dipanjat hingga setinggi langit namun jangan lupa bahwa Ridho Allah Swt., jauh lebih penting dari apa-apa yang pernah didapatkan dan yang akan dicari-cari segalanya.

E. Lokasi Pondok Pesantren

Buntet Pesantren yang kita kenal sekarang ini, merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia, berdiri sejak abad 18 M dibangun oleh Mufti Keraton Cirebon, hal itu karena Mbah Muqoyim yang tidak mau kompromi dengan penjajah Belanda karena ikut campur dalam urusan keraton, sehingga keraton tidak lagi murni namun sudah menjadi campurtangan Belanda saat itu. Mbah Muqoyyim menolak keberadaan Belanda yang terlalu ikut campur urusan keraton, dengan penolakan itu, Mbah Muqoyim lebih memilih tinggal di luar tembok istana hidup bersama masyarakat dan menjadi guru kemudian mendirikan pesantren yang kini dikenal dengan Buntet Pesantren.[13]

Pondok Pesantren Buntet berada di Blok Manis, Desa Mertapada Kulon Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon. Letak Desa Mertapada Kulon adalah 12 Km ke arah Selatan dari Kota Cirebon; 26 Km ke arah Timur dari Ibu Kota Kabupaten Cirebon.[14]

Menurut Kiai Luthfi bahwa data terakhir Buntet Pesantren sekarang memiliki 71 pondok pesantren dan bidang beliau membawahi 71 pesantren tersebut di seluruh Buntet. Sedangkan luas Buntet Pesantren yang berdiri kurang lebih 25–30 hektar tapi berdiri di emapat desa. Sehingga 70% berdiri di Desa Mertapada Kulon desanya terdapat di Buntet, 10% di desa

[13] https://buntetpesantren.id/sejarah-singkat/ dikunjungi pada tanggal 28 november 2023 pukul 04.05
[14] https://sc.syekhnurjati.ac.id/escamp/risetmhs/BAB31410110107.pdf dikunjungipada tanggal 26 november 2023 pukul 01.05

Buntet yakni Buntet depan. Selebihnya, pesantren berada di desa Munjul dan desa Sidamulya. Keberadaan pondok pesantren Buntet memang t erbilang antik atau unik, karena pesantren yang berdiri di tempat empat desa yang berbeda, tutur Kiai Luthfi.[15]

Lokasi Pesantren Buntet, dapat dikategorikan sebagai tempat yang ramai, strategis dan sangat mudah dijangkau dengan menggunakan kendaraan jenis apapun. Lantaran jalan yang menuju ke lokasi itu, sejak lama terlewati kendaraan umum (bus, elf dan truk) dari Ciledug menuju ke Cirebon; bahkan bus atau truk dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta (melalui jalan alternatif) dapat melewati jalan raya Mertapada Kulon (Desa di mana terdapat Pesantren Buntet). (Rosad Amidjaja, I. Syarif Hidayat dkk (1985 : 13)).[16]

[15] Op.cit., wawancara Kang Luthfi
16 Op.cit. syekhnurjati.ac.id

BAB 2
PERSPEKTIF KIYAI TENTANG POLITIK

A. Pengertian Politik

Disaat masyarakat hari ini terbawa akan hegemoni politik global, suara-suara anti demokrasi dan anti kapitalisme menggaung di media-media. Namun tidak dengan salah satu tokoh kiai muda dari Buntet Pesantren, beliau akrab disapa dengan Kang Luthfi atau Kiai Luthfi. Menurutnya politik ialah berasal dari bahasa Arab yakni *Siyasah*, yaitu suatu cara untuk menentukan seorang pemimpin dimana salah satunya adalah dengan politik dan cara yang paling baik adalah demokrasi.

Jadi politik hanya sebatas kendaraan saja, untuk kita dipilih dan terpilih menjadi seorang pemimpin, maka caranya dengan politik atau *siyasah*. Selain itu pesantren menjadi media literasi politik, karena di dalam literatur pesantren juga kajian politik lebih dikembangkan, seperti poilitik yang baik itu bagaimana, politik dianggap tidak baik itu bagaimana.[17]

Hal itu sependapat dengan pandangan Rod Hague, dkk. Menurutnya, politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya (*Politics is the activity by which groups reach*

[17] Ibid, wawancara Kang Luthfi

binding collective decisions through attempting to reconcile diferences among their members).[18]

Kiai Luthfi memiliki pandangan bahwa politik tidak boleh dijadikan tujuan, jika politik dijadikan tujuan maka yang terjadi apa pun dan bagaiman pun caranya agar tujuannya tercapai. Menghalalkan cara untuk meraih misinya, hanya menunjukkan sisi egois dari banyaknya kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai. Suatu ambisi yang tidak memandang lagi baik dan buruk, tetapi melihat pada pencapaian politiknya.

Politik secara subtansi merupakan kegiatan sosial, untuk menciptakan keteraturan dalam bermasyarakat. Di mana politik bukanlah institusi-institusi politik yang memiliki banyak kepentingan. Politik lebih pada kajian perilaku secara elementer, perilaku yang dilakukan individu dalam setiap harinya untuk menciptakan kedamaian, ketentraman dan keteraturan. Namun kemudian arti politik berubah dengan lebih kompleks, dari sebuah perilaku atau kegiatan masyarakat sehari-hari menjadi kegiatan negara.

Maka politik sebagai kegiatan dikemukakan Miriam Budiardjo (1982: 8) pada umumnya dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem

[18] Rod Hague et al. Dalam Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm 16

politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.[19]

Kiai Luthfi pandangannya terhadap politik lebih menitikberatkan pada aspek aktivitas sehari-sehari, sehingga politik memiliki cakupan yang lebih uiversal. Bermakna luas. Aktivitas politik menjadikan wilayah lingkungan terus bersinergi, karena segala hal sudah terdapat wilayah kajiannya masing-masing. Tidak seperti hari ini, politik dijadikan sebagai cara menyampaikan gagasan namun didominasi oleh gimik.

Secara luas yang dimaksud gimik (*gimmick)* memiliki dua arti. *Pertama*, yaitu gerak-gerik tipu daya aktor untuk mengelabui lawan peran dan suatu hal seperti trik atau alat yang digunakan untuk mendapatkan perhatian. *Yang kedua,, gimmick* dapat diartikan sebagai usaha, cara, atau alat untuk menarik perhatian.[20]

Perilaku politik dalam keseharian merupakan bahasa politik yang paling jujur, tidak terjebak dalam pengertian politik secara institusional, yakni sebuah politik yang tidak lagi mengusung humanis dan demokratis, namun lebih kepada teokrasi seakan pemimpin diturunkan Tuhan dan tidak memiliki kelemahan untuk dikritik. Maka untuk menekan kebohongan-kebohongan dalam suatu politk, dibuatlah gimik untuk menutupi

[19] Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. MEMAHAMI TENTANG BEBERAPA KONSEP POLITIK (Suatu Telaah dari Sistem Politik). Mimbar: Volume XXI No. 2 April-Juni 2005 : 262 – 285.

[20] https://akupintar.id/info-pintar/-/blogs/menggunakan-gimmick-saat-mengajar dikunjungi pada tanggal 11/12/2023 pukul 02.01

kebohongan yang lain karena metode gimik lebih menekankan orang untuk tertarik bukan untuk interaksi berkelanjutan.

Politik yang didasari oleh perilaku, akan memungkinkan individu untuk berperilaku politik sesuai nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Seperti ketika ingin menjadi penguasa wilayah, maka jalan yang ditempuh dengan membuat masyarakat yakin dengan sosoknya. Berusha untuk tidak berbohong atau mendustai rakyat, namun kegiatannya diisi dengan nilai-nilai agama seperti jujur dan amanah tanpa memikirkan baimana masyarakat tertarik tapi bagaimana masyarakat melihat perilakunya (akhlak) maka masyarakat akan percaya atau yakin, bukan tertarik.

Perilaku politik yang berlandaskan akhlak tidak perlu membuat program-program atau janji palsu dan membuat strategi rumit seperti gimik, karena dengan memberikan keyakinan kepada masyarakat modal awal dalam membangun solidaritas dan merealisasikan gagasan ide-idenya. Tidak perlu menunggu jani ditagih rakyat, perilaku politik sudah menjadi bagian rakyat dan rakyat merasakannya. Hati lebih tahu apa yang ada dalam diri seseorang, komunikasi nurani lebih dapat diterima dan dipahami tanpa adu gagasan dan cara tipu-tipu.

Kajian politik dalam perspektif santri dan pondok pesntren merupakan perilaku politik, artinya santri tidak perlu diajarkan politik karena sudah menjadi keseharian mereka, bagian dari kehidupan santri di dalam pondok pesantren. Bahkan sumber bacaannya tidak kalah dengan buku bacaan para praktisi politik atau yangkita kenal politisi.

Bahkan politik di lingkungan santri sudah menjadi hal biasa, tentunya politik yang sesuai kaidah fiqih. Seperti sebuah kejadian santri yang hendak mengikuti kajian kitab, karena sudah telat daripada kena marah kiyai, ahirnya ia jalan tanpa sandal menghindari *Ghosob*. Dalam qoidah fiqih dikenal "*Menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan didahulukan atas sesuatu yang mendatangkan manfa'at*". Santri tersebut berpikir, jika budaya *ghosob* tersebut terus di lanjutkan maka berdampak pada generasi santri-santri yang akan datang, dia sebagai senior harus menunjukan teladan yang baik. Singkatnya dia menolak *ghosob*, walaupun keuntungannya bisa hadir di majelis dan tidak kepanasan kakinya namun sikap tersebut hanya menguntungkan untuk diri sendiri.

Apa yang diajarkan Kiai Luthfi ialah bahwa kita harus jujur, politik merupakan perilakun kejujuran untuk mendapatkan suatu yang diinginkan, dicapai dan mendatangkan kebaikan yang mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga kejujuran merupakan cara politik yang disampaikan dengan adab, bukan dengan manipulasi.

Politk yang telah mejelma menjadi perilaku dalam keseharian senantiasa menebar kebaikan dalam setiap keadaan, sebab pada akhirnya kebaikan tersebut akan menjadi ladang ibadah yang kelak mendapatkan keberkahan dan akan mendatangkan kepada kita suatu kebaikan yang sama seperti saat kita menebar kebaikan tersebut. Perilaku politik yang baik menandakan ibadah yang kita lakukan benar-benar telah masuk ke sanubari atau telah mampu mencapai titik ikhlas, dan hal itu

yang akan menrima takdir Allah Swt., sebagai takdir yang harus dijalani, sebaik dan setidak enak pun keduanya merupakan qodo dan qodarnya Allah Swt.

Secara teori pendekatan perilaku ini disebut perilaku politik (*norms for political behavior*)[21]. Pendekatan ini lebih condong kepada aliran psikologi behavioristik, sebuah pendekatan pada perilaku politik yang mengarah pada keteraturan yang memungkinkan nilai-nilai dan norma agama ditaati bahkan bersifat sakral sehingga perilakunya sesuai dengan norma tersebut, dalam hal ini agama dijadikan pijakan berpolitknya.

Kiai, santri dan pondok pesantren telah lama memegang budaya politik ini, perilaku yang mengajarkan keikhlasan dalam berbuat baik kepada manusia lainnya dan memperoleh sesuatu harus dengan cara yang baik. Politik pada dasarnya merupakan perilaku atau hal yang baik, dengan jalan dan metode yang baik pula. Tetapi dalam politik karena berkaitan dengan sesuatu yang akan dimiliki atau dikuasai banyak kita terjebak dalam cara mendapatkannya sehingga cara tersebut menjadi tujuan. Maka, dalam banyak hal ketika kita berkomunikasi dan berinteraksi sosial kita hidup harus banyak berbat baik, bukan sebaliknya yakni banyak merugikan orang lain.

Apa yang didefinisikan oleh Kiai Luthfi tentang politik sebagai sebuah kendaraan dalam mencapai tujuan-tujuannya, sejatinya telah merujuk kepada sebuah teori sekaligus

[21] Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm 44

paradigma, bahwa perilaku politik memang berstandar nilai bukan bebas nilai. Politik harus diikat oleh norma, nilai dan syariat Islam sehingga perilaku politik tersebut tidak hanya bernilai moral sekaligus bernilai religius. Dan tempat untuk mengajarkan itu semua diajarkan di pondok pesantren, karena dalam segi kajian pesantren telah membuka diri atau inklusif terhadap ilmu-ilmu barat untuk dijadikan sumber pengembangan kajian.

Disadari ataupun tidak, bahwa konsep politk yang dipahami Kiai Luthfi telah mengacu pada pradigma teori-teori yang terdapat di dalam ilmu politik. Atau mungkin saja sebenarnya Kiai Luthfi sudah paham sejak awal, hanya saja beliau menjelaskannya dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum kalau dalam bahasa karya tulis ilmiah diparafrasekan.

Hal itu berdasarkan bahasa Kiai Luthfi dalam menjelaskau suatu teks ke konteks selalu diberi analogi-analogi yang mudah dipahami atau ada di sekitar lingkungan kita. Misalnya saja ketika menjelaskan integrasi ilmu antara politik dan agama menggunakan rel kerata, dimana rel kreta yang kita ketahui bersama sisi-sisinya yang saling merenggang tapi tidak berjauhan untuk menopang kereta dalam menghantarkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pandangan politik beliau, keduanya tidak boleh merasa yang satu menjadi dominan dan yang lain menjadi subordinat. Kalau terjadi seperti itu, suatu negara akan hancur dalam hal ini agama dipegang oleh kiai (*ulama*) dan politik

dipegang oleh penguasa (*umaroh*). Kalau agama menjadi dominasi akan suatu negara, maka yang terjadi negara tersebut otokrasi dan hal itu merugikan masyarakat mungkin saja dosa-dosa rakayat bisa dikomodifikasi. Begitu juga sebaliknya, jika negara mendominasi suatu agama maka yang terjadi otoriter, agama hanya menjadi alat untuk mendulang suara dalam proses demokrasi. Maka menurut beliau, politik yang baik itu demokrasi yang moderat, tidak berat sebelah.

Dalam kaca mata Kiai Luthfi, definisi politik hanya sebuah kendaraan yang artinya sistem-sistem yang didalamnya diatur untuk menggerakan bagian-bagian lainnya atau dijalankan, untuk menggapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses politik untuk dapat merubah keadaan suatu tatanan masyarakat merupakan tujuannya, sedangkan yang dalam pandangan praktisi politik atau yang sering kita kenal politisi yang dilihat bukan aspek merubah tatanan masyarakat menjadi lebih baik tetapi mereka hanya fokus pada sistem-sistem motorik untuk menggerakan institusi politiknya. Singkatnya hanya baru sampai pada teknis menjalankannya.

Secara otomatis, ketika kendaraan itu sudah berjalan atau baru berjalan pertanyaannya apakah bisa mengendarainya atau jangan-jangan dikendarai oleh kendaraannya? Sudah sejauh mana pengalaman berkendaranya? apakah paham rambu-rambu lalu lintasnya? Apakah paham sistem komunikasi antar pengendara? Dan prasangka-prasangka lainnya, atau barangkali ini bukan prasangka hanya mengajukan pertanyaan untuk menguji sejauh mana langkah logika politiknya. Kalau tidak ada,

menurut Kiai Luthfi masih mending mundur saja, tidak perlu ikut politik karena tidak punya ilmunya. Jika dipaksakan kepada yang bukan ahlinya, maka rusaklah perkara tersebut. Dalam masalah fikih beliau tegas.

Definisi itu penting dalam mengajukan sebuah logika, karena lewat definisi kita mampu menguraikan makna dan batasan makna tersebut. Jika tidak sesuai dengan batasan tersebut maka sesuatu itu bukanlah apa yang kita maksud. Untuk menjelaskan sebuah cabai, maka kita sebutkan ciri dan bentuknya serta rasanya barangkali, sehingga jika menemukan bentuk dan ciri yang sama tapi tidak pedas maka itu bukanlah cabai. Gugurnya sebuah definisi karena dari apa yang menjadi syarat sebagai batasan sesuatu, itu tidak tercapai.

Begitu juga politik. Jika politik dibangun berdasarkan dasar logikanya kedaulatan di tangan rakyat, kemudian secara pragmatis rakyat tidak merasakan kenyamanan dalam bernegara maka bisa jadi gugur definisi politiknya atau barangkali makna politik telah bergeser sehingga memunculkan definisi lain tentang politik. Tetapi yang perlu digarisbawahi politik itu bukan lagi tentang humanis tapi kekuasaan yang anarki.

Walaupun dalam ruang definisi membuat sesuatu itu menjadi lebih sempit, namun hal itu tidak menjadikan definisi sesuatu berkurang makna dan simbolnya. Secara simbolik sesuatu itu tetap ada, tetap dengan definisi yang baru atau berbeda dari sebelumnya membuat sesuatu itu menjadi lebih kaya atau lebih berkembang atau justeru definisi yang baru membuat lebih hilang makna yang sebenarnya dan digantikan

dengan bahasa yang tidak sama sekali muncul di dalam kajian sebelumya.

Artinya, politik tidak selalu berbicara tentang perebutan kekuasaan namun terdapat aspek lain yang secara elementer terdistorsi akan definisi politik yang hanya terkotak-kotakan akan kekuasan. Padahal di dalam politik ada yang namanya perubahan sosial, menumbuhkan nilai-nilai dan norma di dalam masyarakat, menggerakan perekonomian dan konsep kajian ilmu politik itu sendiri dan bidang lainnya.

Pandangan Kiai Luthfi tentang politik membawa kita begitu rumit sebenarnya dalam berpolitik, tentunya politik yang baik. Kebaikan politik harus dirasakan kembali oleh para pegiat politik, baik yang praktis atau pragmatis maupun akademis dalam mengkaji politik secara ideologis.

B. Komunikasi Politik

Komunikasi politik sama halnya atau berkonotasi dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan dan wewenang dalam suatu kepemerintahan disampaikan kepada masyarakat. Menurut seorang pakar politik kebangsaan Amerika ialah Dan D.Nimmo (1993:8) ia mengemukakan, bahwa komunikasi politik adalah setiap jenis penyampaian pesan politik dari suatu sumber kepada sejumlah penerima, baik dalam bentuk kata-kata, tertulis ataupun dalam bentuk lambang-lambang.[22]

[22] Susanto, Eko Harry. 2013. Komunikasi Politik Pesan Kepemimpinan dan Khalayak. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media hlm 115

Pengintegrasian antara pesan dengan sistem politik, menjadikan hubungan yang bersifat setara atau saling membutuhkan satu-sama lain. Maka aspek yang dibahas dalam komunikasi politik ialah serangkaian pesan yang disampaikan dari komunikator poltiik kepada komunikan politik (masyarakat) sehingga berdampak pada aktivitas politik di dalamnya. Masyarakat yang anti politik berubah menjadi simpati terhadap politik itulah tujuan dari kajian komunikasi politik secara hakikat.

Adanya pemahaman akan komunikasi politik, menjadikan masyarakat sadar bahwa politik tidak serta merta terkait kekuasaan bisa juga didekati dalam pandangan atau perspektif ranah komunikasi, sehingga mampu memprediksi ke depan politik negaranya akan dibawa ke arah mana dan kebijakan dibuat untuk apa serta mengetahui apa yang ada dalam pikiran sang komunikator politik lewat pesan-pesan politiknya. Berbagai definisi komunikasi politik yang beragam, membuat kajian ini semakin banyak diminati, terkait perbedaan pandnagan karena tiap ahli mendefinisikan lewat disiplin ilmu yang meraka miliki.

Seperti menurut Kantaprawira lebih memahami komunikasi politik sebagai jembatan penghubung, bagi kepentingan berbagai elemen masyarakat secara umum dengan pemerintah terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan politik.[23]

[23] Muchtar, Khoiruddin. Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 2, Mei - Agustus 2016 hlm136-147.

Sedangkan menurut De Vreese (2006) penelitian komunikasi politik bertujuan untuk mengkaji interaksi dan perubahan dalam hubungan antara politik, media, warga negara dan suatu pemahaman, khususnya tentang peran komunikasi dan informasi. Intinya, penelitian komunikasi politik pada dasarnya adalah tentang kualitas dan kelangsungan hidup demokrasi.[24]

Mungkin De Vreese mendefinisikan komunikasi politik berdasarkan perpektif sosiologi, yakni adanya sebuah interaksi antara politik, media dan masyarakat. Cakupannya adanya interaksi di dalam komunikasi politik. Namun sebenarnya terkait komunikasi, tidak hanya tentang interaksi dalam pendekatan komunikasi adanya makna. Makna tidak perlu sama atau saling tukar makna untuk memahami sebuah institusi, tetapi makna bisa dipahami dan diterima oleh setiap indivdu yang ingin memahami pesan-pesan politik, hal tersebut merupakan kebebasan demokrasi.

Komunikasi politik dimaknai sebagai bagaimana memahami simbol-simbol politik. Dalam hal ini penulis sepakat definisi komunikasi politk berdasrkan definisi Soemarno (2002:15) bahwa ia mencoba merumuskan pengertian komunikasi politik, sebagai suatu proses dan kegiatan-kegiatan membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik dengan menggunakan seperangkat sombol-simbol yang berarti.[25]

---

[24] Sulaiman, Adhi Iman. KOMUNIKASI POLITIK DALAM DEMOKRATISASI. BALAI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, Observasi: Vol. 11, Nomor 2, Tahun 2013.
[25] Khoiruddin Muchtar, ibid., 136-147

Pandangan seperti itu juga disampaikan oleh Kiai Luthfi dalam mengamati fenomena politik hari ini bahwa dalam konteks komunikasi politik, kita mampu membaca pesan-pesan politik yang tersirat dan tersurat yang disampaikan oleh para politisi. Menurutnya, komunikasi politik sekarang itu bisa dikatakan sebagai cara-cara verbal atau noverbal yang tidak hanya dengan kata-kata[26]. Seperti seorang politisi memakai batik *megamendung* khas Cirebon, maka politisi tersebut sebenarnya sedang menyampaikan pesan nonverbal lewat media batik yakni sebuah simbol untuk menunjukan bahwa ia bagian dari warga Cirebon dan warga Cirebon harus mendukungnya. Kajian pesan atau dalam konteks pesan politik merupakan bagian fenomena komunikasi politik di dalamnya.

Berdasarkan pemahaman Kiai Luthfi tentang komunikasi politik, gagasan terbesar dari pernyataan beliau ialah, bahasa politik itu tidak hanya verbal juga adanya bahasa yang tidak hanya lewat kata-kata dari seorang poilitisi, penguasa dan pejabat pemerintah. Itulah makna komunikasi sebenarnya. Kemudian dihubungkan dengan politik, maka definisinya berubah berbunyi "apa pun yang keluar dari ucapan, perbuatan, pemikiran, media, gerak semu (pencitraan) dan teks dari seorang pemangku kebijakan atau pun politisi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dan berimplikasi terhadap perubahan masyarakat, efek tersebut bisa berupa gaduh (kontra) atau kedamaian dari simbol-simbol yang disampaikan oleh aktor politik maka itulah yang disebut komunikasi politik".

[26] Op.cit. wawancara dengan Kang Luthfi

Definisi tersebut hanya beru penalaran, belum pada konteksnya. Sehingga para ahli secara sederhana mendefinisikan komunikasi politik (*political communication*) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah.[27]

Gerak berpikir Kiai Luthfi dalam memahami politik melalui pendekatan komunikasi politik, daya nalarnya yag kuat mampu mengingat setiap fenomena yang ditangkap lewat inderawinya. Berkawan denga para politisi merupakan hal biasa yang dilakoninya, sehingga tidak heran akan *siloka* atau bahasa-bahasa dalam wilayah politik.

Walau pun beliau aktif diberbagai kegiatan seminar, organisasi strukrural, maupun diskusi-diskusi publik lintas agama namun dalam tekadnya tidak ada keinginan untuk ikut dalam kontekstasi politik praktis. Beliau teguh dalam menjaga warisan bangsa, ialah santri anak-anak yang kelak bakal menjadi penerus bangsa, menumbuhkan sikap nasionalisme berdasarkan nilai-nilai agama. Bagi beliau berjuang untuk negara, membela negara tidak perlu menjadi politisi yang duduk di dalam pemerintahan tetapi banyak hal dalam konteks membela negara salah satunya mendidik dan mengajarkan anak-anak menjadi cerdas dan berwaswasan luas sesuai cita-cita negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

[27] Thaib, Erwin Jusuf. KOMUNIKASI POLITIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF ILMU KOMUNIKASI, ILMU POLITIK DAN KOMUNIKASI ISLAM. FARABI Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah Vol. 16 No. 1, Juni 2019.

Kiai Luthfi dianugrahi kecerdasan akal dan spiritual yang seimbang, sehingga penggunaan batas nalar dan metafisik benar-benar telah mampu beliau pahami hal itu berdasrkan pengalaman-pengalaman beliau dalam beragama. Komunikasi politik merupakan kajian logis yang bisa dianalisis dengan nalar kritis, secara objektif akan menilai bahwa aktor politik yang sedang mempolitisasi budaya hal itu terdeteksi dalam makna-makna yang bisa ditangkap lewat akal dan literasi yang memumpuni.

Kajian-kajian kitab fikih *siyasah* yang dipelajarinya dalam ruang pondok peantren membuatnya tidak terdistorsi akan arus perubahan politik hari ini, tetap teguh dalam pendirinnya. Bahkan menolak tawaran menjadi kader partai. Bagi beliau politik sudah hidup dalam keseharian dan tidak perlu ikuta terlibat dalam politik nasional yang hanya merebutkan kekuasaan.

Pandangan-pandangan politiknya senantiasa beliau curahkan untuk kemajuan anak-anak santri dan siswanya, misalnya menjadi pengusaha dan *enterpreneur* juga menggunakan politik, belajar juga menggunakan politik dan aktivitas lainnya. Bagi beliau hidup di zaman atau era digital ini harus kreatif, inovatif dan kolaboratif untuk melihat dan menangkap peluang dari berbagai arus lewat pesan-pesan informasi yang terdapat internet. Termasuk mempelajari komunikasi politik sebagai pendekatan terhadap para pemangku jabatan, ketika santri kelak menjadi politikus karena sudah diajarkan komunikasi politik di pesantren santri terbiasa

retorika, teknik berdebat dengan lawan, membuat keputusan, cerdas dalam memanaj konflik dan berkarakter Islami tentunya santri akan lebih baik rekam jejaknya saat menjadi aktor politik.

Komunikasi politik bisa dijadikan pengetahuan yang diterapkan berbagai aktifitas lainnya, dengan pemahaman yang baik terhadap komunikasi politik memudahkan hubungan dan kerjasama dengan berbagai banyak pihak, dapat dengan mudah ditempuhnya.

Jika dilihat dari perspektif keahlian maka komunikasi bisa diadaptasi ke dalam bidang profesi, ketika menjadi seorang guru misalnya ia tidak hanya sebagai pendidik juga harus pandai melihat peluang yang diprogramkan oleh pemerintah dan ikut kerjasama dengan berbagai pihak. Seperti yang Kiai Luthfi realisasikan, komunikasi politik beliau terapkan ke dalam hubungan kerjasama dengan berbagai urusan pengajuan program SMK mekanika misalnya.

Pesan-pesan politik pemerintah harus dimanfaatkan dengan baik, ditangkap dengan cepat dan dimaknai deangan efektif sehingga kebijakan politik melalui aktor politiknya dapat dimanfaatkan dan mampu merubah kondisi masyarakat menjadi lebih progresif dan masif sehingga pesantren bergerak lebih maju dengan memanfaatkan peluang yang telah difasilitasi pemerintah.

Komunikasi politik juga tidak bebas nilai, menerima pesan-pesan politik atau membuat pesan-pesan politik harus berlandaskan nila-nilai Islami. Berpolitik mesti terikat oleh norma-norma, etika dan religiusitas suatu histori tentang tokoh

tersebut. Melancarkan kampanye politik misalnya menggunakan propaganda. Memang propaganda tidak selalu buruk, pada dasarnya netral tetpai teknik-teknik propaganda lebih sering dipakai negatif jadi terbawa negatif. Jika propaganda atidak memungkinkan, boleh juga menggunakan komunikasi persuasif untuk meyakinkan masyarakat.

Pemahaman komunikasi politik Kiai Luthfi tanpa tidak disadari telah mengarah kajian yang lebih serius, yakni simbol. Simbol-simbol menjadi kajian komunikasi dan ditafsirkan berbeda-beda oleh orang yang menerima pesan tersebut. Secara naluriah, orang akan langsung mengidentifikasikan bahwa apa yang dia lihat merupakan pemahaman yang dia pahamai dari kesan awal.

Komunikasi politik tidak mesti harus dipahami dalam koteks politik saja, namun yang paling penting bagaimana mengemas pesan tersebut sehingga dapat dimaknai mayarakat dan sepertinya masyarakat sudah pandai dalam menerjemahkan pesan-pesan politik hal itu karena budaya komunikasi kita yang cukup dibilang tinggi. *High Context Communication* atau komunikasi konteks tinggi adalah pola komunikasi yang pesannya lebih disampaikan secara tidak langsung atau implisit, serta memiliki sematan pesan yang ingin disampaikan dari aspek non-verbal, serta lebih terkesan tidak menyerang lawan bicara.[28]

Komunikasi konteks tinggi biasanya dcirikan, penggunaan bahasa yang satire tanpa berkata *to the point*, lebih

[28] https://www.praxis.co.id/stories/read/354/High-Context-dan-Low-Context-Communication-di-Indonesia-kamu-Termasuk-yang-Mana- dikinjungi pada tanggal 13/12/2023 pukul 00.22

banyak menggunakan majasi. Kaitannya dengan budaya kita, Indonesia. Budaya kita cenderung komunikasi konteks tinggi, tanpa ada kata-kata secara verbal pun, kita langsung paham maksud dari komunikasi dan intraksi tersebut diajak kemana.

Dalam konteks komunikasi politik, aktor politik menyebut warna hijau saja suduah paham partai mana yang dimaksud. Atau saat kita menonton tayangan televisi terdapat program aktor politik yang mengkonstruksi pesan-pesan media dengan memunculkan sponsor merek produk misalnya. Masyarakat sudah paham bahwa media tersebut telah berafiliasi dengan tokoh nasional.

Kiai Luthfi memanfaatkan budaya komunikasi politik sebagai sebuah kendaraan, tidak sebagai pengendara politik. Konsekuensinya akan berat dan begitu juga tanggung jawabnya ketika mendapat mandat sebagai perintah partai. Maka fokusnya akan terbelah, pondok pesantren atau menjadi Guru dengan mnejadi politisi.

Hal paling sederhana dari komunikasi politik ialah bagaimana menangkap dan memahami pesan-pean para aktor politik (politisi) untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi kebijakan dan bisa menjadi data dalam mencari lobi-lobi dan kerjasama politik secara instansi mau pun non-profit.

Lobi-lobi tersebut pada ahirnya bermanfaat pada perubahan dalam institusi dakwah, yakni pesantren. Pesantren harus maju dan berkembang sebagai sebuah institusi yang independen, mengajarkan dan mengembangkan studi-studi Islami maupun kajian-kajian kontemporer yang bersumber dari

sains dan teknologi. Melalui komunikasi politik dengan baik, maka pesantren dapat beradaptasi akan perubahan sosial dan kemajuan zaman.

C. Bentuk-Bentuk Pesan Komunikasi Politik

Dalam kajian komunikasi politik dikenal dua macam pesan komunikasi. Pertama, pesan verbal ialah pesan yang berupa bahasa, kata-kata yang menunjukkan suatu makna, atau lambang dan simbol yang transmisikan lewat media ataupun bertatap muka langsung. Bentuk-bentuk komunikasi politik menurut Dan D. Nimmo[29] dibagi menjadi dua kelompok:

1) Pembicaraan Politik
   a. Lambang, merupakan sesuatu yang digunakan untuk merujuk kepada tanda yang memiliki makna.
   b. Bahasa, didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami suatu komunitas.30
   c. Opini Publik merupakan suatu pendapat yang berkembang di tengah masyarakat dan memiliki efek kuat jika digerakkan dalam jumlah masssa atau banyak. Singkatnya opini publik ialah pendapat umum masyarakat tentang suatu fenemna sosial yang terjadi.
2) Persuasi Politik
   a. Propaganda, merupakan sebuah alat, dan karenanya harus dinilai dengan melihat tujuannya. Propaganda

[29] Akhmad, Bachruddin Ali. 2019. Komunikasi Politik. Sleman: ASWAJA PRESSINDO. Hlm 12
[30] Umaimah Wahid, Ibid., 37

dalam Perang ini merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, dan tujuan itu adalah perjuangan demi eksistensi rakyat Jerman; karenanya, propaganda hanya dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku untuk perjuangan.[31]

b. Periklanan merupakan proses atau usaha untuk mempengaruhi target pasar agar melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk atau menggunakan layanan, meningkatkan kesadaran akan suatu hal, dan sebagainya.32

c. Retorika merupakan upaya-upaya pemilihan bentuk pengungkapan yang efektif dengan cara lain yang mampu memukau.33

Bentuk-bentuk pesan komunikasi politik seperti yang telah dijelaskan di atas, menjadikan penting bahwa suatu pesan tidaklah berdiri sendiri melainkan ada sebab-sebab pandangan yang dibangun berdasarkan paradigma dan juga landasan secara historis. Maka pesan komunikasi bukan hanya apa yang dikatakan secara verbal, melainkan juga apa yang tersaji dalam beragam bentuk kemasan nonverbal. Mulyana (2010: 110) menjelaskan bahwa dimensi isi merujuk pada pesan komunikasi.

---

[31] Ahmad, Jafar. *Ilmu Politik Praktis Dari Teori ke Implementasi*. Jambi: Akademia Virtual Media. Hlm 131

[32] https://bnp.jambiprov.go.id/periklanan-pengertian-fungsi-jenis-dan-tujuan/ dikunjungi pada tanggal 13/12/2023 pukul 19.51

[33] Dhanik Sulistyarini, dkk. 2020. Buku Ajar Retorika. Banten: AA.Rizky. hlm 5

Pesan komunikasi berkaitan juga dengan bagaimana proses atau cara menyampaikan pesan.[34]

Secaara teoritis, pesan memiliki dua jenis terdapat pesan verbal dan nonverbal. Pesan-pesan ini memiliki perbedaan satu sama lain, dimana pesan yang memiliki penekanan secara lisan menandakan bahwa pesan itu disebut verbal karena bahasanya jelas dapat didengar kata-katanya. Berbeda dengan tipe yang kedua, jenis pesan yang tidak menggunakan sitem bahasa yang berintonasi suara, tetapi lebih sering disebut bahasa tubuh, gestur, gerak tangan dan pengkodean atau penyimbolan.

Menurut Dale G. Leathers (1976) menjelaskan bahwa pesan nonverbal sangat segnifikan untuk mempengaruhi komunikan karena beberapa hal sebagai berikut :

a. Faktor-faktor nonverbal memiliki pengaruh yang sangat menentukan makna dalam komunikasi interpersonal. Ketika berkomunikasi tatap muka, biasanya banyak menyampaikan gagasan dan pemikiran melalui pesan-pesan nonverbal.
b. Melalui pesan non verbal perasaan dan emosi lebih mengena daripada menggunakan pesan verbal.
c. Pesan nonverbal lebih dapat menyampaikan makna yang relatif bebas dari penipuan, distorsi, dan keracunan. Pesan nonverbal jarang dapat diatur oleh komunikator secara sadar.

[34] Wahid, umaimah. 2016. *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Hlm 27

d. Pesan nonverbal mempunyai fungsi metakomunikatif yang sangat baik dan diperlukan untuk mencapai komunikasi yang efektif. Fungsi metakomunikatif yang dimaksud ialah dapat memberikan informasi tambahan yang mendukung serta memperjelas maksud atau makna dari sebuah pesan (Zaenal, 2016).[35]

Pesan nonverbal kategorinya sangat luas, meliputi semua aspek nonverbal dalam perilaku kita: ekspresi wajah, sikap tubuh, nada suara, gerakan tangan, cara berpakaian, dan sebagainya. Secara singkat, pesan-pesan itu meliputi semua pesan yang disampaikan tanpa kata-kata atau selain dari katakata yang kita gunakan (Tubbs & Moss, 1994, dalam Sobur, 2014: 646).[36]

Sedangkan pesan verbal memiliki memiliki aspek kata-kata yang dapat diucapkan dalam lisan maupun tulisan. Verbal dapat dimengerti jika kita mampu memahami bahasa yang digunakan dalam interaksi, komunikasi akan mencapai kesamaan makna jika kita saling mengkomunikasikan dengan bahasa yang jelas dan juga utuh baik lisan maupun tulisan.

Beberapa ahli menguraikan fungsi pesan verbal, hal itu karena untuk dapat dijadikan identifikasi terhadap pesan-pesan verbal dari membedakan pesan nonverbal lainnya. Menurut Larry L. Barker (dalam Deddy Mulyana, 2005), bahasa mempunyai tiga fungsi, yakni:

[35] Turhamun. Desain Pesan Komunikasi Politik Perspektif Islam di Era 4.0. *Jurnal Penelitian Agama* 23(2), Juli-Desember 2022, 281-295.
[36] Umaimah Wahid, Ibid., 38

1) Penamaan *(Naming* atau *Labeling).* Penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasikan objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya sehingga dapat merujuk pada komunikasi. Misalnya komunikator politik adalah orang yang bertindak sebagai sumber-sumber pesan politik politikus, professional, dan aktivis.
2) Fungsi Interaksi, dalam proses komunikasi selalu berlangsung interaksi antara berbagai pihak yang terlibat. Fungsi interaksi menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati serta pengertian atau lemarahan atau kebingungan. Contohnya: Gubernur DKI Anies Baswedan bersepeda, sarapan bareng pekerja, ngopi bareng warga, berdiskusi, berinteraksi langsung dengan masyarakat Jakarta mendatangkan banyak simpati karena merasa dekat dengan masyarakat.
3) Fungsi Transmisi Informasi, dalam proses komunikasi berlangsungnya pengiriman pesan dan pertukaran informasi menjadi isi komunikasi. Keistimewaan bahasa sebagai fungsi transmisi informasi yang lintas-waktu, dengan menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan, memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita. Misalnya, melalui tulisan dalam artefak peninggalan kita mengenal sejarah masa lalu misalnya sejarah kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dsb.[37]

[37] https://himso.id/pesan-komunikasi-politik-political-message/ dikunjungi pada tangga; 14/12/2023 pukul 01.23

Dalam pengertian yang lebih spesifik bahwa pesan verbal ialah simbol atau pesan verbal yang di dalamnya memuat semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa dapat dianggap sebagai sistem kode verbal.[38]

Sebagai sebuah simbol ia tidak berdiri sendiri, akan tetapi memiliki makna sehingga dalam pandangan Kiai Luthfi pesan politik menurut pemahamannya bahwa untk melihat konteks komunikasi politik pada komunikator atau aktor politik pesannya terbagi dalam beberapa hal, dianataranya: pakaian merupakan simbol dari komunikasi politik nonverbal yang paling nyata, ucapan dan tradisional contohnya memberi uang.

Pertama, pandangan Kiai Luthfi terhadap fenomena politik dalam konstruk sosial, diamana ketika pada momen-momen yang sekarang terdapat salah seorang pejabat kemudian memakai pakaian berwana kuning (misalnya), ditengah-tengah publik maka hal itu bisa dikatakan sebagai cara politik juga.

Pakaian merupakan bentuk paling nyata yang dapat menyebarkan pesan-pesan politik, pakaian menjadi pesan nonverbal yang dapat berbicara fakta bahwa motif seseorang berpakaian memiliki tujuan dan untuk mempengaruhi masyarakat umum tentang tokoh yang terdapat dalam ideologinya.

Pesan nonverbal yang melekat dalam pakaian akan serta merta mengandung unsur mempengaruhi masyarakat, lewat

[38] Mulyana, Deddy. 2010. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm 69

simbol komunikator berusaha membujuk, mempengaruhi dan memberikan keyakinan bahwa dirinya bagian dari salah satu parpol (partai politik) yang ia usung dan mampu mensejahterakan rakyat. Sekalipun aktor politik itu mengelak akan tuduhannya, tetapi simbol yang digunakan mengatakan dengan sednirinya bahwa ia salah satu bagian dari prapol yang didukungnya.

Bahasa paling jujur ialah tanpa ucapan, tanpa kata tapi menggema di ruang ide. Simbol paling nyata dalam menunjukkan kecondongan seseorang terhadap sesuatu ialah gagasan dan pikirannya yang tertulis pada simbol yang dikenakan. Pakaian. Berulang kali salah satu tokoh terkenal di Indonesia katakan saja Ahmad Dhani menjadi buah bibir masyarakat dan ahli semitika atas pakaian yang dikenakannya, sehingga banyak yang menduga bahwa ia seorang zionis dan sebagainya karena atribut pakaian yang ia gunakan.

Permasalahnnya bahwa betulkah orang yang tanpa sadar menggunakan simbol kelompok tertentu dengan sengaja atau tidak? Lalu motifnya apa jika tidak sengaja. Pertanyaan itu munngkin perlu diajukan mengingat ternyata beberapa orang tidak mengerti sejarah dari simbol yang digunakan. Tetapi motif paling utama dan nyata ialah adanya unsur kesengajaan sebagai pesan propaganda, ingin viral dan terkenal, ingin menunjukkan dirinya sang idolaatau identitas diri dan sebagainya.

Pakaian yang bernilai ekonomis di dalam proses demokrasi ialah pakaian yang berniali politik. Dalam pandangan Kiai Luthfi politisasi pakaian bisa menjadi pendobrak suara

pemilihan nanti, karena lewat pakaian kampanye berjalan tanpa perlu orasi panjang lebar untuk menunjukkan dirnya bagian dari partai yang dia usungnya.

Kedua, beliau mengidentifikasikan komunikator baik dan tidaknya dari retorika. Retorika dalam hal ini ucapan yang disampaikan dan pemilihan diksi dalam hal menyampaikan kebenaran atau tipu muslihat. Ucapan, seperti menggunakan kata-kata saat orasi kampanye yang begitu jelas arahnya bahwa "kamu harus pilih saya, jika saya terpilih akan ...".

*S*ikap seperti itu mencerminkan adanya diktator yang ambisius yang harus menang dengan segala cara, padahal dirinya ingin dipilih oleh hati nurani rakyat. Akan tetapi ucapannya yang kurang bersahabat mencerminkan spribadi yang ambisius dan rela mengorbankan temannya untuk segala pencapaian apa yang diinginkannya.

Jika selama ini retorika telah distigma akan pandai dalam merangkai kata banyak yang terbuai tapi tidak ada isinya, seakan tidak ada harganya suatu ucapan atau retorika. Padahal retorika merupakan cara menyampaikan kebenaran dengan cara yang baik dan tidak menyingung suatu kalangan.

Ucapan merupakan bentuk komunikasi politik yang memiliki makna ganda, terkadang apa yang diucapkan sebagai fenomena formalitas saja tanpa ada realisasinya. Ucapan iming-iming dijanjikan sesuatu dalam praktinya hanya mengunggulkan program-program untuk dirinya bukan untuk rakyat. Kita sudah pernah belajar dari politik, bahwa adanya pergeserakn dalam definisi politik. Pergeseran itu dari yang awalnya adanya politik

untuk kedaulatan rakyat kemudian bergeser pada kepentingan kekuasaan.

Kampanye politik dan depat pilpres sesungguhnya kita dipertontonkan adegan dialog lintas budaya bukan politik. Dari semua putra daerah bertemu untuk mendiskusikan wilayahnya masing-masing atau daerah yang pernah dikunjunginya, sementara gagasan politiknya belum ada yang disampaikan. Itikad yang ingin dicapai lewat ucapan para politisi, belum keluar artinya masing-masing masih proses pencarian ide.

Padahal retorika dalam kajian komunikasi politik merupakan metode persuasif politik dalam pandangan Nimmo. Harusnya dimanfaatkan betul untuk menarik sura di kalangan masyarakat umum. Strategi retorika mestinya menjadi peluang dalam mencerdaskan masyarakat akan politik. Kiai Luthfi menyadari betul seandainya para politisi cerdas dalam mencari dukungan, cara-cara komunikasi politik tentunya dipakai bukan sekedar ucapan yang tidak sistematis apa lagi banyak kepalsuan.

Retorika memiliki kelemahan dan kelebihan, tetapi yang terpenting kejujuran yang tersistematis jauh lebih utama ketimbang kebodohan yang dibalut kepolosan dan seakan natural yang oleh masyarakat umum disebut jawaban apa adanya. Apa adanya inilah yang bermasalah, dalam kenyataannya kampanye-kampanye di ruang publik semata berupa gimik. Alasan kuat menggunakan gimik karena tidak adanya gagasan politik yang ingin disampaikan, sehingga memanfaatkan opini publik yang memang bersifat absurd.

Seandanya memiliki gagasan akan perubahan masyarakat tentunya bukan hanya baliho dan spanduk-spanduk pinggir jalan yang dipasang dan dibentang tapi memunculkan logika nalar demokratisnya seperti adanya gagasan rapat metaverse yang selama ini kendala dalam ruang rapat yang tertutup banyak informasi yang ditutupi pemerintah, yang anggotanya tidur saat sidang diskusi sementara rakyat menunggu hasil sidang. Gagasan metaverse digaungkan sebagai transparansi informasi publik. Kampanye mestinya menggerakan pikiran-pikiran rakyat dengan ide-ide para aktor politik, bukan menyebar baliho dan membentangkan spanduk yang lebar di gang yang tikungannya tajam membuat kecelakaan lalulintas. Baliho-baliho dan spanduk itu tidak lebih dari sampah visual.

Ketiga, menurut Kiai Luthfi pesan politik yang paling nyata ialah "membuang-buang" uang atau nama kerennya serangan fajar dan kalau nama ilmianya *money politik*. Dari jenis pesan komunikasi politik yang telah disebutkan di atas, bentuk-bentuk pesan dalam komunikasi politik yang tidak dianurkan oleh penulis karena suatu hal, yakni pecundang tanpa keberanian ialah politik uang.

Simbol yang paling kentara dalam kontestasi politik di kita, Indonesia ialah politik uang. Secara pratktis simbol pakaian dan retorika mencerminkan budya politik yang mapan, mengolah pikiran untuk dapat membeli pikiran rakyat. Tetapi kalau poltik uang bukan membeli pikiran rakyat tapi membeli naluri rakyat secara kejam yang tanpa disadari. Ini lah mengapa

politik uang itu hina, karena berusaha menghegemoni pikiran dan nurani rakyatnya dengan pembodohan.

Dengan gerakan uang, aktor politik tidak perlu lagi memakai pikiran dan perasaan dalam memperoleh simpati rakyat tapi dengan cara memaksa untuk dipilih karena tidak ada pilihan yang ada hanya keambisiusan. Menggunakan baju merah atau kita pakai baju putih di tengah-tengah masyarakat atau menyusun kata-kata denagn baik dan penuh analisis akan kalah oleh karena satu simbol yang bernama uang yakni dengan membuang uang atau *money politic*.

Biasanya para politisi yang *ngebet* ingin menjadi penguasa atau merebut kekuasaan dengan cara instan, tidak ada diksi dalam ucapannya yang demokratis yang ekluar ucapan sang diktator seperti "pilih lah saya, nanti saya akan..." pernyataan tersebut merupakan paksaan, sehingga tidak perlu strategi politik cukup pragmatis dengan memberi uang.

Ibarat dalam suatu duel perkelahian antar petarung bela diri, beberapa ahli beladiri mengeluarkan jurus andalannya dalam bermain di gelanggang. Unutk memperoleh kemenangan mereka berusaha menjatuhkan dengan tendangan, pukulan dan jatuhan mereka sama-sam beradu ilmu beladiri. Tetapi bagi seroang pengecut, cara pragmatis yang dtempuh tidak perlu keluar keringat cukup melepaskan senapan angin ke kepala lawan, "*door...*" selesai. Poilitik uang juga sama, tidak perlu pusing memikirkan materi debat, menysuun kata-kata retoris dan komunikasi politik apa yang dipakai dalam kebudayaan suatu wilayah tertentu tidak ada analisis sama sekali, yang ada

tumpukan uang yang siap diembakkan ke wilayah-wilayah untuk mendukungnya.

Bentuk-bentuk pesan politik yang sesederhana seperti politik uang, dapat merugikan negara juga kemampuan kognitif rakyatnya yang terancam punah. Dengan diajarkannya politk uang, membuat kegiatan mendek tidak adanya proses pendistribusian ide, gagasa, pikiran dan mental bagi pejuang demokrasi. Itulah mengapa politik mesti ditumbuhkembangkan di pesantren, agar santri paham bahayanya politik tanpa logika.

Poltik diperbolehkan tidak ada yang melarang, meski pada beberapa orang tidak menyuaki politik tapi itu masih bisa disebut hal yang wajar selagi tidak merubah dan menyalahi suatu hukum. Politik pada dasarnya baik, yakni merubah suatu keadaan masyarakat terbelakang menjadi lebih maju, lebih baik dan damai sejahtera, maka perlu daya dan upaya untuk merubah suatu keadan tersebut, itulah yang disebut politik.

Bentuk-bentuk pesan komunikasi politik yang disampaikan oleh Kiai Luthfi telah menjadi kajian yang mendalam di beberap studi, salah satunya komunikasi politik. Melalui pandangan-pandangan poilitk beliau terhadap konteks politik hari ini, menjadikan penulis sebagai akademisi lebih tahu ternyata di dalam institusi pesantren telah tumbuh diskusi-diskusi politik yang telah dikebangkan oleh para kiai. Hal menarik ialah bahwa selama ini kajian politk hanya dikaji di ruang akademisi, dari beliua penulsi memahami kajian politik tidak lagi dipandang negatif karena sudah mask dalam ruang pesantren yang basisnya agama.

Tidak ada ketakutan lagi dalam mendisukusikan poltik di ruang pesantren, padahal sejak dahulu pernah terdapat pelarangan ilmu-ilmu barat seperti filsafat dan politik salahsatunya untuk dikaji di pesantren. Melalui Kiai Luthfi penulis memahami akan pesantren sebagai institusi yang independen tidakikut terlibat dalam politik tetapi membeaskan santri-santri maupun siswanya untuk ikut berpartisispasi dalam poiltik.

D. Politik Ideal Menurut Tokoh

Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah "demokrasi" berasal dari bahasa Yunani Kuno, di mana "*demos*" berarti "*rakyat*" dan "*kratos*" berarti "kekuasaan" atau "pemerintahan".[39]

Kiai Luthfi merupakan orang yang cukup bijak dalam melihat suatu fenomena sosial yang terjadi, di mana santri dan siswanya yang kelak menjadi rakyat umum benar-benar ditempa menjadi masyarakat sebenarnya walaupun masih di ruang lingkup pesantren. Beliau mengajarkan kepada santrinya untuk menggapai cita-cita, ngaji yang lama dan mencari berbagai guru untuk menjadi jalan *tholabul ilmi*. Selain itu untuk berwawasan luas tidak menjadi ekslusif.

[39] https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-demokrasi/ dikunjungi pada tanggal 14/12/2023 pukul 16.20

Beliau orang yang moderat, memandang sesuatu tidak hanya melihat dari sisi buruknya tapi melihat secara uinversal, artinya baiknya pun tidak boleh dilupakan walaupun kejahatannya lebih banyak. Beliau pandangan-pandangannya yang luwes dan sekaligus energik dalam menghadapi isu-isu *blunder* politik di masyarakat. Ketika isu kedatangan calon presiden, berita pesantren ikut meilih calon dan pasangan calon merbak luas, kemudian Kiai Luthfi langsung memfilter dengan argumen "pesantren itu institusi yang independen, tidak boleh dimasuki politik. Kalau santrinya iya boleh silahkan tapi tidak membawa nama pesantren mana pun, identitas pribadi saja".[40]

Beliau menyukai sistem kepemerintahan demokrasi, walaupun demokrasi telah jauh dari pemahaman awal. Demokrasi pada awal pemahaman di maknai sistem ini bersifat mengutamakan rakyat, kekuasaan di tangan rakyat dan rakyat wajib dilibatkan dalam keputusan-keputusan negara serta rakyatlah yang menentukan kebijakan dan kekuasaan negara. Mungkin itu definisi dahulu yang sudah kuno, definisi sekarang rakyat hanya bidak catur yang diatur penguasa, yang berkuasa bukan rakyat tapi pemerintah. Yang pada hakikatnya peran pemerintah adalah aparatur negara, pegawai.

Namun segala hambatan sistem demokrasi yang terjadi sekarang secara disiplin komunikasi politik dapat diselesaikan, hambatan-hambatan seperti dominasi pemerintah terhadap rakyat selama mampu dikomunikasikan hambatan itu redam karena memiliki misi yang harus dicapai bersama yakni

[40] Op.cit. wawancara dengan Kang Luthfi

persamaan hak. Hal itu sesuai definisi demokrasi yang juga diartikan sebagai pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Dan juga pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan, seperti politik uang, korupsi, dan ketidakadilan. Oleh karenanya, pendidikan demokrasi dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia[41]

Menurut Kiai Luthfi politik ideal di Indonesia ialah demokrasi, yakni rakyat yang menentukan. Hal itu seperti yang dipaparkan beliau bahwasannya sistem demokrasi sudah dicontohkan pada saat zaman para sahabat pada saat pemilihan khalifah Ali bin Abi Thalib Ra. Akan tetapi dari empat sahabat tersebut dalam memimpin umat pemilihannya berbeda-beda.

Misalnya sahabat Abu Bakar Ra dipilih oleh Sahabat Umar bin Khattab Ra, kemudian Sahabat Umar bin Khattab Ra dipilih oleh wasiat Abu Bakar Ra. Setelah itu sahabat Usman bin Affan Ra dipilih melalui enam dewan yang ditentukan oleh Umar bin Khattab Ra. Pada saat itu Umar bin Khattab Ra berwasiat bahwa penggantinya nanti akan dibentuk satu tim yang kemudian terpilihlah Utsman bin Affan. Sedangkan sahabat Ali RA dipilih secara demokratis oleh rakyat. Empat pemilihan khalifah yang pernah terjadi dalam Islam juga tidak lepas dari politik yang ada di *fikih syiasah* yang juga diterapkan di dunia sekarang ini.[42]

---

41 https://fisip.umsu.ac.id/2023/07/26/demokrasi-di-indonesia-pengertian-dan-sejarahnya/ dikunjungi pada tanggal 15/12/2023 pukul 06.38

42 Op.cit. wawancara dengan Kang Luthfi

Demokrasi telah ada sejak zaman Yunani Kuno, kemudian diadopsi oleh para sahabat dalam proses suksesi kepemimpinan setelah wafatnya Rasulullah Saw,. Sistem demokrasi merupakan sistem atau produk islamisasi di mana rakyat lah yang memilih, rakyatlah yang memegang kendali kebijakan dan pemimpin dipilih oleh rakyat seperti halnya Sayyidina Ali Ra yang dipilih menjadi khalifah pasca Sayyidina Utsman Ra.

BAB 3
PONDOK PESANTREN DAN RUANG POLITIK

A. Kunjungan Politisi ke Pesantren

Ruang politik tidak hanya di dalam sistem kenegaraan, akan tetapi sudah bergerak pada ranah yang lebih sakral seperti keraton misalnya atau dalam hal ini pesantren. Sehingga pesantren harus memiliki sikap netral, sebagai institusi tidak boleh memihak. Menurut Kang Luthfi dalam rentang waktu masa-masa kampanye belum dimulai, Buntet Pesantren sudah dikunjungi oleh semua calon preseiden.

Menurut BJ. Bolland di dalam *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* mengatakan bahwa ketertarikan umat Islam kepada partai politik karena adanya tipologi umat Islam. Tiga tipologi menurut Bolland: 1) Tipologi ideologis, ialah umat Islam memosisikan berpolitik sama dengan beragama Islam. 2) Tipologi kharismatik, ialah umat Islam memilih sebuah partai politik mengikuti sikap dan perilaku seseorang yang dikagumi di sekitarnya. Apa yang dikatakan dan dilakukan figur selalu menjadi rujukan masyarakat. 3) Tipologi rasional, ialah sikap umat Islam dalam memilih partai politik benar-benar didasarkan pada pandangan rasional.[43]

Berdasarkan analisisnya Bolland, secara ideoologis katanya umat Islam itu memilih calon pemimpinnya berdasarkan ideologi yang sama, harus beragama Islam, dan partainya partai

[43] Saidin Ernas & Ferry Muhammadsyah Siregar. (2010). Dampak Keterlibatan Pesantren Dalam Politik: Studi Kasus Pesantren di Yogyakarta, *jurnal Kontekstualita*, 25(2), hlm 195-224.

Islam. Memungkinkan aktor politik bergerak dalam persepsi tersebut dalam menudlang suara di pemilihan nanti, aspek ideologi inilah yang kemudian memunculkan gagasan politik kesukuan atau politik identitas.

Tipologi yang kedua, kharismatik. Bahwa umat Islam dalam memilih pempimpin berdasrakan *opini leader* yang berkembang. Para santri dan masyarakat hanya manut terhadap sosok kiai yang dikharismatikkan, apa pun kata kiai santri dan masyarakat ikut dan tidak takut salah dalam memilihnya, karena kiai masih dianggap selalau berpijak pada kebenaran.

Analisis yang ketiga, merupakan ciri pemilih yang modern pada tahap ini masyarakat yakni santri dan masyarakat umum memiliki *Critical Thinking* atau berpikir kritis terhadap fenoemena politik hari ini, melihat dalam kacamata rasional. Tahap ini yang memungkinkan demokrasi Indonesia semakin menjadi lebih dewasa.

Buntet Pesantren termasuk dalam tahap ketiga, yakni rasionalitas dalam memilih. Walau banyak kunjungan dari berbagai calon pemimpin, capres dan cawapres. Namun konsistensi Buntet Pesantren dalam memilih tetap dengan rasional, karena pesantren adalah institusi yang netral tapi tendensius pada kebenaran dengankata lain tidak ikut-ikutan politik.

Pesantren merupakan kata benda yang tidak memiliki ideologi, tetapi para kiai, santri dan masyarakat umum lainnya bebas memilih sesuai hati nurani dan sikap kritisnya akan berbagai calon yang berkunjung ke Buntet Pesantren. Buntet

Pesantren wajib menerima tamu yang hadir atau dalam hal ini safari politik, sekedar meminta doa, maka didoakan untuk eksekusi nanti pemilihan beda cerita.

Perlu disamapaikan bahwa dahulu Gus Dur saat menjelang ingin menjabat presiden, *sowan* atau datang berkunjung ke Buntet Pesantren hanya untuk meminta pendapat dari gurunya akan permasalahan sosial yang terjadi, menceritakan kondisi negaranya saat itu, yang konon Gus Dur sebelumnya tidak ingin naik menjadi presiden, namun atas usulan kiainya, Gus Dur berani mengambil langkah tersebut. Maka dalam hal ini Gus Dur bukan mencari dukungan, tapi layaknya santri yang mengadu kepada kiainya, untuk meminta pendapat kiainya.

Tradisi tersebut lama-kelamaan berkembang, berbagai calon DPR, DPR-RI, Gubernur dan lain sebagainya ikut berbondong-bondong mengikuti cara Gus Dur, padahal beda niat beda pula hasilnya. Kemudian, zaman berganti para Kiai Buntet sudah menyadari akan pergeseran makna *sowan*, bukan berkunjung mencari solusi dari permasalahan umat atau atau kondisi sosial yang banyak bermunculan kelompk spratis tapi untuk mendapatkan hati rakyat, seakan-akan ingin tampil sholeh karena dekat kiai.

Musim-musim sekarang saja, misalnya Buntet Pesantren sudah kedatangan Anis Baswedan yang disambut oleh Kiyai H Adib. Kemudian Ganjar Pranowo menjadi pemateri saat haul sesepuh Buntet. Mahfud MD bahkan menjadi tokoh sambutan dalam haul sesepuh Buntet. Sedangkan Muhaimin Iskandar

sebelum menjadi cawapres juga sering berkunjung ke Buntet Pesantren sebagai bagian dari santri. Kemudian Prabowo Subianto pun sudah berulang kali bolak-balik dalam rangka safari politiknya ke berbagai kota salah satunya di Cirebon-Buntet. Sehingga semuanya itu sudah hadir di Buntet Pesantren.[44]

B. Pondok Pesantren Ruang Masuk Politisi

Pesantren merupakan institusi pendidikan agama yang mengajarkan nilai-nilai agama seperti akhlak, syariat, tauhid dan amaliah-amaliah sunnahnya. Namun seirng perkembangan zaman, pesantren telah memasuki ruang politik. Dahulu pergerakan politik berasal dari santri untuk memerdekakan negara dari penjajahan, menggunakan politik untuk perubahan sosial, politik sebagai sarana dalam merubah suatu zaman yang kita kenal denga reformasi yang memang santri dibekali ilmunya. Seperti Kiyai Mustamid Abbas, KH Idham Chalid, Gus Dur dan lain sebagainya yang merupakan toko politik Indonesia yang memiliki keilmuan dalam berpolitik. Bahkan bedanya tokoh politik awal-awal hingga reformasi tokoh politik itu selain cendekiawan dan juga aktivis. Tetapi hari ini tokoh politik tidak memiliki kecakapan berpolitik dan juga modal keberanian, berani masuk Rumah Sakit Jiwa jika gagal terpilih.

Sebagai sebuah ruang masuk politik, dengan kenetralannya Pondok Buntet Pesantren memiliki prinsip bahwa pondok pesatren harus netral adapun santri ingin terjun ke bidang politik tidak menjadi masalah. Sudah menjadi budaya

[44] Ibid., wawancara dengan Kang Luthfi

bahwa tokoh-tokoh Buntet Pesantren melahirkan pemikir atau cendekiawan sekaligus politisi, sebut saja Kiyai Mustamid Abbas seorang kiyai sekaligus politisi yang duduk di MPR pelopor pendukung pancasila sebagai asa negara.[45]

Pesantren ibarat keraton, banyak paslon (pasangan calon) keluar masuk dengan berbagai kepentingan dan tujuan dalam mendapatkan suara pada tingkat masyarakat santri, karena bagi politisi atau aktor politik santri merupakan komoditas yang bisa dijual belikan suaranya, namun mereka lupa bahwa santri memiliki daya nalar kritis.

Pesantren memiliki daya yang kuat dalam menentukan perubahan sosial, itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Apalagi konteksnya Buntet Pesantren, yang sudah sejak lama banyak santri jebolan Buntet Pesantren yang turut membangun negeri. Bahkan sejarah negera Indonesia tidak lepas dari peran kiai-kia buntet.

Sehingga, menurut Kang Luthfi apapun yang keluar (pendapat/fatwa) dari kiyai Buntet itu menjadi rujukan kiyai-kiya Nusantara. Buntet sering mengadakan pertemuan para alim ulama juga mendatangkan pejabat pejabat tinggi kumpul ada di Buntet Pesantren, makanya pertama kali Gus Dur diangakat menjadi presiden waktu itu kesepakatannya dari kiiyai buntet diantaranya, kiyai kiyai kumpul semua seluruh Indonesia untuk mendukung Gus Dur menjadi presiden.[46]

[45] Ibid., wawancara dengan Kang Luthfi
[46] Ibid., wawancara dengan Kang Luthfi

C. Pondok Pesantren dalam Menentukan Kecondongan Terhadap Politik

Beberapa kasus sering terjadi di mana pesantren dijadikan sebagai alat politik dalam mendulang suara, kiai khasrismatik pesantrennya mengajak untuk memilih salah satu calon pemimpin yang diusungnya sehingga mengalami konflik, yang mestinya santri *ta'dzim* kepada kiai dalam hal ini santri yang menjadi oposisi menentang adanya fatwa kiai tersebut. Adanya resistensi di kalangan santri, karena kiai pesantrennya condong terhadap calon presiden yang mengunjungi pesantrennya.

Kasusu Pondok Pesantren Sunan Drajat di Kabupaten Lamongan, mengalami perlawanan atau resistensi dari snatri kepada kiainya. Yang awal mulanya santri harus memilih salah satu calon presiden 2019 yang sedang berkunjung di pesantren Kiainya. Namun, perlawanan santri semakin nyata dengan melakukan beberapa tindakan yang tidak mengindakan sosok kiai dan pesantren, diantaranya ialah; tidak ikut piket, sering membolos mengaji, dan tidak mengikuti kegiatan Jama'ah.[47]

Bebrerapa pesantren memang terjadi konflik akan pecahnya kubu para pendukung, namun tidak etis juga jika kai yang menjadi tokoh kharismatik memaksa untuk memilih salah satu calon pemimpin. Maka mestinya pesantren dan jajaran kiai memahami psikologi dan dampak akan sikap tendensisunya terhadap politik.

[47]Aniq Ifadah dan Agus Machfud Fauzi. 2019. *RESISTENSI SANTRI PADA FATWA KIAI (Studi Fenomenologi di Pondok Pesantren Sunan Drajat).* Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Fenomena pesantren memihak kepada salah satu politisi harus segera diberikan pendampingan dan pendidikan politik, sehingga tidak terjadi resistensi dari santri kepada kiai dan pesantrennya. Bagaimana pun sikap murid harus patuh kepada kiainya, maka harus dikembalikan fungsi kiai bukan sebagai pembuat fatwa dukunagn politik tetapi fatwa agama yang memamng sudah menjadi ruang lingkupnya.

Sudah menjadi prinsip bahwa Buntet Pesantren sebagai institusi harus netral, siapapun yang berkunjung harus disambut baik tidak memandang siapa pun golongannya. Menurut Kang Luthfi Buntet Pesantren merupakan pesantren inklusif yakni pesantren-pesantren yang tidak memandang A lebih unggul daripada B, memandang seseorang dari suku, agama dan sebagainya. Karena semuanya sama, pesantren yang di bawah naungan Buntet Pesantren menerima perbedaan sikap dari kalangan apa pun, bersifat *tawasuth, tasamuh dan tawazun* itu diterapkan di pesantren Buntet.[48]

Pesantren harus netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu politisi. Sebaai sebuah rumah yang teduh dengan dipenuhi tumbuhan-tumbuhan yang kelak berubah lebat dan matang serta memiliki lahan yang luas sejatinya rumah harus dirawat agar tidak dirusak oleh tamu yang datang. Setiap tamu akan datang dan pergi membawa keburukan saat pergi, dan membawa kebaikan saat datang.

Dunia intelektual santri harus dihidupkan dan *scop*nya di perluas, bukan hayalan-hayalan kelak menjadi wali atau orang-

[48] Ibid., wawancara dengan Kang Luthfi

orang sufi yang bisa menghilang dan terbang. Pesantren merupakan tempat pelatihan mental dan pengajaran serta pendidikan agama, politik hanya kajian *secuil* dari jutaan kajian di pesantren, jangan lagi terperdaya. Kiai dan santri menjadi penghuni bangunan yang di dalamnya terdapat ruang dan waktu, saling sinergi dan menodorng perubahan agar kelak cita-cita bangsa dapat terwujud, sesuai pembukaan UUD 1945 “mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”, salah satunya melalui Pondok Pesantren.

BAB 4
SANTRI DAN IDE DI MASA DEPAN

A. Ilmu Yang Dimiliki Untuk Pembebasan Atau Penindasan

Santri dikenal sebagai penyambung lidah para ulama. Maka sudah tidak diragukan lagi jika santri akan menjadi penerus para ulama untuk menyebarkan ilmu yang mereka miliki selama menuntut ilmu di pondok pesantren. Santri dilatih kesabarannya dalam mencari ilmu. Ilmu yang ia dapat tidak sepenuhnya hasil kerja kerasnya dalam belajar, namun ada campur tangan Allah di dalamnya lewat tadhimnya santri kepada ilmu dan khidmatnya santri kepada gurunya.

Ilmu dapat mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan ataupun sebaliknya. Dikatakan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mengantarkan pemiliknya kepada Allah dan jalan kebaikan. Menurut Imam Syafi'I, ilmu yang paling berharga setelah ilmu halal dan haram (*Fiqh*) adalah ilmu kedokteran. Imam Syafi'I membagi ilmu menjadi dua, yaitu ilmu agama dan ilmu dunia. Sebagaimana dalam Kitab dikatakan:

Imam Syafi'i juga berkata,

علمان العلم إنما :هو للدين الذي فالعلم الدنيا، وعلم الدين، علم الفقه، :هو للدنيا الذي والعلم الطب.

"Ilmu itu ada dua: ilmu agama dan ilmu dunia, ilmu agama yaitu fikh (fikih akbar: aqidah, fikih ashgar: fiqh ibadah dan muamalah, pent). Sedangkan ilmu untuk dunia adalah ilmu kedokteran."[49]

[49] Adab Asy-Syafi'i wa manaqibuhu hal. 244, Darul Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, cet. I, 1424 H, syamilah

Namun terlepas dari apapun itu, selama ilmu yang dimiliki bisa bermanfaat dan mendekatkan kepada Allah maka bersungguh-sungguhlah dalam mempelajarinya. Bukan hanya ilmu agama saja, bidang ilmu-ilmu yang lain pun boleh dipelajari.

Termasuk para santri, tidak dituntut dan diberi pelajaran agama saja. Santri diberi kebebasan untuk dapat mempelajari bidang ilmu apapun itu. Semua bidang dan rumpun ilmu minimal harus santri ketahui.

Begitu pula yang dilakukan oleh santri Buntet, santri tidak boleh buta terhadap rumpun ilmu. Seorang santri diharapkan bisa melek ilmu apapun itu, bukan berarti harus menguasai semua ilmu. Tapi santri setidaknya bisa mengetahui berbagai macam rumpun ilmu termasuk salah satunya ilmu politik. Bagi santri Buntet, ilmu politik masuk ke dalam ranah kajian. Jikalau ada sebagian santri yang menyukai ranah politik, pihak pesantren tidak menghalangi potensi yang dimiliki santri tersebut. Justru potensi dan minat santri kepada politik akan didukung dan memberikan ruang kebebasan untuk minat yang dimilikinya.

> "*…. Santri itu bukan pandai dalam ilmu agama saja, tapi juga harus aktif, kreatif, inovatif. Karena tantangan yang dihadapi saat ini bukan masa masa klasik seperti dulu tapi masa digitalisasi. Santri harus punya semangat, semangat seperti itulah yang saya sering sampaikan pada perkumpulan santri"* Ucap Kiai Luthfi.[50]

[50] Rekaman wawancara Kiai Luthfi

Kiai Luthfi menerangkan bahwa santri itu aktif dan pandai dalam ilmu-ilmu lainnya, bukan pandai dalam ilmu agama saja. Dan beliau pun berpesan kepada santri untuk selalu menjadi santri yang intelektual dalam menghadapi tantangan global dan peradaban yang terus maju.

> *"... bukan dituntut ilmu agama saja, tapi juga ilmu etika, estetika, sosial. budaya, politik, harus kaji semua. Biar santri itu ada di mana mana."* Ucap Kiai Luthfi.[51]

Dan di Pesantren Buntet juga diajarkan bagaimana para santrinya mempunyai akhlak dan budi pekerti yang luhur serta memahami masalah-masalah sosial, budaya, pun politik. Hal itu dilakukan supaya santri dapat menempati seluruh ranah kehidupan, sehingga kita dapat menemukan berbagai profesi-profesi yang berjiwa santri.

Ketika santri mempunyai minat dan fokus menguasai bidang yang disenanginya. Maka akan kita dapatkan setiap profesi yang memiliki karakter dan jiwa santri. Diharapkan ketika telah terjun ke masyarakat, santri tetap memegang akhlak dan karakter baik yang sebelumnya telah diajarkan di pesantrren.

Tuntutan melek akan literasi dan paradigma berfikir, musti digenjot setiap lembaga pesantren. Ketajaman paradigma berfikir, akan membekali santri dikemudian hari dalam menjawab peradaban zaman yang terus menawarkan keeksotisannya. Santri, harus mampu menjawab pelbagai

[51] Rekaman wawancara Kiai Luthfi

problem sosial masyarakat bahkan negara dengan perkara carut marutnya.[52]

Menjadi santri, tak ubahnya menjadi manusia serba bisa. Santri dituntut mandiri, bersungguh-sungguh dalam belajar, dan mempunyai kepekaan terhadap sekitar. Menjadi santri yang berkualitas dengan meningkatkan pemahamannya diberbagai bidang, termasuk bidang politik. Santri yang memiliki minat pada bidang politik itu bagus dan harus didukung minatnya.

Begitu pula dengan santri di Pesantren Buntet, disana para santri dibina sesuai dengan apa minat dan bakat yang dimiliki. Dan terkait permasalahan politik, pesantren Buntet sama sekali tidak keberatan kepada santrinya yang berpolitik. Karena menurut Kiai Buntet, santri bebas menentukan pilihannya termasuk dalam berpolitik. Pesantren Buntet terkenal sebagai pesantren yang moderat, netral, dan tidak condong kepada politik a, b, ataupun c.

> *"...pesantren buntet tidak melarang santri berpolitik, yang tidak berpolitik itu adalah pesantrennya, bukan santrinya. Selagi masih sejalan dan diarahkan dengan benar oleh gurunya maka sah sah saja,(santrinya berpolitik)... Pesantren mendudkung santrinya berpolitik"*. Ujar Kiai Luthfi [53]

Kalangan santri yang didefinisikan sebagai muslim yang taat, tak boleh ikut-ikutan menganggap politik itu kotor. Justru santri harus mengontrol politik agar tetap berada pada jalur

[52] Oscar Maulana. Santri, Budaya dan Moderasi Beragama. November 7, 2020. https://syariah.uinsaid.ac.id/santri-budaya-dan-moderasi-beragama/
[53] Rekaman Wawancara Kiai Luthfi

kebaikan. Negara justru harus dipegang oleh orang berkualitas santri. Agar politik bisa membawa rahmat bagi seluruh umat. Bahwa politik itu netral. Bisa baik bisa buruk tergantung siapa yang memegangnya. Karena itu ia mengajak para santri untuk tidak alergi kepada politik. Minimal tidak golput saat pemilu, maksimal bisa menjadi pemimpin negara seperti Gus Dur dan lain-lainnya.

Menurut para ulama, politik adalah *wasilah (*jalan; cara; alat). Bukan *ghoyah* (tujuan). Sebagai alat, Imam Al-Mawardi, ulama besar pengarang kitab fikih politik termasyhur mengatakan, politik jika dilandasi agama akan baik, dan politik agama jika disokong politik akan kuat. Kaum santri yang diantaranya terwujud pada sosok kiai, relatif punya kendali moral yang baik. Sehingga tidak mudah melakukan dosa atau perbuatan tercela.

Santri itu punya kendali iman. Teladannya adalah Nabi Muhammad, Sifat-sifat Nabi yang mesti menjadi moralitas politik santri, adalah *siddiq* (jujur), *fathonah* (cerdas), *amanah* (bisa dipercaya), dan *tabligh* (menyampaikan; memenuhi hak rakyatnya).

Setiap pondok pesantren pasti menyediakan tempat tinggal untuk santri, fan di pesantren mempelajari ilmu agama secara mendalam, termasuk ilmu ilmu syiyasah (politik), Kehidupan manusia tidak akan terlepas dari dunia politik, karena mayoritas manusia tinggal di suatu negara yang di dalamnya ada pemimpin dan sistem pemerintahan. Bahkan kita akan sulit

mencari kehidupan manusia yang di luar suatu negara tertentu. Andaikata ada itu sangat terpencil sulit di akses.

Dikisahkan perjuangan rakyat melawan penjajah yang paling heroik, yang kemudian melahirkan hari Pahlawan 10 Nopember, tergerak oleh dikeluarkannya maklumat "Resolusi Jihad" oleh Hadlrotus Syeikh KH Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. perjuangan non kooperatif dan kooperatif terhadap penjajah Belanda, dimainkan perannya oleh kaum santri.

Santri selalu turun dalam kancah perpolitikan negeri ini. Perannya selalu besar dalam menjaga keutuhan republik ini. Hal monumental lain adalah dikeluarkannya keputusan Muktamar NU yang menyatakan Pancasila dan Demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Itu yang membuat negeri kita ini masih tegak sampai sekarang.[54]

Sehingga ilmu politik yang dimiliki santri tidaklah menjadi penindasan, tetapi menjadi petunjuk dan pegangan agar tetap berjalan di jalan yang benar tidak menyalahi syariat sebagaimana mestinya. Karena yang dinamakan berharganya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, termasuk ilmu politik yang mempunyai manfaat luas untuk tetap menegakkan kebenaran dan memperjuangkan hak manusia di tengah badai tipu daya politik kotor.

[54] Encep Safrudin Muhyi. (2023). Santri Pun Bisa Berpolitik. Radar Banten. https://www.radarbanten.co.id/2023/10/22/santri-pun-bisa-berpolitik/

B. Santri, Agen Perubahan dan Panutan Masyarakat

Agent of change atau agen pembawa perubahan selalu dikaitkan dengan sosok mahasiswa. Karena mahasiswa dianggap memiliki intelektual serta jiwa yang kritis dan juga mahasiswa diharapkan untuk dapat menemukan solusi untuk masalah pada era saat ini. Namun siapa kira bahwa santri pun bisa diharapkan menjadi pembawa perubahan di kehidupan masyarakat.

Tercata dalam sejarah, banyak tokoh besar di Indonesia yang berasal dari latar belakang santri. Seperti pendiri organisai Nahdlatul Ulama (NU) K.H Hasyim Asyari, pendiri Muhammadiyah K.H Ahmad Dahlan, tokoh yang berperan dalam pendidikan dan perkembangan islam K.H Wahid Hasyim, hingga sosok mantan Presiden Indonesia yang menjabat pada tahun 1999-2001 yaitu Gus Dur atau dengan nama K.H Abdurrahman Wahid yang bahkan sempat mendapat pernghargaan *"Santri Life Time Achievement"* pada tahun 2016 yang diberikan oleh Yayasan Pustaka Compass dengan maksud apresiasi atas pengabdian Gus Dur terhadap agama dan bangsa.[55]

Oleh sebab itu, tidak dipungkiri bahwa Pesantren Buntet juga dapat mencetak para tokoh besar di masa depan yang hanya berawal dari seorang santri. Setelah terjun ke masyarakat, santri diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan ilmu yang mereka miliki.

---

[55] https://www.kompasiana.com/salsabilaadilah/616fb191c01a4c545b3c1a32/santri-selaku-agen-pembawa-perubahan-dalam-masyarakat

Sudah lumrah jika santri pasti akan selalu dikaitkan dengan ilmu keagamaan saja. Namun pada dasarnya selain ilmu agama, santri juga dibekali dengan ilmu pengetahuan umum, seperti ilmu pengetahuan, ilmu sosial, ilmu matematika, ilmu bahasa, dan sebagainya. Malah seorang santri memiliki nilai lebih karena di dalam pesantren lebih diberikan pelajaran-pelajaran yang tidak didapatkan jika bersekolah di sekolah umum.

Selain itu, santri juga diajarkan berbagai pelajaran lain dari kitab kuning. Dalam kitab kuning inilah pesantren mengajarkan ilmu filsafah, politik, ekonomi, dan dapat digunakan sebagai materi yang disebarluaskan dalam masyarakat dengan harapan dapat menjadi bahan perubahan yang lebih baik ke depannya.

Generasi santri bisa menjadi garda terdepan pembawa perubahan, salah satunya dapat ditempuh melalui bidang politik.

> *"....di dalam pondok pesantren para santri juga diajarkan politik, diantaranya diajarkan bagaimana para santri bisa melihat yang benar dan mengarahkan sesuatu sesuai dengan syariat islam."*
> Kata Kiai Luthfi

Dalam pesantren para santri diajarkan juga tentang paham wasathiyah dengan definisi paham yang di dalamnya terdapat ajaran islam dimana adanya arahan umat islam untuk adil, berimbang, bermaslahat dan proporsional, serta moderat dalam dimensi-dimensi kehidupan.

Dengan ajaran ini pada umumnya seorang santri selalu mengedepan toleransi, kolaborasi, serta kooperasi dalam kinerja

dan interaksi. Santri memiliki kesempatan dan peran dalam menyebarluaskan ajaran dan budaya islam serta mengambil peran pada bidang politik. Dengan peran santri tersebut, lingkungan masyarakat yang luas sangat membuka kemungkinan adanya regenerasi dalam masyarakat yang luas.

Seorang santri yang menjadi seorang tokoh masyarakat dalam suatu lingkungan, pemimpin dalam suatu organisasi, pengurus dalam suatu pertumbuhan ekonomi, pejabat dalam bidang politisi memiliki kelebihan dibanding dengan yang lain.

Peran santri dalam masyrakat mempunyai 2 perspektif, yaitu santri sebagai sumber authoritatif dan sebagai sumber persuasif. Santri sebagai sumber authoritatif maksudnya adalah santri memiliki peran dalam masyarakat sebagai pemimpin yaitu sebagai seorang imam atau da'i. Ssantri setelah terjun ke masyarakat diharapkan dapat menjadi tempat masyarakat bertanya dan mendapat informasi terkait bidang keagamaan dimana pada hal ini santri memiliki pengetahuan dan ilmu-ilmu dasar yang lebih dibanding masyarakat pada umumunya.

Sedangkan santri sebagai sumber persuasif, yaitu santri dapat menjadi apa saja yang diinginkan pada bidang-bidang profesi yang bermacam-macam. Contohnya, santri dapat menjadi pengusaha, pegawai, pedagang, aktivis, politisi, hakim, petani dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan dalam aktiitas-aktifitas yang dijalankan atau profesi yang digelutinya, bisa mengaplikasikan karakter atau jiwa santri, dan menerapkan ilmu yang telah dipelajari serta dihiasi dengan nilai-nilai agama di dalamnya.

Terdapat pepatah mengatakan, *"Pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan"*, artinya semua elemen pemuda pada saat ini yang akan menghantarkan bagaimana nasib suatu daerah ke depanya. Santri Buntet diharapkan bisa menjadi pembawa perubahan ke arah yang lebih baik. Termasuk apabila santri Buntet terjun ke ranah politik, maka jadilah politisi yang baik dan santun. Karena santri juga memiliki andil dan peran dalam melakukan perubahan tersebut yang pastinya akan menuju pada kehidupan yang lebih baik.

C. Santri Pembentuk Budaya Gagasan Bukan Politik Praktis

Santri menunjukkan semangat perjuangan, pengabdian, dan komitmen untuk mendukung dan memperkuat fondasi negara. Mereka diharapkan senantiasa siap untuk melaksanakan tugasnya dalam memelihara keutuhan negara dan nilai-nilai yang mengikat bangsa Indonesia.

Santri Buntet bebas untuk memilih ingin berpolitik ataupun tidak. Namun yang perlu digarisbawahi, Pesantren Buntet bukanlah pesantren yang berpolitik dan haus kekuasaan jabatan politik. Sebuah pesantren tidak boleh berpolitik, sedangkan santrinya boleh berpolitik.

Kenapa pesantren tidak bloleh berpolitik sedangkan santri boleh berpolitik?

> *"... ya karena pesantren itu adalah sebuah lembaga, dan santri itu individual. Santri berpolitik itu tidak apa apa selama masih sejalan dengan syariat islam, tugas pesantren hanya membentuk santri menjadi a, b, c. Selama politik itu tidak mewarnai. Tapi jika cara santri mewarnainya*

> *dengan cara berpolitik maka ya silakan.. tapi jika pesantrennya yang berpolitik dan memilih a b c, yaitu tidak bagus..”* Pandangan Kiai Luthfi

Dijelaskan oleh Kiai Luthfi bahwa Pesantren Buntet itu netral, tidak mendukung salah satu partai politik. Pesantren Buntet hanya membina santrinya dan mewadahi santrinya untuk berpolitik. Karena pasti diantara banyaknya santri yang ada di Pesantren Buntet, ada santri yang minat dan mempunyai potensi di bidang politik.

Dan tidak dipungkiri di luar sana masih banyak pesantren-pesantren yang secara terang-terangan mendukung salah satu partai ataupun bahkan terlibat dalam partai politik tertentu. Bagi Pesantren Buntet hal itu tidaklah bagus, sehingga Pesantren Buntet memilih untuk netral dan memberikan kebebasan bagi para santrinya untuk berpolitik.

Jika terjun ke ranah politik, maka jadilah santri yang berpolitik sehat dan mempunyai pegangan kuat pada syariat islam.

> *“…Pesantren berdiri dengan mengajarkan keislaman, akhlak, etika, estetika, ya pesantren membangun bangsa yaa dengan car aitu cara membina anak santri sesuai dengan minatnya masing masing* ..” Ucap Kiai Luthfi

Walau suatu saat nanti seorang santri akan menjadi politisi, maka tetaplah jaga dan terapkan nilai-nilai keagamaan serta ilmu syariat dengan baik. Tidak terlepas apapun latar belakangnya, setiap orang harus memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik.

Pesantren Buntet merupakan pesantren yang sangat moderat, sehingga memiliki kebebasan bagi santrinya untuk memilih minat bidang. Tidak condong mengarah ke kanan maupun mengarah ke kiri. Hal itulah yang harus dijadikan panutan bagi pesantren-pesantren lainnya. Bersikap netral ditengah gempuran iming-iming kenikmatan dan janji partai politik.

Santri yang menjadi pembentuk budaya gagasan dapat berupa nilai-nilai, norma, peraturan, kepercayaan, ide, dan sebagainya. Gagasan yang dimiliki santri perlu dihormati, termasuk dalam bidang politik.

Namun, semakin maju bangsa Indonesia ternyata tidak terlepas dari politik praktis. Seringkali politik dikaitkan dengan mencari pendukung yang paling banyak. Adanya permainan politik praktis, membuat pesantren menjadi salah satu sasarannya. Pesantren mempunyai kiai dan santri di dalamnya, maka tidak heran jika banyak oknum politik mencari relasi dan cara untuk mendapatkan dukungan bagi partai politiknya. Hal ini tentu meresahkan pesantren dan santri yang ada di dalamnya.

Menurut Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin meminta istilah kampanye dalam pondok pesantren mesti dilihat secara utuh. Menurutnya, tidak terhindarkan ada pembicaraan politik dalam arti yang luas di ponpes.

> *"Bagaimanapun, pondok pesantren adalah lembaga pendidikan. Jadi kampanye itu harus bisa dilihat dari perspektif yang utuh. Sebagaimana politik itu kan ada politik kebangsaan, politik dalam pengertian makro, tapi ada politik dalam pengertian politik praktis. Maka di lembaga-lembaga*

> *pendidikan tidak terhindarkan bicara politik,"* ujar Lukman di Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (16/10/2018).[56]

Keterlibatan kiai-santri dalam politik praktis sebenarnya merupakan bagian kecil wajah lama dari konfigurasi politik nasional. Namun, sejak era reformasi 98, geliat politik kiai kian marak mewarnai panggung perebutan kekuasaan.

Fenomena ini telah banyak menyita perhatian publik hingga pada level masyarakat pheripheral karena selama ini ketokohan kiai di beberapa daerah dikenal luas sebagai pendidik moral dan intelektual umat dengan melakukan dakwah ajaran agama Islam.

Sudah bukan menjadi rahasia umum, para kiai dan santri selalu punya pilihan dan orientasi politik yang jelas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman sesuai dengan pemahamannya.

Tahun 2023 akhir menjadi momen yang sangat empuk bagi partai politik untuk mencari dukungan suara lewat "pesantren". Karena para santri di dalamnya dapat menjadi "boneka" para kiai pimpinan pesantren yang telah bekerjasama dengan suatu partai. Sehingga santri seolah-olah menjadi politik praktis untuk mendapatkan suara lebih.

Alih-alih suara santri adalah suara kiai, sehingga ini membuat santri tidak berdaya karena lebih memilih manut kepada apa yang diperintahkan kiai. Politik praktis yang

---

[56] https://news.detik.com/berita/d-4259494/menag-hindari-politik-praktis-di-pesantren

dimaksud seperti ajakan memilih kandidat capres-cawapres atau partai tertentu.

Maka tidak heran jika masih ada pesantren yang merelakan santrinya dijadikan politik praktis. Namun, hal itu tidak berlaku di Pesantren Buntet yang menerapkan sistem moderat. Pesantren Buntet lebih memilih bersikap netral dibandingkan ikut partai politik tertentu.

BAB 5
KIAI, SANTRI DAN MASYARAKAT

A. Kebijaksanaan Kiai Dalam Mengkomunikasikan Politik

Kiai Lutfhi sangat bijak dalam pandangannya terkait politik di lingkungan pesantren. Beliau menegaskan bahwa Pesantren Buntet memilih untuk tidak berpolitik. Maksudnya, Pesantren Buntet termasuk sebuah lembaga pendidikan yang dimana dalam lembaga pendidikan sangat tidak etis apabila ikut mencampurkan hal-hal yang berbau politik.

Dalam hal ini diantara beberapa fungsi pesantren, pertama, pesantren sebagai pusat keilmuwan dan pelestarian tradisi lokal berbasiskan Islamic studies. Kedua, sebagai pendidikan moral bangsa. Namun dalam konteks perjalanan politik Indonesia, diakui atau tidak, pesantren telah bergeser menjadi salah satu bagian dari media kampanye politik yang mempunyai magnet yang sangat luar biasa.

Politik praktis semacam inilah yang mesti dihindari pada lingkungan pesantren. Yang bertujuan agar politik Indonesia menjadi politik yang bersih dan sehat. Serta tetap menegakkan sistem politik demokrasi untuk memilih pemimpin bangsa ini.

> *"... satu cara untuk menentukan pemimpin diantaranya adalah politik dengan cara demokrasi."*
> Kata Kiai Luthfi

Demokrasi memposisikan rakyat dalam penentuan kebijakan negara, sering bergeser ketika peranan negara yang terwujud dalam pemerintahan melakukan langkah-langkah yang

berusaha membatasi hakikat kehendak dan kekuasaan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Langkah langkah tersebut dicapai melalui perubahan konstitusi ataupun produk perundang-undangan yang dibuat rezim yang berkuasa.[57]

Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia telah membuktikan bahwa tidak selamanya demokrasi dilaksanakan sesuai dengan konstitusi. Kenyataan silih bergantinya sistem demokrasi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai lahirnya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai pada munculnya reformasi menunjukkan betapa dominannya peranan (pemerintahan) negara dalam memberikan warna terhadap sistem demokrasi di Negara Indonesia.

Menurut kiai Luthfi, sistem politik yang ada di Indonesia ini sudah sesuai dengan kultur bangsa Indonesia, yaitu menerapkan sistem demokrasi. Seperti kisah para sahabat nabi pada masanya, mereka pernah mengadakan 4 macam sistem kekuasaan. Termasuk salah satunya pernah menerapkan sistem demokrasi ini.

Sistem demokrasi dianggap cocok untuk bangsa Indonesia karena penduduk Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural dan banyak tersebar di seluruh daerah. Sehingga pemilihan pemimpin lebih bagus menggunakan sistem demokrasi ini. Demokrasi adalah pilihan masyarakat modern untuk menyelenggarakan kehidupan bersama.

[57] Ekawahyu Kasih. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI.*

Demokrasi merupakan hasil pengalaman berabad-abad berbagai peradaban dalam mengelola kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya dalam kerangka kontrak sosial. Demokrasi menjadi sistem karena di dalam demokrasilah kepentingan kehidupan bersama dikelola.

Sebagai sistem, demokrasi memiliki tiga elemen utama, yaitu: input, proses, dan output. Input dari demokrasi tentulah aspirasi, partisipasi publik dan, dalam bentuk yang formal, suara (vote). Input inilah yang diolah dalam proses demokrasi politik yang berupa agregasi dan kondensasi informasi, pilihan serta preferensi individu. Proses tersebut akan menghasilkan output berupa pengelolaan kehidupan bersama yang memberi manfaat untuk semua. Proses demokrasi ini harus dijaga dari distorsi serta harus dipastikan dapat menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan.

Berbicara masalah politik, Kiai Lutfhi menegaskan bahwa politik digunakan sebagai sebuah kendaraan atau media saja.

> *"....politik itu hanya kendaraan saja, dalam pesantren juga dikaji tentang politik, bagaimana politik yang baik dan yang tidak itu.."* pandangan Kiai Luthfi

Sehingga apabila pemimpin pesantren ditanya terkait politik, jawaban yang bijak adalah bersikap netral atau moderat. Karena tugas dari seorang ulama adalah untuk menuntun kepada jalan yang sesuai syariat islam.

Begitupun ketika Kiai Lutfhi dihadapkan oleh beberapa pejabat atau politisi yang datang berkunjung ke pesantren.

Beliau menyambutnya dengan baik, tidak membeda-bedakan siapa dari partai apa dan membawa apa. Intinya beliau bersikap netral, ntah siapapun (partai politik) yang datang ke pesantren akan disambut dengan baik selayaknya tamu besar yang datang berkunjung. Dan beliau menganggap hal itu hanya merupakan silaturahmi, tidak lebih dari itu.

Beliau juga menyebutkan bahwa apabila ada pemerintah yang datang berkunjung, hendaklah bersikap netral tidak condong memilih a maupun b. Karena menurut beliau, hubungan antara pemerintah dan ulama itu seperti suatu kesatuan yang berbeda namun dengan tujuan yang sama.

> *"....dalam Fiqih siyasah... ulama dan umaro.. ulama dan pemerintahan tidak pernah lepas.."* ucap Kiai Luthfi

Dalam hal ini juga beliau menjelaskan bahwa sebagi seorang ulama hendaknya menjadi penyeimbang, penasehat, dan pembimbing kepada pemerintah apabila diminta.

> *".... Pesantren itu sebagai penyeimbang , penasehat, pembimbing untuk umaro (pemerintah) itu., sehingga pesantren dituntut untuk netral. Jangan a jangan b jangan c. jika ingin hadir ke pesantren silakan.."* ucap Kiai Luthfi

Perlu ada suatu harmonisasi dalam menjaga umat, yaitu antara Ulama dan Umaro. Ketika Ulama dan Umaro sudah bergerak bersama, maka kuatlah negara, bangsa dan umat. Dengan perspektif pesantren sebagai penyeimbang, penasehat, dan pembimbing, maka pandangan masyarakat tidak negatif. Begitupun ketika kita melihat ketika ada politik yang masuk ke

pesantren, maka tidak berprasangka jelek atau negatif oleh kyai pesantren lain.

> *".. oleh sebab itu, supaya ketika ada politik masuk ke pesantren, pandangannya tidak negatif.*" pendapat Kiai Luthfi

Menurut Kiai Luthfi, ulama dan umaro adalah dua unsur yang berbeda tetapi satu tujuan.

> *"... jadi 2 unsur yang berbeda antara ulama dan umaro, bagai rel kereta api yang terpisah tapi punya tujuan yang sama. Dua unsur yang harus berdiri tegak dengan tujuan yang sama."* pandangan Kiai Luthfi

Dua unsur yang dimaksud adalah ulama dan umaro. Seumpama rel kereta api yang saling beriringan, kanan dan kiri, dua hal yang berbeda namun tetap satu tujuan yang sama. Keduanya harus sama-sama berdiri tegak, tidak boleh ada salah satunya yang lemah. Antara ulama dan umaro harus jalan saling beriringan dan bergerak bersama. Sehingga akan membentuk negara dan bangsa yang kuat.

Di sisi lain mungkin kita masih sering menemukan pesantren-pesantren yang terikat dengan partai politik.

> '*...Tidak menafikan bahwa ada pesantren yang mendukung politik semacam itu mendukung salah satu capres, tapi saya pribadi tidak cocok seperti itu., dan dilihat dulu apa latar belakang pesantren itu mendukung seperti itu." ucap Kiai Luthfi*

Ada pesantren yang terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi mendukung salah satu capres. Tapi Kiai Luthfi menegaskan dirinya tidaklah seperti itu. Beliau bersikap netral

pada para capres atau cawapres yang datang berkunjung ke pesantren. Beliau berpendapat bahwa memberi warna pada politik itu boleh-boleh saja namun jika sampai menjadi politik praktis itu yang harus dihindari.

> *"... memberikan warna pada politik boleh, tapi untuk menjadi poltik praktis tidak."* kata Kiai Luthfi

Karena tentu hal seperti itu banyak mudharatnya dan jauh dari syariat islam yang mengusung keadilan dan kejujuran. Itu sebabnya, tidak boleh mencampurkan antara haq dan bathil. Karena antara haq dan yang bathil itu tidak pernah bersatu yang menemukan jalannya.

Sebagaimana firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 42:

تَعْلَمُونَ وَأَنتُمْ ٱلْحَقَّ وَتَكْتُمُواْ بِٱلْبَـٰطِلِ ٱلْحَقَّ تَلْبِسُواْ وَلَا

> Artinya: *"Janganlah kalian campur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya"*. (Q.S. Al-Baqarah : 42).

Rasulullah Saw., pernah berkata kebaikan manusia di suatu negeri bergantung pada kesalehan para ulama dan keadilan umara (penguasa). Kerusakan mereka juga bergantung pada kerusakan para ulama dan keculasan umaranya. Sebagaimana Hadis yang berbunyi,

> *"Dua golongan manusia, jika mereka baik, akan baik seluruh manusia, dan jika ia rusak, akan rusak seluruh manusia. Mereka adalah para ulama dan umara." (HR Ibnu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya).*

Sehingga hendaknya seorang ulama menjadi ulama yang netral dan moderat. Karena apabila ulama dan umaronya rusak, maka rusaklah semua penduduknya. Dan kita sebagai pemegang suara, hendaklah menyuarakan yang benar dan memilih yang sesuai syariat. Adapun hasilnya tidak perlu pusing dan terlalu mengurusi. Karena ada salah satu pepatah mengatakan *"suara rakyat adalah suara tuhan"*.

Maka siapapun nantinya pemimpin yang terpilih, itu sudah menjadi takdir Allah. "*Ketika ada segerombolan yang sepakat pada sesuatu, maka itu termasuk disepakati oleh Allah"*. pungkas Kiai Luthfi. Dan tugas kita cukup berikhtiar memilih yang mendekati dan sejalan dengan syariat islam. Serta bertawakal karena apapun hasilnya pasti telah Allah atur itulah yang terbaik.

B. Sikap Santri Dan Budaya Politik

Santri dikenal sebagai seseorang yang mempunyai sikap santunyang tinggi. Ciri khas dari penduduk Indonesia yang mempunyai watak yang ramah dan santun pada setiap orang disekitarnya. Sebagai seorang santri, hendaknya kita menerapkan sikap yang berorientasi kepada sikapnya Panutan kita, yaitu Rasulullah Saw.

Rasulullah Saw., merupakan manusia yang sempurna dengan akhlak yang mulia. Beliau juga dikenal dengan sosok yang berbudi pekerti luhur. Beliau dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah Swt., menjadikan Rasulullah Muhammad Saw., sebagai suri tauladan. Sehingga

para santri seharusnya meniru akhlak mulia Nabi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu sikap yang diajarkan di Pesantren Buntet adalah sikap saling menghormati. Termasuk menghormati pilihan masing-masing individu dalam memilih pemimpin. Oleh sebab itu, Pesantren Buntet sangat bersikap netral ketika ada salh satu calon pemimpin berkunjung ke pesantren.

Dan dengan adanya sikap saling menghormati inilah para santri bisa belajar untuk menghormati pilihan orang lain. Karena setiap individu mempunyai pilihan yang berbeda-beda dengan latar belakang yang berbeda pula.

> *"... sikap menghormati orang lain, karena Allah itu menciptakan makhluk dengan bentuk yang sama namun dengan karakter yang berbeda. ... kita pesantren buntet mengajarkan kepada santri bahwa itulah perbedaan yang datang dari tuhan yang harus dihormati dan harus disyukkuri.."* Kata Kiai Luthfi

Sikap saling menghargai dan menghormati ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap perintah agama dan membangun tali silaturahmi yang erat di antara sesama muslim. Sikap ini akan sangat bermanfaat bagi santri dalam menghadapi situasi dan kondisi di luar lingkungan pesantren, di mana mereka akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang, budaya, dan agama yang berbeda-beda.

Salah satu ayat yang membahas tentang saling menghormati adalah Surah An-Nisa ayat 86:

شَيْءٍ كُلِّ عَلَى كَانَ اللَّهَ إِنَّ رُدُّوهَا أَوْ مِنْهَا بِأَحْسَنَ فَحَيُّوا بِتَحِيَّةٍ حُيِّيتُمْ وَإِذَا
حَسِيبًا

> Artinya: *"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa)]. Sesungguhnya Allah memperhitungankan segala sesuatu."*(Q.S. An-Nisa ayat 86)

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah mengemukakan bahwa kata hayya/ hidup berarti do'a untuk memperpanjang usia. Kata tersebut pada mulanya tidak diucapkan kecuali pada raja atau penguasa. Bahkan dalam shalat diajarkan untuk mengucapkan al-tahiyyah (penghormatan) yang di tujukan hanya kepada Allah Swt., Hal ini untuk mengambarkan bahwa hidup dan sumber hidup yang tiada hentinya adalah Allah Swt., Oleh karena itu kata tersebut diartikan kerajaan, seakan-akan kehidupan raja itulah kehidupan sempurna.

Kata tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan segala macam penghormatan, baik dalam bentuk ucapan, maupun selainnya. Pada masa Jahiliah, masyarakat bila bertemu saling mengucapkan salam antara lain yang berbunyi hayyaka Allah yakni "*semoga Allah memberikan untukmu kehidupan".* Adapun kata tahiyyah ini secara umum dipahami sebagai ucapan salam.

Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari dalam Tafsir Ath-Thabari menjelaskan bahwa maksud ayat "*Wa idza huyyitum bitahiyyatin (apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan)," adalah* apabila seseorang didoakan dengan panjang umur, selamat, dan sejahtera, maka

selayaknya orang yang didoakan mendoakan dengan lebih baik atau minimal setara.

Secara garis besar bentuk saling menghormati yang dilakukan seseorang kepada orang lain bisa dalam dua bentuk: saling menghormati melalui ucapan dan saling menghormati melalui perbuatan.

Dengan begitu santri Buntet diharapkan dapat menerapkan sikap saling menghormati ini. Karena begitulah islam yang sangat memerhatikan satu sama lain di dalam berbagai perbedaan.

Maka sesungguhnya sifat umat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah menghormati dan membesarkan ilmu dan pemiliknya.

حَقَّهُ لِعَالِمِنَا وَيَعْرِف صَغِيْرَنَا وَيَرْحَمْ كَبِيْرَنَا يُجِلَّ لَمْ مَنْ مِنَّا لَيْسَ

> Artinya *“Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda dari kami serta tidak mengenal hak orang alim dari kami.”*(Hadits AlJami)[58]

Selain itu, berbicara mengenai budaya politik, budaya politik dapat berasal dari aspek tertentu, seperti adat, pengetahuan serta norma masyarakat. Hasil pemahaman, pembelajaran maupun analisis dalam kurun waktu tertentu oleh masyarakat yang akhirnya membentuk budaya.

Sifat budaya yang berkembang di masyarakat indonesia sekarang adalah mixed political culture. Selain mempunyai budaya bertipe parokial, juga memegang partisipan. Adapun

[58] Referensi : https://almanhaj.or.id/57311-menghormati-orang-lain.html

mengenai budaya poliktik ini berasal dari aspek tertentu, seperti adat, pengetahuan serta norma masyarakat. Hasil pemahaman, pembelajaran maupun analisis dalam kurun waktu tertentu oleh masyarakat yang akhirnya membentuk budaya.

Sifat budaya yang berkembang di masyarakat indonesia sekarang adalah mixed political culture. Selain mempunyai budaya bertipe parokial, juga memegang partisipan.

Menurut para ahli, budaya politik masyarakat Indonesia tidak hanya menganut satu tipe saja. Parokial bisa dilihat dari kurangnya partisipasi warga negara terhadap kegiatan bidang ini. Kurangnya partisipasi ini bisa karena banyak hal.

Secara umum, kasus tersebut bisa ditemui pada wilayah masyarakat yang sulit dijangkau, seperti pedalaman gunung, pesisir maupun desa terpencil. Selain itu bisa juga karena faktor lain, seperti ekonomi, rendahnya pendidikan maupun sarana prasarana.

Sedangkan budaya politik di Indonesia partisipan bisa dilihat dari aktifnya peran masyarakat yang membuka suara setiap ada aktivitas politik. Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak rakyat.

Berdasarkan buku yang berjudul Mengenal Ilmu Politik karya Ikhsan Darmawan, terdapat tiga tipe budaya bidang ini. Budaya politik di Indonesia masuk ke dalam tipe yang sudah disebutkan sebelumnya.[59]

Tiga tipe tersebut antara lain: *Pertama Parokial,* Parokial mempunyai cakupan daerah terbatas. Jadi, lingkupnya kecil

[59] Budaya Politik di Indonesia. https://fahum.umsu.ac.id/budaya-politik-di-indonesia/

dalam zona daerah. Parokial menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam kegiatan bidang ini rendah. Biasanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tradisional atau berada di wilayah terpencil, sehingga sarana untuk ikut berpartisipasi pun kurang memadai. Parokial ditandai dengan kurang tertariknya warga mengenai masalah politik.

Ciri dari parokial yaitu masyarakat apatis, ruang lingkup sempit dan kecil, pengetahuan warga mengenai aspek ini termasuk kategori sangat rendah, masyarakat tidak memperdulikan bahkan menarik diri dari kawasan politik.

Ciri lainnya yaitu masyarakat jarang sekali berhadapan dengan sistem ini, kesadaran warga mengenai kewenangan serta kekuasaan negara sangat rendah. Jadi, intinya budaya politik di Indonesia satu ini membuat rakyatnya kurang aktif berpartisipasi.

Kedua Partisipan, Budaya politik di Indonesia partisipan ditandai dengan kesadaran rakyat untuk i9kut berpartisipasi dalam kegiatan aspek ini. Masyarakat pada partisipan sadar bahwa sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban terkait masalah politik.

Kontribusi aktif yang diberikan memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik. Apalagi mengingat masyarakat memang mempunyai peran dalam penetapan kebijakan tersebut, tidak hanya oleh penguasa saja.

Partisipan secara umum diterapkan pada wilayah yang sistemnya menganut demokrasi. Sebab, pada sistem ini, dalam

negara pemerintah serta masyarakat memiliki hak dan juga kebebasan setara.

Ciri-ciri dari partisipan yaitu masyarakat mempunyai kesadaran tinggi untuk aktif berperan terkait bidang ini dan sadar bahwa warga memiliki hak serta tanggung jawab terhadap kehidupan politik.

Ciri lainnya adalah rakyat tidak begitu saja menerima situasi yang ada, tapi secara sadar memberikan penilaian terhadap masalah terkait politik. Budaya politik di Indonesia jenis partisipan ini merupakan yang paling ideal bagi negara demokrasi.

Ada beberapa contoh budaya ini di masyarakat Indonesia, yaitu berpartisipasi dalam pemilu bagi yang memenuhi persyaratan ketentuan, ikut serta dalam forum untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai.

Aktifnya masyarakat dalam kegiatan bidang ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan negara, apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi. Jadi, budaya politik di Indonesia diharapkan tetap mampu membuat rakyatnya aktif berperan.

Ketiga Subjek, Terakhir adalah subjek, di mana masyarakat tidak sadar dan kurang perduli mengenai sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Warganya lebih tertarik terhadap hasil dari penyelenggaraannya. Sedangkan terkait proses, keterlibatan dan partisipasi termasuk rendah. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh dari warga terhadap sistem ini

sangat kecil. Masyarakat hanya menunggu kebijakan dari penguasa saja, tidak ikut andil di dalamnya.

Budaya politik di Indonesia diharapkan tetap mampu membuat masyarakatnya aktif berperan, apalagi mengingat sistemnya demokrasi.

> "…*karena sebenarnya yang paling pas untuk Bangsa Indonesia itu ya sistem demokrasi*" ucap Kiai Luthfi[60]

Maka begitulah budaya Indonesia, lebih cocok dan pas jika menggunakan sistem demokrasi. Selain itu, maksud dari budaya politik di Indonesia masih banyak oknum-oknum yang melakukan politik praktis. Hal inilah yang mestii dihindari dari dunia perpolitikan Indonesia.

Untuk melahirkan perilaku politik dan partisipasi politik yang baik / memadai, maka budaya politik yang harus dimiliki adalah tipe budaya politik partisipan, karena pada tipe inilah sosok warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya yang akan mendorong perilaku politik yang positif.

Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku individu sebagai aktor politik yang dikemukakan Surbakti yaitu :[61]

1. Lingkungan sosial politik yang tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian individu seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu

[60] Rekaman wawancara Kiai Luthfi
[61] https://lilisrinasanti.smk2pekalongan.sch.id/read/23/budaya-politik-di-indonesia

Faktor lingkungan sosial politik: *Langsung*: berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi individu secara langsung ketika hendak melakukan kegiatan seperti: cuaca, keadaan keluarga, kehadiran orang, suasana kelompok dan ancaman dengan segala bentuk *Tidak langsung*, berupa sosialisasi, internalisasi dan politisasi yang mempengaruhi struktur kepribadian atau sikap individu.

Hal yang paling utama dalam menyikapi adanya faktor-faktor yang memberikan pengaruh adalah kemampuan mengatur seefektif mungkin, sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif dalam kerangka perwujudan perilaku politik.

Dalam melaksanakan perilaku politik tidak boleh mengabaikan keberadaan aturan atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan negara seperti norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

C. Sikap Masyarakat Terhadap Politik Pondok Pesantren

Dalam bermasyarakat tentu tidak terlepas dari yang namanya sosialisasi. Dalam bersosialisasi sesama manusia, kita diharuskan mempunyai sikap-sikap yang tidak neko-neko alias tidak aneh-aneh. Rukum dalam bermasyarakat dilengkapi dengan sikap saling menghargai, menghormati, toleransi, tolong menolong, dan lain sebagainya.

Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai sikap-sikap santri yang seharusnya diterapkan. Tidak jauh dari itu, sikap masyarakat pun diharapkan dapat mencontoh dan

mendekati sebagaimana sikap santri yang mencontoh sikap akhlakul karimah Nabi Muhammad Saw., dalam kesehariannya.

Sebelumnya dijelaskan bahwa santri harus memiliki tiga sikap yang penting dalam memainkan peran pembangunan masyarakat. Menurut Kiai Lutfi, *Pertama*, santri Buntet Pesantren harus memiliki jiwa tasamuh (toleran) yang tinggi. Sebab, Rasulullah Saw., memaafkan orang-orang kafir yang hendak membunuhnya. Hal itu tidak lain karena sifat tolerannya dalam menghargai perbedaan.

"Jangan jadikan perbedaan pemecah belah bangga," kata Kiai Lutfi dengan penuh ketegasan pada Malam Puncak Peringatan Hari Santri 2022 di halaman Masjid Agung Buntet Pesantren Cirebon, Jawa Barat.[62] *Kedua,* santri Buntet Pesantren harus berimbang (tawazun) dalam segala aspek kehidupan. "*Ibadah terus salah. Kerja terus jelek,"* katanya

Mengutip sebuah maqalah, Kiai Lutfi menegaskan, bahwa santri Buntet Pesantren harus bekerja untuk dunia seakan-akan hidup selamanya, dan beramal untuk akhirat seakan-akan mati esok. Artinya, santri harus imhang antara kehidupan dunia dan akhirat, antara bekerja dan ibadah.

Ketiga, santri Buntet Pesantren harus bersikap tawasuth, memposisikan diri di tengah-tengah. Santri Buntet Pesantren tidak boleh memihak kepada salah satu dari kubu yang berseteru, kanan atau kiri. Justru, santri Buntet Pesantren harus mendamaikan.

[62]Syakir. https://www.nu.or.id/daerah/3-sikap-yang-harus-dimiliki-santri-dalam-berperan-di-tengah-masyarakat-kbvqC

Hal ini sudah diteladankan oleh Rasulullah Saw., dalam meletakkan kembali Hajar Aswad ke Ka'bah. Rasulullah menaruh surbannya dan meletakkan hajar aswad di atasnya. Masing-masing tokoh dari suku diminta untuk membawakan pojok surban itu sehingga semua suku berperan. Jika ketiga sikap ini tidak dimiliki, Kiai Lutfi menegaskan agar tidak perlu mengaku sebagai santri Pondok Buntet Pesantren.

Begitu pula sikap-sikap masyarakat sekitar, karena melihat akhlak santri Buntet dipastikan masyarakat pun tertular untuk mencontoh sikap-sikap yang diterapkan oleh santri setempat.

Termasuk dalam dunia perpolitikan, masyarakat hendaknya tidak menerapkan sikap Golput atau Golongan Putih. Karena dalam memilih pemimpin itu merupakan hak dan kewajiban bagi setiap individu. Kecuali apabila pilihan yang ada dianggap tidak layak, maka boleh saja untuk tidak memilih. Maksud dari tidak ada pilihan yang layak adalah pilihan yang dimana pemimpinnya sering menentang ajaran islam, dan besar mudharatnya apabila ia terpilih nanti.

> *"....Golput tidak boleh, karena wajib memilih pemimpin, kecuali sudah ditentukan bahwa pemimppin dianggap tidaklayak, maka tidak apa apa tidak dipilih. .. selama pemimpin tidak melarang perintah agama, maka masih maklum.."* Kata Kiai Luthfi

Namun, dapat kita lihat ada faktor apa saja yang terjadi dan alasan dibalik masyarakat memilih untuk golput dan perspektif islam pada goluput dalam pemilu.

Dilansir dalam artikel Golput dalam Perspektif Islam[63], munculnya sikap Golput ini setidaknya disebabkan oleh tiga faktor: *Pertama,* di dalam undang-undang negara kita ditegaskan bahwa keikutsertaan untuk ikut memilih hanyalah hak bagi warga negara, bukan sebagai kewajiban (Undang-Undang No.10/2008, pasal 19 ayat 1). Jika memilih pemimpin dianggap hanya sebagai hak, bukan sebagai kewajiban, berarti sah-sah saja hak tersebut tidak digunakan.

Kedua, karena sosok yang terpilih tidak pernah membawa perubahan yang signifikan, bahkan terkesan memperkaya diri sendiri, sehingga memunculkan sifat apatis pada sebagian masyarakat. *Ketig*a, faktor paham keagamaan. Menurut paham keagamaannya, sistim pemilu ataupun sistem demokrasi bukanlah cara Islami dalam memilih pemimpin. Pemilu menurut mereka adalah sistem thaghut (berhala) yang berasal dari Barat, dan haram untuk ditiru.

Dan Golput dalam pemilu perspektif Islam dikatakan bahwa Allah Swt., berfirman dalam Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

اَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَاِذَا اَهْلِهَاۙ اِلٰٓى الْاَمٰنٰتِ تُؤَدُّوا اَنْ يَأْمُرُكُمْ اللّٰهَ اِنَّ
بَصِيْرًا سَمِيْعًاۢ كَانَ اللّٰهَ اِنَّ ۗ بِهٖ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا اللّٰهَ اِنَّ ۗ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوْا

Artinya :*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil….*" (QS. An-Nisa' ayat 58).

[63] https://www.uin-suska.ac.id/blog/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/

Ayat ini cukup tegas menunjukkan pandangan Alquran dalam memilih pemimpin. Ayat ini dapat dianggap sebagai referensi untuk menjawab apakah memilih pemimpin merupakan hak atau kewajiban. Sasaran ayat di atas ditujukan kepada orang-orang mukmin agar memberikan amanah kepada orang-orang yang sanggup menjalankannya. Dengan demikian, memilih pemimpin secara otomatis include ke dalamnya, karena pemimpin adalah orang-orang yang dianggap cakap dalam menjalankan amanah.

Menurut Mahmud al-Nasafi di dalam tafsirnya "*Tafsir al-Nasafi"* mengatakan bahwa perintah di dalam ayat ini adalah perintah wajib untuk menjalankan amanah Allah yang telah dibebankan kepada manusia, dan termasuk juga kewajiban dalam memilih pemimpin.

Selain ayat di atas, Allah juga berfirman: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta para pemimpin di antara kalian…." (QS An-Nisa': 59).* Ayat ini menjelaskan hukum wajibnya menaati ulil amri (pemimpin), yaitu orang yang mendapatkan mandat untuk memerintah rakyat. Menaati kepala negara adalah wajib, berarti mengangkat pemimpin pun hukumnya wajib, karena jika pemimpin tidak ada, maka kewajiban untuk menaati pemimpin pun tidak bisa dijalankan.

Dengan demikian, hukum mengangkat pemimpin pun menjadi wajib. Imam at-Thabari (ahli tafsir) mengatakan, bentuk ulil amri pada ayat di atas diarahkan pada kekuasaan, setidaknya pemerintah sebagai kekuatan politik yang fungsinya mengurusi,

menangani, dan memerintah masyarakat. Maka makna kepatuhan dimaksudkan kepatuhan terhadap pemimpin (ulil amri), di mana kepatuhan demikian mungkin terlaksana bila didahului oleh upaya menegakkan suatu kepemimpinan. Tujuannya tiada lain adalah demi kemaslahatan masyarakat, yaitu terealisasinya ad-daruriyah al-khamsah (keperluan dasar yang lima; menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta).

Dalam hal ini Nabi juga bersabda:

> *"Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara kalian menjadi pemimpinnya."* (HR Abu Daud).

Kalimat "bepergian" menunjukkan bahwa ketiga orang tersebut mempunyai urusan yang sama (umur musytarakah), yaitu sama-sama hendak bepergian, dan bepergian itu sendiri hukum asalnya adalah mubah (boleh-boleh saja). Dari kalimat tersebut bisa ditarik kesimpulan, jika dalam urusan yang mubah saja mengangkat pemimpin hukumnya wajib, tentu dalam perkara yang wajib lebih wajib lagi. Tiga orang saja sudah wajib untuk memilih pemimpin, apalagi dalam konteks negara besar yang berpenduduk jutaan jiwa seperti Indonesia ini.

Berdasarkan ayat dan hadis Nabi di atas dapat dipahami bahwa memilih pemimpin hukumnya adalah kewajiban, bukan sekadar hak, karena Allah menyuruh orang-orang mukmin untuk melakukannya. Kewajiban ini ditambah lagi dengan memilih pemimpin yang berlaku amanah. Sekiranya nilai amanah di antara calon pemimpin tidak ada yang sempurna, maka yang wajib dipilih adalah calon yang paling mendekati kesempurnaan.

Prosedur mendapatkan otoritas kekuasaan eksekutif dalam negara penganut sistem demokrasi adalah sah dan konstitusional, legitimit, dan kompetitif. Tidak ada jalan lain kecuali pemilu. Pemilu, bagian dari sarana menghasilkan pemimpin yang sesuai dengan standar tertentu.

Selain berdasarkan Alquran, dalam kaedah fiqih dikatakan: "*al-amru bi as-syai'i amru bi wasailih* (perintah mengerjakan sesuatu, berarti perintah mengerjakan sarananya)." Maksud aplikasi dari kaedah ini adalah, bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib, maka mengikuti pemilu sebagai sarana atau wasilah memilih pemimpin adalah wajib juga.[64]

[64]Golput dalam Perspektif Islam. https://www.uinsuska.ac.id/blog/2017/02/14/golput-dalam-perspektif-islam-am-mahmud/

BAB 6
PENGINTEGRASIAN ANTARA ILMU AGAMA DAN POLITIK

A. Islamisasi Ilmu

Islam secara bahasa berasal dari kata din yang berarti suatu ikatan yang dipegang dan harus dipatuhi yang dimana berasal dari kekauatan yang Maha Agung dari manusia sebagai mahkluk, sehingga segala halnya berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari.[65] Agama islam merupakan suatu agama yang setiap penganutnya dari berbagai macam negara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Contohnya budaya islam antara Indonesia, Mesir, Tunisia dan Pakistan. Istilah islamisasi ilmu untuk sebgaian kalangan tentu menjadi sesuatu yang kurang familiar untuk didengar. Hadirnya konsep islamisasi ilmu berakar pada adanya ketidakyakinan akan universal dan netralitas terhadap ilmu pengetahuan.

Hal ini berkaitan dengan peradaban Islam yang berkembang antara tahun 650 hingga 1000 M mampu membangun sebuah peradaban Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap peradaban Barat modern. kemajuan terjadi pada berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik agama maupun non agama. Di atas Ulama seperti: Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam al-Asy'ari, al-Kindi, al-Farabi. Dan beberapa ulama lainnya seperti Ibnu al-Haysam, al-Khawarizmi, al-Razi dan ilmuwan besar lainnya. Namun antara tahun 1250 dan 1800 M,

[65] Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. VIII, 2003), 10

umat Islam mulai mengalaminya kegagalan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan yang diikuti dengan kekalahan dalam kehidupan intelektual, moral, budaya, budaya dan ideologi.[66]

Dikotomi ilmu pengetahuan merupakan hal yang selalu diperdebatkan di dunia Islam sejak kemunduran Islam hingga saat ini. Islam memandang sains sebagai konsep yang komprehensif. di dalam Dalam konsep ini tidak ada perbedaan antara pengetahuan dan nilai.

Apalagi jika kita mencermati bagaimana Islam memandang ilmu pengetahuan Informasinya, maka Islam diklaim kembali ke alam orang mencari informasi. Ada banyak di antaranya dalam Al-Qur'an menemukan ayat yang menjelaskan ilmu pengetahuan dan menyeru umat Islam Pelajari itu Tidak ada keraguan bahwa Al-Qur'an adalah sumbernya Sains. Al-Qur'an diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk dan petunjuk petunjuk untuk menganalisis setiap kejadian di alam inspirasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Secara historis, dapat diketahui bahwa dunia Islam pernah mencapai prestasi. Masa kejayaan dan kejayaan, ditandai dengan bertambahnya ilmu pengetahuan pengetahuan dan filsafat menjadi mercusuar baik di Barat maupun di pedalaman Timur. Ilmuwan dan filsuf tingkat lanjut muncul pada Abad Pertengahan dunia dalam berbagai bidang. Dan bidang fiqih dikuasai oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam

[66] Muhaimin, et al, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, (Jakarta: Kencana, 2005), 226-227.

Abu Hanifah tampil dalam bidang filsafat Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Sina, sedangkan Ibnu tampil di bidang ilmu pengetahuan Hayyan, al-Khawarizmi dan Ar-Razi.[67]

Para filsuf dan cendekiawan Muslim tidak pernah membedakan pencerahan pengetahuan dan agama. Mereka percaya pada sains dan agama Islam secara keseluruhan dan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan orang lain. Sebuah kenyataan yang kini terlihat, cendekiawan Muslim cenderung membedakan kedua ilmu berdasarkan jumlah istilahnya yang mereka gunakan dalam literatur yang berbeda. Oleh karena itu muncullah karya buku ini berkaitan dengan konsep sains Islam sebagaimana yang terjadi perbedaan pengetahuan (dikotomi) pengetahuan, apa penyebab terjadinya, serta apa upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi diktnomi ilmu pengetahuan tersebut.

Epistemologi Islam mengandung konsep holistik pengetahuan Dalam konsep ini, pengetahuan tidak penting dengan nilai-nilai. Informasi berkaitan dengan fungsi sosialnya dan dianggap sebagai sifat manusia. Jadi tepat satu kesatuan antara manusia dan ilmunya. Tidak ada informasi spesifik yang tidak mempunyai nilai untuk tujuan tertentu. Tidak ada merendahkan martabat manusia, mengucilkan dan meminggirkan masyarakat.

Al-Qur'an juga menekankan bahwa umat Islam mencari ilmu bisa dilakukan dengan cara menjelajahi atau mengeksplor alam semesta ini derajatnya tinggi di hadapan Allah, bahkan

[67] Harun Nasution, Pembaruan dalam Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) h.13

tidak setara dengan orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak tahu. Sebagaimana firman Allah Swt., dalam Qs. Al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

> Artinya : *"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (Qs. Al-Mujadalah ayat 11).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam tidak pernah berasumsi dikotomi sains dan agama. Sains dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Ziauddin Sardar juga memberikan artikulasi terbaiknya tentang ilmu yang diperolehnya dalam buku tentang epistemologi informasi tentang karya Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghazali (1058-1111). AlGhazalia adalah kepala sekolah Akademi Nizamiyyah di Bagdad. Al-Ghazali menganalisis informasi berdasarkan tiga kriteria:

Pertama, sumber yang dimaksud adalah sumber yang berasal dari pengetahuan yang diwahyukan biasanya yang mendapatkan hal ini adalah manusia pilihan Allah yaitu Rasul dan para nabi. Selanjutnya sumber ilmu yang tidak diwahyukan misalnya sumber pokok yang berasal dari ilmu-ilmu akal, pengamatan dan akultirasi (penyesuaian).

Kedua, kewajiban. Perihal pengetahuan yang dowajibkan kepada setiap orang dikatakan fardu ain (etika sosial, kesusilaan dan

hukum sipil). Kemudian ada pengetahuan yang diwajibkan dan dibebankan kepada masyarakat(fardu kifayah yaitu pengetahuan yang sangat penting untuk keselamatan banyak pihak, misalnya pertanian, obat-obatan/farmasi, arsitektur dan teknik mesin.

Ketiga fungsi sosial, terasuk kedalam ilmu yang patut untuk dihargai seperti ilmu sains yang berguna untuk kehidupan sehari-hari dan keberadaanya tidak boleh diabaikan. Selain itu ada ilmu-ilmu seperti astrologi, ilmu perang, ilmu genetika dan lain-lain yang memiliki pengetahuan lebih kecil manfaatnya dibandingkan mudharatnya.

Dari kerangka keilmuan di atas kita memahami bahwa agama dan sains tidak ada sebagai dua budaya yang terpisah, namun sebagai dua budaya sebuah pilar yang rasa solidaritasnya berasal dari seluruh budaya seorang pria Jadi dalam kerangka ini informasi bisa bersifat dinamis dan dinamis statis Bentuk informasi berkembang sedikit demi sedikit pengetahuan tertentu (sains), sedangkan ada juga kesadaran akan keabadian informasi dasar yang diperoleh dari notifikasi.

A. Antara Ibadah dan Amaliyah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mencapai lompatan besar dari waktu ke waktu waktu abad terakhir. Dengan perkembangan ini, beberapa perangkat telah berubah kehidupan manusia dari zaman tradisional hingga zaman modern. Pria itu memerintahkan mengembangkan dan mencari informasi yang baik dari sumbernya wahyu atau hakikat. Ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan wajah baru dalam kehidupan manusia sebagai khalifah duniawi, tapi kalau tidak didasari nilai agama ya tidak, tidak mungkin ilmu pengetahuan adalah bumerang yang menghancurkan pria itu sendiri. Di sisi lain, sains mendorong efisiensi dan efisiensi kerja,

namun di sisi lain penggunaannya seringkali berbasiskan dengan alasan dan bukan dengan iman.

Salah satu akibat dari era globalisasi adalah kemerosotan moral generasi generasi muda muslim dimana nilai-nilai akhlak Islam menjadi nilai yang rendah apa yang indah dipandang mata, terasa enak di badan, namun jauh dari kredibilitas. Salah satu yang menyalahi adalah politik uang, manipulasi data pemilihan umum juga beberapa kasus pelanggaran yang ada di dalam dunia perpolitikan.

Sistem Politik masalah aktual, karenasetiap orang yang ingin berurusan dengan suatu negara lain, penting mengetahui tentang sistem politik negara yang dituju, misalnya negara-negara asean saja sudah terdapat bervariasi mengenai sitem politik negaranya, oleh karena itu seringkali menemui kesulitan tatkala ingin membicarakan mengenai masalah hak asasi manusia misalnya negara-negara Eropa Kontinental, Negara-negara Amerika Anglo Saxon, Negara-negara Amerika Latin, Afrika, Negara-negara Islam dan di Asia, Negara-negara berhaluan komunis, berbeda sistem politiknya satu dnegan yang lain.

Sistem politik suatu negara tentu mengikuti suatu paham politik sendiri dengan ideologi negara masing-masing negara, ada yang eksplisit dan ada yang tidak eksplisit.

Aktual karena bagi setiap warga negara harus mengetahui sistem politik negaranya masing-masing sebagai wujud kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Aktual karena pentingnya melihat bahwa tujuan negara yang secara eksplisit terdapat dalam dokumen perUndang-undangan mempunyai arti hukum positif dan karenanya tidak ada pilihan lain. Dan sistem atau organisai dibangun berdasarkan dasar dan tujuan negara kita Pancasila.

Setelah mempelajari berbagai Teori Sistem Politik, tentu anda sudah dapat menjelaskan landasan teori yang dipilih dan tentu sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab yang terutama harus mengetahui sistem politik Negara Pancasila kita ini.

Kyai Lutfi memberikan pandangan bahwa sejatinya agama dan politik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Keduanya tak bisa dipisahkan karena hadirnya memang untuk saling melengkapi.

B. Orientasi Amaliyah harus Kepada Ibadah

Proses modernisasi merupakan proses alamiah sejalan dengan naluri manusia yang selalu berkembang dan berubah yang umumnya menuju ke arah kemajuan. Proses modernisasi yang sudah berlangsung sejak abad pencerahan ini ditandai dengan dominannya rasionalisme dan ilmu pengetahuan serta industrialisasi. Meski terdapat variasi tentang definisi kemodernan ini, paling tidak ada beberapa kriteria yang dikemukakan oleh para sarjana, yakni: tingkat pertumbuhan keberlanjutan *(self-sustaining growth)* dalam ekonomi, tingkat partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara, penyebaran norma-norma sekuler-rasional dalam kebudayaan, dan peningkatan mobilitas dalam masyarakat.[68]

Modernisasi ini hampir mencakup semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk bidang politik, sehingga dalam pembangunan politik pun disebut modernisasi politik.

Modernisasi politik merupakan suatu perubahan politik secara total baik secara struktural maupun kultural, meskipun proses perubahan

[68] 1 David L. Sills (ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*, vol. IX, (New York: The Macmillan Company & The Free Press, 1969), h. 387.

tersebut berbeda-beda dan tidak sama antara satu negara dengan negara lainnya. Perubahan politik tersebut mempengaruhi (atau mempengaruhi) proses modernisasi, yaitu sekularisasi, rasionalisasi, komersialisasi, industrialisasi, mobilitas sosial yang pesat, konstruksi; peningkatan materi taraf hidup, penyebaran literasi, pendidikan dan media; perluasan persatuan nasional dan partisipasi rakyat dalam politik.

Faktanya, modernisasi politik tidak selalu membawa pada kondisi yang positif, namun bisa juga mengarah pada kondisi yang negatif, meski dalam beberapa hal hal ini bisa sangat subyektif. Dalam konteks integrasi nasional misalnya, modernisasi politik di negara-negara Eropa Timur pada awal tahun 1990-an justru menimbulkan perpecahan nasional yang berujung pada terpecahnya negara menjadi beberapa negara. Di beberapa negara Islam, modernisasi politik berujung pada proses sekularisasi yang kuat, seperti yang terjadi di Indonesia pada masa awal Orde Baru, atau bahkan menjadikan sekularisme sebagai prinsip kehidupan bernegara, seperti yang terjadi di Turki yang didirikan oleh Kamal Atatürk. Namun kemudian kecenderungan ini terkoreksi dengan munculnya kebangkitan agama dan kuatnya perlawanan (resistensi) terhadap sekularisasi yang dapat menghilangkan jati diri bangsa.

Dalam konteks Indonesia, modernisasi politik ini sebenarnya sudah direncanakan sejak awal kemerdekaan, terbukti dari pembahasan-pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan-pertemuan pra kemerdekaan. Namun mengalami pasang surut sesuai dengan kecenderungan politik pemerintah. Modernisasi politik yang demokratis hanya terjadi pada masa reformasi tersebut, terutama dengan amandemen UUD 1945 yang membatasi kekuasaan presiden,

menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas, membangun sistem multi partai, menjamin kebebasan berpendapat yang lebih besar, dan lain-lain. Namun beberapa kebebasan berekspresi tersebut menimbulkan berbagai aspirasi dan sikap yang dapat mengancam keharmonisan sosial dan integrasi nasional, termasuk yang berkaitan dengan aspirasi dan ekspresi keagamaan.

Dalam praktik kehidupan kenegaraan masa kini, hubungan antara agama dan negara dapat diklasifikasikan kan ke dalam tiga bentuk, yakni *integrated* (penyatuan antara agama dan negara), *intersectional* (persinggungan antara agama dan negara), dan sekularistik (pemisahan antara agama dan negara. Bentuk hubungan antara agama dan negara di negara-negara Barat dianggap sudah selesai dengan sekularismenya atau pemisahan antara agama dan negara. Paham ini menurut *The Encyclopedia of Religion* adalah sebuah ideologi, di- mana para pendukungnya dengan sadar mengecam segala bentuk supernaturalisme dan lembaga yang di- khususkan untuk itu, dengan mendukung prinsip- prinsip non-agama atau anti-agama sebagai dasar bagi moralitas pribadi dan organisasi sosial.

Pemisahan agama dan negara tersebut memerlukan proses yang disebut sekularisasi, yang pengertiannya cukup bervariasi, termasuk pengertian yang sudah ditinjau kembali. Menurut Peter L. Berger berarti "sebuah proses di mana sektor-sektor kehidupan dalam masyarakat dan budaya dilepaskan dari dominasi lembaga-lembaga dan simbol-simbol keagamaan".4 Proses sekularisasi yang berimplikasi pada marjinalisasi agama ini bisa berbeda antara satu negara dengan negara lainnya, yang terutama dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sejarah masing-masing masyarakatnya. Negara-negara yang mendasarkan diri pada

sekularisme memang telah melakukan pemisahan ini, meski bentuk pemisahan itu bervariasi. Penerapan sekularisme secara ketat terdapat di Perancis dan Amerika Serikat, sementara di negara-negara Eropa selain Perancis penerapannya tidak terlalu ketat, sehingga keterlibatan negara dalam urusan agama dalam hal-hal tertentu masih sangat jelas, seperti hari libur agama yang dijadikan sebagai libur nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja, dan sebagainya. Bahkan, sebagaimana dikata- kan Alfred Stepan, kini masih ada sejumlah negara Eropa yang tetap mengakui secara resmi lembaga gereja *(established church)* dalam kehidupan bernegara, seperti Inggris, Yunani, dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia.[69]

Sekularisasi politik juga terjadi sehubungan dengan modernisasi politik di negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Islam. Terkait hal ini, Donald Eugen Smith beberapa dekade lalu mengatakan bahwa sekularisasi politik dan masuknya agama ke dalam politik sebenarnya terjadi pada saat yang bersamaan. Namun menurutnya, sekularisasi ini sebenarnya merupakan proses yang lebih mendasar yang secara bertahap menghilangkan fenomena partai politik dan ideologi agama.6 Sekularisasi politik dalam kasus tertentu dan pada tingkat tertentu terjadi di negara-negara Islam, misalnya lembaga negara modern yang mewadahinya. sistem demokrasi yang menggantikan lembaga-lembaga negara berdasarkan agama, partai politik, penyelenggaraan pemilihan umum, dan lain-lain. Bahkan, proses sekularisasi terbatas juga terjadi di negara-negara keagamaan yang

[69] Alfred Stepan, The World's Religious Systems and Democracy: Crafting The "Twin Tolerations

memadukan agama dan negara, seperti Arab Saudi dan Iran, dengan memberlakukan aturan perilaku tertentu yang aslinya berasal dari negara-negara Barat yang sekuler, seperti peraturan perdagangan internasional dan imigrasi. , dan seterusnya.

Namun kenyataannya, umat Islam masih memperhatikan faktor agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun modernisasi politik dan sekularisasi juga telah diterapkan di tanah air seiring dengan proses globalisasi. Hal tersebut sebenarnya tidak terlepas dari ciri-ciri ajaran Islam yang tidak hanya sekedar sistem teologis, namun juga merupakan pandangan hidup yang memuat norma-norma moral, etika, dan norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam tidak membedakan secara utuh antara perkara sakral dan profan, oleh karena itu umat Islam yang taat menolak pemisahan agama dan negara. Oleh karena itu, sekularisasi negara-negara Islam biasanya tidak menghilangkan orientasi keagamaan masyarakat dan negara. Bahkan penerapan sistem sekuler seperti sistem demokrasi dan kepatuhan terhadap hak asasi manusia dicapai dalam banyak kasus dengan memberikan legitimasi agama melalui ijtihad dan adaptasi tertentu.

Tanpa legitimasi ini, ide-ide atau "sistem sekuler" ini tidak akan mendapat dukungan penuh dari warga mayoritas Muslim. Ijtihad tersebut merupakan bagian dari modernisasi pemahaman keagamaan (Islamic modernism) untuk mempertahankan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan masyarakat modern tanpa melanggar ajaran fundamental dan absolut (qat'î) Islam.

Menguatnya orientasi keagamaan dan penolakan terhadap sekularisme telah menjadi fenomena seluruh dunia Islam sejak akhir tahun 1970-an, terutama disebabkan oleh meningkatnya tingkat

pendidikan umat Islam yang membuat mereka memahami dan menyadari ciri-ciri ajaran Islam tidak memisahkan agama dan negara. Padahal, sejak tahun 1980an, kebangkitan agama dalam bentuk sekularisasi politik dan sosial sudah cukup terlihat di negeri ini, berbeda dengan proses sekularisasi politik, mereka hidup dalam masyarakat modern yang menjunjung rasionalitas. Oleh karena itu, sosiolog terkemuka Peter L. Berger menolak teori "sekularisasi" pada akhir tahun 1990-an dan malah mengajukan teori "sekularisasi dunia". Hal ini terjadi karena nyatanya proses sekularisasi menimbulkan reaksi berupa gerakan anti sekuler yang kuat. Dengan demikian, teori ini merupakan versi teori sekularisasinya sendiri, yang dikemukakan pada akhir tahun 1960an. Namun perlu dibedakan antara sekularisasi dalam konteks bernegara (politik) dan sekularisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Di negara-negara Barat, fenomena sekularisasi ini biasanya terjadi dalam konteks kehidupan bermasyarakat, sementara negara tetap mendukung sekularisme, meski sebagian warga menuntut penghapusan sekularisme.

Sekularisasi juga terjadi di Indonesia pada akhir tahun 1980-an, bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Orde Baru yang pada awalnya mendukung sekularisasi sesuai dengan proses modernisasi dan pembangunan. Sekularisasi politik yang mengusung tema “de-ideologisasi politik” menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas yang berdampak pada pelarangan simbol agama dalam politik. Meskipun proses sekularisasi politik saat itu sangat kuat, namun belum terjadi sekularisasi yang signifikan di masyarakat karena umat Islam masih memasyarakatkan ajaran agama secara agama dan budaya. Sekularisasi ini antara lain ditandai dengan adanya revisi kebijakan pemerintah untuk memenuhi keinginan sebagian umat Islam, seperti

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang memungkinkan pendidikan agama dan UU No. 7/1992 yang mengatur tentang perbankan, dimana kegiatan bank meliputi sistem bagi hasil (perbankan syariah).

Berakhirnya masa Orde Baru dan munculnya Era Reformasi pada 1998, yang mendukung kebebasan dan demokrasi, dijadikan sebagai momentum bagi tokoh Islam untuk mempromosikan kembali politik Islam dengan mendirikan partai-partai Islam atau berbasis massa ormas Islam. Namun belajar dari sejarah perjuangan masa lalu untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara seperti yang terjadi dalam persiapan kemerdekaan pada 1945 dan dalam Konstituante pada 1956-1959, mereka tidak mengulangi lagi perjuangan serupa. Memang di awal-awal era reformasi sempat muncul gagasan dan perdebatan dalam konteks amandermen UUD 1945 untuk memasukkan se- mangat Piagama Jakarta atau pelaksanaan syariat Islam dalam konstitusi, tetapi gagasan atau usulan itu tidak bisa diterima oleh MPR. Meski demikian, hampir semua kelompok Islam mendukung modernisasi politik dan demokratisasi, dan hanya sebagian kecil yang menolaknya.[70]

Dengan demikian, baik dalam pendekatan sistem ketatanegaraan maupun dalam realitas yang ada saat ini, hubungan agama dan negara di Indonesia masih dalam bentuk yang lain (interseksional), yaitu hubungan interseksional antara agama dan negara, yang artinya tidak ada satu pun yang bersifat interseksional. . terintegrasi penuh. atau sepenuhnya terisolasi. Dalam hubungan demikian, ada aspek keagamaan yang diwujudkan dalam negara, dan ada pula aspek negara

[70] Ismail Suny, *Mekanisme Demokrasi Kita*, edisi VI, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), h. 7-8.

yang diwujudkan atau memerlukan legitimasi agama. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa Indonesia bukanlah negara agama dan bukan negara sekuler. Indonesia merupakan negara yang secara institusi sekuler, namun secara filosofis mengakui keberadaan agama dalam kehidupan bernegara. Padahal, agama sebagai dasar negara secara tegas disebutkan dalam Pasal 29(1), yaitu: "Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan sila pertama dan Pasal 29 Pancasila, beberapa ahli hukum tata negara seperti Ismail Suny berpendapat bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal tiga bentuk kedaulatan, yaitu kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum, dan kedaulatan Tuhan. Namun hanya dua hak kedaulatan yang diakui secara resmi dan dilaksanakan dalam bentuk lembaga negara, yaitu Dewan Kedaulatan Rakyat Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Konstitusi Kedaulatan Kehakiman (MK).

Pengakuaan akan eksistensi agama dalam kehidup- an bernegara diwujudkan terutama dalam bentuk pe- ngakuan resmi lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara serta adopsi nilai-nilai dan norma- norma agama dalam sistem nasional dan pengambilan kebijakan publik, seperti legislasi hukum-hukum agama (Islam) tertentu menjadi hukum nasional. Di samping itu, negara juga mengakui eksistensi partai-partai politik dan organisasi-organisasi massa yang berbasis agama. Hanya saja, kini terdapat perkembangan yang menarik dalam orientasi politik warga yang sekaligus menggabungkan antara proses sekularisasi dan desekularisasi. Di satu sisi, terjadi desekularisasi politik dengan munculnya kembali partai-partai agama (Islam) dan akomodasi nilai-nilai dan norma-norma agama dalam pengambilan kebijakan publik. Namun di sisi lain terjadi perubahan orientasi politik warga santri yang

tidak otomatis mendukung partai-partai Islam tetapi justru banyak mendukung partai-partai nasionalis.

Sebagaimana disebutkan di atas negara mengakui keberadaan lembaga keagamaan dalam negara dan masyarakat. Namun, pendapat dan aspirasi warga berbeda-beda mengenai sejauh mana partisipasi keagamaan di suatu negara.

Dalam konteks ini, orientasi warga negara terhadap agama dalam konteks kehidupan bernegara cukup bervariasi, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, agama sebagai ideologi, yang didukung oleh pihak-pihak yang ingin menjadikan agama sebagai ideologi negara, diwujudkan dalam penerapan formal ajaran agama (Syariah dalam konteks Islam) sebagai hukum positif. Orientasi kelompok ini terhadap agama lebih besar dibandingkan orientasinya terhadap visi nasional, sehingga dapat menimbulkan dilema ketika dihadapkan pada realitas bangsa yang majemuk. Selain itu, kelompok ini umumnya mempunyai sikap absolut dan eksklusif terhadap agama, selain terkadang mempolitisasi agama untuk mendukung cita-citanya.

Kedua, agama sebagai sumber etika dan moralitas (morality), yang dianjurkan oleh mereka yang lebih berorientasi kebangsaan dibandingkan agama. Orientasi ini hanya mendukung penerapan etika keagamaan (religiousetics) dan menolak formalisasi agama dalam konteks kehidupan bernegara. Kedudukan agama sebagai sumber pembentukan etika-moral dimaksudkan agar bangsa ini mempunyai landasan filosofis etika-moral yang jelas, bukan sekedar kriteria baik dan buruk yang terkadang bersifat sangat subyektif atau sangat temporal. Di sisi lain, orientasi seperti ini membawa hal positif karena dapat meredakan ketegangan antara kelompok Islam dengan kelompok

lain serta sangat mendorong terlaksananya integrasi bangsa yang majemuk ini. Namun di sisi lain, orientasi tersebut belum cukup adaptif terhadap upaya umat beragama tertentu yang berusaha melaksanakan ajaran agama semaksimal mungkin.

Ketiga, agama sebagai sumber sub-ideologi atau ideologi, jika kata "sub-ideologi" dianggap sebagai penyebab tersingkirnya suatu kelompok sosial. Arah pertama sangat idealis dalam konteks Islam, namun kurang realistis dalam konteks masyarakat dan bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Pada saat yang sama, kecenderungan kedua dalam konteks pluralisme Indonesia sangat idealis, namun kurang realistis dibandingkan mayoritas agama Islam, yang ajarannya tidak hanya bersifat etis dan moral, tetapi juga seperangkat norma dasar. Tarikan yang kuat ke salah satu arah ini akan menyebabkan tarikan yang lebih kuat lagi ke arah yang berlawanan dan bahkan mungkin menimbulkan konflik internal yang lebih besar. Oleh karena itu, perlu ada jalan tengah di antara keduanya, yakni menjadikan agama sebagai sub-ideologi atau salah satu sumber ideologi Pancasila.

Kecenderungan ketiga lebih realistis dan moderat, karena walaupun kecenderungan ini berusaha menerapkan etika moral dan hukum agama atau asas-asasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, namun tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi negara. Karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka dan fleksibel, maka agama wajib ikut serta dalam perumusan konsep-konsep fungsional di berbagai bidang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan dunia. Dalam hal ini, nilai dan norma agama mendapat masukan dan legitimasi dalam membentuk dan memperkuat etika dan moralitas, serta sistem nasional dan kebijakan publik. Selain itu, kecenderungan ini

mendukung pluralisme dan toleransi yang tinggi terhadap keberagaman bangsa, sehingga seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang setara.

Pelibatan agama dalam penguatan etika-moral (akhlak) bangsa saat ini sangat dibutuhkan, terutama ketika kondisi akhlak bangsa ini secara umum masih sangat lemah, seperti maraknya kebohongan, korupsi, penipuan, kekerasan, radikalisme, pemerkosaan, egoisme, keserakahan, dan sebagainya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun kehidupan politik, hukum, dan birokrasi. Demikian pula, kini semakin banyak terjadi kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, perkelaian antar kelompok, pergaulan bebas, pornografi, pornoaksi, dan sebagainya. Penguatan akhlak ini kini menjadi sangat penting untuk memperkuat etika politik dalam proses konsolidasi demokrasi yang sudah berlangsung sejak tahun 2004 tetapi kurang berjalan dengan mulus, tidak seperti proses transisi demokrasi yang telah dilewati dengan sukses antara tahun 1998 sampai 2004.[71]

Selain itu, agama merupakan sumber atau masukan dalam pengambilan kebijakan publik, agar peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik sesuai atau tidak bertentangan dengan ajaran agama (Islam) serta sesuai dengan keinginan masyarakat. Pada kenyataannya ajaran agama mengandung nilai-nilai dan norma-norma tertentu di samping nilai-nilai universal, sehingga aspirasi masyarakat kadang bersifat umum (umum) dan kadang bersifat khusus (spesifik). Namun seringkali aspirasi Islam diidentifikasi hanya dalam bentuk aspirasi tertentu (konkret), sehingga gerakan-gerakan Islam yang muncul

[71] Harold Chrouch, *Political Reform in Indonesia after Soeharto*, (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2010), hlm.35

cenderung menggunakan tema-tema aspirasi tertentu yang sebenarnya bersifat ideologis atau “fundamental”. Menurut ajaran Islam, hal tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang termuat dalam cita-cita yang bersifat khusus, melainkan juga cita-cita yang bersifat umum (universal). Sebagaimana diketahui, filsafat ajaran Islam (maqâsid al-syarî'ah) bertujuan untuk melestarikan dan menghormati lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, kekayaan, dengan kata lain melestarikan dan meningkatkan eksistensi manusia dan perekonomian, kesehatan. , pendidikan, perumahan dan makanan.

Dalam konteks ini, penerapan hukum agama (Syariah Islam) seringkali menjadi perdebatan terus menerus baik sebelum kemerdekaan maupun keberadaan Piagam Jakarta hingga saat ini. Sebagaimana disebutkan di atas, pada amandemen UUD 1945 tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002, beberapa kelompok Islam menganut Piagam Jakarta atau hukum Islam secara keseluruhan. Namun, saat pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya Pasal 29, mayoritas anggota MPR tidak mendukung aspirasi tersebut. Bahkan ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pun tidak setuju. Dengan demikian, perdebatan berkepanjangan yang dapat menimbulkan perselisihan dan konflik antara pendukung dan penentang penerapan syariat Islam (kâffah) secara komprehensif dapat dihindari dan dapat mengancam integrasi nasional.

Dengan demikian, penerapan hukum Islam dalam hukum domestik terjadi melalui tiga cara sesuai dengan kecenderungan ketiga yang disebutkan di atas. Pertama, penerapan hukum syariah secara resmi, yaitu terkait dengan hukum privat tertentu seperti hukum

keluarga, zakat, dan haji yang undang-undangnya ada saat ini, serta wakaf dan perbankan syariah.

Kedua, penerapan hukum syariah secara substantif, yaitu menurut hukum privat selain yang disebutkan di atas, yang sebagian besar justru sesuai dengan isi atau materi hukum Islam, dan hukum publik, sebagian juga sesuai dengan isi hukum Islam. Hukum Islam, seperti hukuman mati. untuk tindak pidana pembunuhan yang hakikatnya sama dengan qisâs.

Ketiga, pelaksanaan syariah secara esensial, jika pe- laksanaan secara substantif sulit diwujudkan dalam konteks masa kini, misalnya hukuman penjara bagi tindak pidana pencurian, yang secara esensial sudah sesuai dengan hukum Islam, yakni bahwa pencurian merupakan tindak kejahatan yang harus dikenakan sanksi. Pelaksanaan secara esensial ini dilakukan dengan memahami filosofi atau prinsip-prinsip syariah, yang meliputi tujuan hukum Islam *(maqâsid al-sharî'ah)* dan rahasia yang terdapat dalam suatu hukum tertentu *(asrâr al-tashrî')*.

Penerapan syariah secara substantif atau substantif diupayakan melalui integrasi atau pengadopsian prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik suatu negara. Upaya mengintegrasikan ajaran agama ke dalam sistem nasional sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh Islam saja, melainkan merupakan hak semua agama di Indonesia. Tentu saja upaya ini harus dibarengi dengan objektifikasi ajaran Islam, sehingga pelaksanaan ajaran tersebut tidak hanya dipahami sebagai ketundukan Islam kepada Allah (ta'abudî), namun memang diwajibkan sebagai kaidah umum. dan dapat diterima secara wajar (ta'aqqulî) oleh semua pihak. Objektifikasi ini perlu mendapat perhatian karena pada prinsipnya peraturan yang

baik di suatu negara adalah peraturan yang dapat disetujui oleh semua pihak, dan bukan hanya karena terpaksa mengikuti kelompok mayoritas. Jadi, berbeda dengan bentuk penerapan pertama yang hanya berlaku bagi umat Islam, bentuk penerapan kedua dan ketiga menjadikan hukum Islam sebagai bagian integral atau bagian dari hukum domestik, sehingga secara efektif menjadi ketentuan hukum bagi semua orang.

Bentuk pemaksaan ini merupakan jalan tengah antara pihak yang mendukung pemaksaan penuh dan pihak yang menentang formalisasi hukum Islam secara penuh. Sejauh ini, cara emas tersebut telah berjalan, misalnya dengan hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, peraturan pengelolaan haji, zakat dan wakaf. Namun, sebagian orang menganggap hal ini tidak ideal, terutama dalam praktik keagamaan seperti beribadah, berpakaian dan membaca Al-Qur'an, serta maksiat seperti perzinahan, minuman keras, dan perjudian. Oleh karena itu, beberapa provinsi dan kabupaten/kota mencoba menyusun peraturan daerah (Perda) untuk mendorong terlaksananya ajaran Islam, seperti Gorontalo, Cianjur, Solok, Bulukumba, Tangerang, dll. Secara umum peraturan daerah tersebut tidak dianggap bertentangan dengan sistem hukum nasional, karena peraturan tersebut merupakan domain hukum privat, sedangkan larangan maksiat yang terdapat dalam peraturan daerah hanya memperkuat ketentuan hukum pidana. Perda tersebut bukanlah hukum syariah yang sebenarnya, melainkan hanya substansi dan sifatnya saja. Secara spesifik, Aceh diatur dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberi wewenang kepada Aceh untuk mengkhususkan diri dalam penerapan hukum Islam, yang kemudian dituangkan dalam Qanun (Peraturan) Aceh. Hal ini memang

merupakan bagian dari penyelesaian konflik jangka panjang di Aceh secara damai.

Sebagaimana disebutkan di atas, kriteria lain dari modernisasi politik adalah tingginya tingkat partisipasi rakyat dalam politik atau minimal dalam bentuk rep- resentasi demokratis dalam perumusan dan penetapan alaternatif-alternatif kebijakan publik. Partisipasi politik muncul disebabkan oleh sejumlah warga tertentu yang meyakini bahwa aspiraasi atau kepentingan mereka dapat dipenuhi atau setidaknya dihormati dalam pembuatan kebijakan publik dan penerapannya. Joel Krieger men- definisikan partisipasi politik ini sebagai tindakan yang dilakukan penduduk yang bertujuan mempengaruhi ke- putusan pemerintah. Partisipasi politik ini bisa berbentuk individu, kelompok-kelompok kecil, atau aksi massal. Hal itu mungkin berbentuk kepentingan pribadi yang sempit atu pengorbanan diri secara sekilas, sporadis, atau terus- menerus, spontan atau diatur sedemikian rupa, kerjasama atau konfrontasional, legal, damai, atau kekerasan. Hal ini mengandung pengertian bahwa partisipasi politik tidak hanya terdiri atas tindakan positif, tetapi juga terdiri atas tindakan negatif, termasuk tindakan kekerasan dan melangar hukum.[72]

Partisipasi politik konkrit terdiri dari kemampuan memilih dan berkampanye pada pemilu. Selain itu, partisipasi juga dapat mencakup lobi, protes, pemogokan, demonstrasi, petisi, pawai, boikot, dan bahkan kekerasan politik. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok seperti partai politik (politik masyarakat), masyarakat sipil seperti serikat pekerja dan ormas, atau kelompok masyarakat adat

[72] Joel Krieger (ed.), *British Politics in the Global Age*, *Journal of Democracy*, 2(2), hlm. 720.

seperti kelompok etnis dan daerah. Partisipasi politik merupakan salah satu indikator demokrasi, sehingga peningkatan partisipasi secara umum dianggap baik. Sebaliknya, partisipasi yang lebih sedikit dipandang sebagai hal yang buruk. Dalam masyarakat yang majemuk dan multikultural, tidak mudah untuk memenuhi segala keinginan dan kepentingan. Artinya, beberapa di antaranya mungkin tidak terpenuhi dan hal ini dapat menimbulkan kondisi yang tidak memuaskan sehingga dapat menimbulkan protes atau bahkan konflik dan kekerasan antar anggota kelompok sosial atau politik. Pemerintah Orde Baru menjadikan hal ini sebagai alasan untuk membatasi partisipasi masyarakat dari sebagian besar pemerintahan otoriter di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia pada masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berusaha menghilangkan konflik ini dengan menghilangkan partai-partai oposisi dan menganggap oposisi tidak sesuai dengan Pancasila. Bahkan kritik terhadap pemerintah yang dilakukan oleh individu dan organisasi seringkali dianggap sebagai oposisi sehingga harus diredam.

Jatuhnya pemerintah Orde Baru dan munculnya era reformasi, yang mendukung demokrasi secara substantif, memberikan kebebasan warga untuk berekspresi dan berasosiasi sebagai bagian dari partisipasi politik, termasuk kritik dan oposisi terhadap pemerintah. Jika pada masa Orde Baru, oposisi itu dianggap sebagai bertentangan dengan ideologi negara, maka pada era reformasi opisisi ini justru dianggap sebagai suatu keniscayaan dalam sebuah demokrasi, karena pemerintah harus selalu dikontrol agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan dan penyalahgunaan kekuasaan. Tentu saja, oposisi yang dimaksud bukanlah oposisionalisme melainkan opisisi loyal. Oposisionalisme,

yang lazimnya bersifat destruktif, menggunakan prinsip bahwa setiap persoalan yang berasal dari pemerintah pasti dianggap salah dan oleh karenanya harus ditolak. Sebaliknya, oposisi loyal dan konstruktif menggunakan prinsip bahwa jika kebijakan pemerintah yang diputuskan itu sejalan dengan aspirasi politiknya untuk menciptakan kesejahteraan dan ke- adilan sosial, ia harus dianggap benar.[73]

Pemerintahan reformis tidak membatasi partisipasi politik masyarakat, namun mengarahkan agar upaya tersebut dapat diarahkan dengan baik melalui optimalisasi fungsi partai politik dalam peran komunikasi politik (sosialisasi dan artikulasi serta penyatuan kepentingan politik) dan masyarakat sipil. elemen) memenuhi perannya sebagai penghubung dan kelompok penekan. Selain itu, proses politik dalam sistem demokrasi, seperti pemilihan umum dan pengambilan keputusan publik, yang dilakukan secara bebas dan terbuka, dirancang agar konflik-konflik tersebut dapat dikelola dan diselesaikan secara beradab melalui badan legislatif dan yudikatif. Pemilu yang dilaksanakan pada masa reformasi cukup baik dan demokratis, oleh karena itu Indonesia termasuk negara paling demokratis ketiga di dunia, meskipun dalam banyak hal masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilu daerah, misalnya dalam hal pemilihan umum dan pemilihan umum. penipuan, manipulasi suara, kebijakan moneter, konflik, dll.

Meski di era reformasi ini umat Islam dapat meng- ekspresikan aspirasinya dengan bebas tanpa ada tekan- an dan ancaman serta banyak aspirasi umat yang diakomodasi oleh negara, ormas Islam masih bisa

[73] DennyJ.A. (ed.), *Menegakkan Demokrasi*, (Jakarta: Kelompok Studi Indonesia), h. 52.

ber- sikap kritis terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya. Di samping itu, terdapat pula kelompok atau organisasi Islam yang melakukan oposisi terhadap negara, karena negara ini belum melaksanakan syariat Islam secara *kâffah*. Di antara kelompok oposisi ini ada yang sangat radikal dan ekstrem, yang tetap menolak dan tidak mau terlibat dalam sistem yang ada, termasuk dalam pemilihan umum yang dianggap sebagai sistem *tâghût* (setan). Bahkan sebagian kelompok ini ada yang melakukan kekerasan dan teror atas nama jihad ter- hadap simbol-simbol kekuatan negara-negara tertentu (Barat) dan negara RI yang dianggap melaksanakan sistem Barat.20 Dengan demikian, hubungan politik umat Islam dan negara/pemerintah di era reformasi ini mengambil bentuk yang bervariasi, yakni ada yang kooperatif, kritis, oposisi, dan bahkan antagonistik.

Modernisasi politik merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan negara modern yang menerapkan sistem demokrasi yang lebih sejati. Namun, dalam konteks Indonesia yang didominasi Pancasila, modernisasi politik tidak mengarah pada negara sekuler, meskipun negara tersebut pernah mengalami sekularisasi politik pada waktu-waktu tertentu dan sampai batas tertentu. Sebab, Pancasila dan UUD 1945 secara tegas mengakui keberadaan agama dalam kehidupan bernegara, yang diwujudkan dalam penerimaan lembaga-lembaga keagamaan tertentu dalam negara dan penganut nilai-nilai dan norma-norma agama dalam sistem negara dan publik. . politik umum Dalam kondisi seperti ini, hubungan agama dan negara masih bersifat interseksi, artinya hubungan agama dan negara tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak terpisahkan sepenuhnya. Padahal, legitimasi

agama masih diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di sisi lain, modernisasi politik demokratis pada masa reformasi meningkatkan partisipasi rakyat dan munculnya partai politik baru, termasuk partai keagamaan (Islam). Pada awal reformasi, dukungan masyarakat terhadap partai Islam cukup tinggi, namun kemudian dukungan tersebut semakin menurun karena dinamika persepsi masyarakat terhadap Islam yang tidak identik dengan Islam, dan dinamika partai nasionalis. yang juga disesuaikan. cita-cita Islam. Pengungkapan kebebasan tersebut dalam beberapa kasus menimbulkan kontroversi dan konflik, terutama ketika masing-masing kelompok dengan egoisme kelompoknya masing-masing mendukung politik identitas, termasuk yang berlatar belakang agama.

Untuk memperkuat integrasi bangsa dan me- minimalisasi munculnya perselisihan dan konflik dalam masyarakat, revitalisasi ideologi perlu mendapatkan penekanan sebagai bagian dari penguatan wawasan kebangsaan. Hal ini dilakukan melalui perumusan operasional ideologi Pancasila yang lebih akademik dan sekaligus lebih fleksibel serta sosialisasi Pancasila baik dalam pendidikan formal maupun dalam masyarakat. Dalam hal ini pimpinan agama dapat memberikan kontribusi yang positif dengan memberikan input bagi permumusan dan sosialiasinya serta menjadikan agama sebagai faktor integratif yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bukan sebagai faktor disintegratif yang mendukung eksklusifisme dalam masyarakat. Dan yang lebih penting adalah adanya keteladanan dari para pemimpin politik dalam mempraktikkan nilai-nilai Pancasila di lembaga-lembaga negara dan lembaga- lembaga politik. Sejalan dengan hal ini, faktor-

faktor yang memengaruhi munculnya konflik antarwarga tentu saja perlu diatasi atau dihilangkan, seperti ke- timpangan ekonomi dan pendidikan.

C. Dualisme dalam satu Tubuh

Sebagaimana didefinisikan oleh Charles Liebman agama dan politik membicarakan isu-isu politik yang berhubungan agama, organisasi, partai politik, dan kelompok kepentingan yang konsen dengan isu-isu agama. Ketika institusi itu berkembang, masing-masing institusi cenderung mengembangkan kepentingan mereka dan mencoba melegitimasinya dengan terminologi agama. Artinya meskipun kadang-kadang kepentingan mereka tidak begitu jelas berhubungan dengan nilai-nilai agama atau kepentingan pemeluk agama, mereka mencoba menghubung-hubungkannya dengan kepentingan agama. Organisasi atau institusi ini tidak jarang mengklaim bahwa tuntutan yang mereka ajukan adalah cukup legitimate karena sama dengan tuntutan komunitas agama.

Menurut Anthony Gill dengan adanya kelompok agama yang berpartisipasi dalam politik, maka akan melahirkan ‘kaum elit agamawan’. Hal ini terjadi bukan untuk membuat tokoh agama menjadi lebih kuat (powerful), tetapi agar supaya pimpinan-pimpinan politik dari kelompok agama menjadi lebih berperan dan berkuasa. Lebih jauh seperti yang dikemukakan oleh Leibman, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana agama yang dianggap sebagai aspek kultural berpengaruh secara lebih luas terhadadap kultur politik dan kebijakan public.

Ada juga cara lain agama mempengaruhi politik. Agama tidak hanya memproyeksikan ide tentang apa yang benar dan apa yang salah,

tetapi juga memproyeksikan imej atau konsepsi tentang sisi alamiah dunia. Lebih jauh, agama bisa mempengaruhi masyarakat, bukan hanya oleh apa yang agama katakan tentang masyarakat, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat distrukturisasi atau dibuat struktural hirarkis.

Indikator-indikator empiris dalam beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa kepercayaan serta praktek keagamaan yang ada di masyarakat saat ini masih sama seperti kepercayaan masyarakat dua abad yang lalu, kalau tidak mau dikatakan lebih kuat. Kelompok-kelompok keagamaan terus bermunculan di dunia bahkan dipandang lebih cepat dari prediksi para penganut teori sekularisasi. Bahkan di negara-negara komunis atau negara eks-komunis, kelompok-klompok spiritual menolak untuk gulung tikar bahkan sebaliknya lebih meningkatkan kembali kegiatan mereka setelah berabad-abad hidup dalam pemerintahan yang selalu menekan dan refresif.

Hanya saja, kebanyakan para ilmuwan politik perbandingan atau umumnya para ahli politik masih memandang agama sebagai subjek penelitian yang marginal atau a peripheral subject matter. Hal ini mungkin saja terjadi karena para peneliti dalam ranah bidang ini masih terpengaruh oleh thesis sekularisme yang dianggap masih valid dan kuat. Kesalahan ini merupakan kesalahan yang cukup serius yang perlu diperbaiki, paling tidak menurut Anthony Gill6 disebabkan karena dua alasan. Pertama, fakta menguatnya kepercayaan keagamaan dan organisasi-organisasi agama hampir di semua negara di dunia menunjukkan bahwa menyepelekan atau mengabaikan agama berarti mengabaikan salah satu variabel penting dalam menjelaskan politik di suatu negara. Para peneliti Revolusi Iran 1979 terkejut dengan melihat fakta kuatnya potensi Islam dalam memobilisasi masa di Negara yang

kelihatannya sedang menuju proses modernisasi (sekularisasi) seperti Iran. Begitu juga, tidak banyak orang yang berharap dan mengira bahwa pihak gereja Katolik akan menjadi pemain kunci dalam menumbangkan komunisme di Polandia. Fakta lainnya, mobilisasi pemilih kaum minoritas Protestan di Peru yang menyebabkan Alberto Fujimori memenangkan pemilihan pada putaran pertama tahun 1992 dan menjadikannya presiden banyak mengagetkan orang. Dan di beberapa negara seperti Algeria, India, Yugoslavia, termasuk di beberapa negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa motivasi agama bisa menyebabkan konflik politik yang kadang bisa menyebabkan konflik berdarah-darah. Karenanya, tanpa diragukan lagi bahwa, agama masih terus menampakkan kehadirannya dalam realitas politik global.

Alasan kedua, studi agama perlu diperhatikan karena fakta bahwa inspirasi yang muncul dari riset-riset tentang agama dan kepercayaan serta riset organisasi keagamaan telah menjadi pertanyaan penting bagi para ilmuan politik perbandingan. Tema besar seperti aksi kolektif dan hubungan antara ide dan institusi atau lembaga segera saja muncul ke dalam pikiran jika mengaitkannya dengan agama. Contohnya, gerakan-gerakan keagamaan telah menunjukkan kemampuan yang dahsyat dalam memobilisasi aksi kolektif sebuah kelompok, termasuk aksi mereka dalam protes politik. 7 Fakta yang jelas bahwa Judaism, Christianity, Islam, Buddhism, dan Hinduism terus menarik bagi para pemeluknya setelah berabad-abad menunjukkan kekuatan mereka bisa memobilisasi kekuatan agama untuk melakukan sebuah gerakan. Tradisi spiritual agama-agama ini juga telah berfungsi sebagai alat untuk mobilisasi politik.

Lebih jauh Anthony Gill menyebutkan bahwa meskipun agama masih menjadi topik marginal di kalangan ilmuan Politik Perbandingan, dua decade terakhir menunjukkan adanya 'ketertarikan baru' untuk studi dan riset tenatang agama di kalangan akademisi. Didorong oleh pertumbuhan mengagumkan gerakan fundamentalis pada beberapa agama besar seperti Judaism, Christianity, Islam, dan Hinduism ketertarikan terhadap agama ini menunjukan trend naik. Bahkan faktanya bukan hanya sisi gerakan kaum fundamentalis agama yang menjadi pusat perhatian, tetapi kajian-kajian yang melihat sisi toleran agama dan bagaimana agama menjadi penggerak politik.

Dimanapun di dunia, sejak akhir tahun 1970an, kita menyaksikan meningkatnya keterlibatan politik para actor agama (agamawan) baik lokal di masing-masing negara maupun dalam pergaulan internasional. Untuk konteks Indonesia, sebagai negara dengan ideologi Pancasila yang sila utamanya berketuhanan Yang Maha Esa, kita bisa melihat bagaimana nilainilai agama, dan agamawan sangat berperan dalam politik Indonesia bahkan sebelum kemerdekaan. Kontestasi pemikiran apakah ideologi negara adalah agama (Islam) atau sekuler sudah ada sejak founding fathers Indonesia merancang kemerdekaannya. Polemik antara Soekarno dan Natsir menjadi fakta sejarah bagaimana agama masuk dalam diskursus politik Indonesia. Hal ini dilanjut dengan masa Orde Lama, Orde Baru bahkan sampai Orde Reformasi. Aktifnya para agamawan dalam diskursus ini bisa dilihat dalam bentangan sejarah politik Indonesia sampai sekarang. Terpilihnya almarhum KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden Indonesia dan KH. Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden mendampingi Presiden Joko Widodo menunjukkan bahwa agamawan dalam hal ini

tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama (NU), menjadi bukti penting bahwa irisan antara agama dan politik tidak bisa diabaikan dalam sejarah politik Indonesia.

Karenanya, untuk membahas hubungan antara agama dan politik, menurut Anna Grzymala-Busse kita perlu menelisik agama secara serius dan dalam. Pertama, bagaimana agama berbeda dari identitas lain seperti identitas etnik, kelas social dan negara? Apakah agama sekedar komoditas atau ada sesuatu yang unik tentang agama? Kedua, jika agama penting dan berpengaruh, bagaimana dan kapan doktrin agama bisa berbeda dan membuat perubahan? Ilmu Politik memandang identitas dan doktrin agama dengan label komoditas yang fungsional tetapi substansinya kecil untuk perkembangan keilmuan. Para ilmuan sosial terkadang mengabaikan fakta bahwa diantara agama-agama yang ada: Islam, Katolik, Protestan maupun Yahudi, memiliki perbedaan baik itu dari sisi doktrin maupun perbedaan interpretasi di internal agama masing-masing. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak hanya berimplikasi bagi para pemeluk agama-agama tetapi juga mempunyai konsekwensi logis ketika menghubungkan antara agama dan politik.

Menurut Miroljub Jevtic (n.d) politik menjadi satu disiplin ilmu mandiri yang dipelajari di universitas-universitas dimulai sejak abad ke 17 setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Belanda dan Inggris sekitar abad 16 dan 17 dan revolusi Amerika dan Prancis. Ketika itu kajian ilmu-ilmu sosial semakin berkembang dan muncullah kajian ilmu politik yang ditandai dengan berdirinya L'academie des sciences morales et politiques di Paris tahun 1795. Meskipun sebenarnya di tahun ini, kajian ilmu politik masih bagian dari pusat kajian pendidikan,

pilsafat, ekonomi politik dan hukum. Baru pada akhir abad 19 dan awal abad 20, lahir sebuah institusi di Paris yang khusus membahas kajiannya tentang study politik bernama L'Ecole Libre des sciences Politiques tahun 1872, yang nantinya berubah menjadi LInstitut d' Etudes Politiques. Gairah study politik ini juga berkembang di negara-negara lainnya seperti Inggris dan Amerika dan sebagian akademisi berpendapat bahwa awal lahirnya ilmu politik modern adalah di Amerika pada awal abad 20.

Topik-topik yang dibahas diawal kemunculannya disiplin ilmu politik menurut Miroljub Jevtic10 adalah: negara dan pemerintahan, proses politik, partai politik, perbandingan system politik, teori-teori politik dll. Karenanya kita bisa berpendapat bahwa ilmu politik sebagai sebuah disiplin ilmu, merupakan ilmu baru yang belum lama berdiri sendiri, meskipun subject penelitian politik sudah dikaji orang sejak munculnya peradaban manusia yang bisa kita temui dalam karya-karya Aristoteles, Plato dan filosof-filosof Yunani lainnya. Sementara kajian agama dalam konteks politik bukanlah hal yang baru. Organisasi-organisasi politik zaman Babilonia dan Mesir kuno ataupun Israel selalu berkaitan dengan sesuatu yang disebut 'tuhan'. Karena legitimasi sebuah kekuasaan di zaman itu memerlukan legitimasi ketuhanan, maka analisis tentang fungsi pemerintahan dan kekuasaan mau tidak mau berhubungan dengan simbol-simbol ketuhanna atau agama. Tetapi pada perkembangannya, terutama setelah perang dunia kedua usai, menurut Miroljub Jevtic ada dua paradigma yang berbeda ketika memandang ilmu politik hubungannya dengan agama. Pertama, pandangan yang diwakili oleh pilosof Prancis seperti Holbach, Helvetius, Diderot dan lain-lain yang berpendapat bahwa agama adalah produk dari

keterbelakangan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat yang tidak tercerahkan (unenlightened). Dengan pandangan ini, agama jarang sekali dipakai sebagai subject dari research-research politik. Akibatnya, para ilmuwan politik menjelaskan proses politik, organisasi politik, regim politik, partai politik dll benar-benar menggunakan pendekatan kerangka berpikir materialistik an sich (a purely materialistic framework), dan sama sekali melupakan pengaruh agama, meskipun sebenarnya harus diakui bahwa agama pasti berpengaruh.

Kedua, pandangan yang dipopulerkan oleh Alexis de Tocqueville pada abad 19 yang berpendapat bahwa agama bukanlah produk dari keterbelakangan ekonomi dan masyarakat yang tidak tercerahkan. Buktinya, ketika ekenomi dan pendidikan masyarakat meningkat, peran agama menjadi semakin kuat dalam kehidupan masyarakat, bukan sebaliknya.

Contoh yang jelas dari premis ini adalah kasus di Amerika. Ketika pembangunan ekonomi Amerika meningkat, kesadaran keagamaan masyarakatnya juga meningkat. George Gallup11 bahkan menyebutkan bahwa berdasarkan data sensus, 50 tahun belakangan ini merupakan abad dimana orientasi keagamaan orang Amerika paling tinggi dalam sejarah negara ini. 1 dari 3 orang Amerika dewasa (36%) mengatakan bahwa Tuhan berbicara langsung kepada mereka dan setengah dari responden yang di interview percaya bahwa Tuhan hari ini berbicara kepada mereka lewat Bible dan kitab-kitab suci lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa perkembangan di Amerika ini juga berlaku di negara-negara Barat lainnya yang membuat para ahli ilmu politik mulai memperhatikan lagi peran agama dalam politik. Bangkitnya peran agama dalam politik bisa dilihat pada agama-agama

besar seperti peran Islam dalam politik global, peran Budhism di Tibet, gerakan Budhism di South Vietnam, suksesnya partai politik Bhuda Komeito di Jepang, suksesnya partai Hindu Baratiya Janata di India dan juga peran Roman Katolik dalam politik Polandia.

Perkembangan di atas membuat para ilmuan politik memfokuskan research-research individual mereka yang berkaitan dengan agama dan politik. Begitu juga mendorong munculnya institusi-institusi research (research centre) yang memfokuskan kajiannya tentang peran agama dan politik. Hal inilah yang mendorong munculnya disiplin ilmu baru yang dikenal dengan Religion and Politics.

Sebagai disiplin ilmu baru (pertengahan abad kedua puluh), subject research dari ilmu ini terus berkembang. Meskipun demikian, Miroljub Jevtic mengidentifikasi empat kajian research ilmu politik berbau agama ini yaitu:

Pertama, penjelasan ajaran dan prilaku dari dogma dan doktrin agama yang kelihatan secara nyata, langsung dan terbuka berkaitan dengan politik. Ranah kajian pertama ini berisi tentang kajian dogma atau doktrin agama yang berkaitan dengan negara, political power, legitimasi politik, political sovereignty (kekuasaan), otoritas politik, demokrasi, organisasi politik, pandangan tentang perdamaian dan peperangan (peace and war), toleransi agama, HAM, fundamentalisme, ekstrimisme agama, terorisme agama, peran sekularisme dll. Pada kajian ini, misalnya, mencoba mendiskusikan bagaimana teks agama baik Islam, Kristen dan yang lainnya berbicara tentang bentuk negara, toleransi, demokrasi, kesetaraan gender dan doktrin lainnya.

Kedua, praktek-praktek keagamaan yang tidak kelihatan secara nyata mempunyai pesan politik, tetapi bisa memprovokasi dan

mempunyai konsekwensi politis. Ranah kajian ini berkaitan dengan praktek-praktek keagamaan yang bersipat teologis dipermukaan, tetapi bisa menimbulkan konsekwensi politik. Contohnya, cara-cara beribadah, propaganda agama, pembangunan gereja, mesjid, ibadah naik haji, pemilihan paus dan pendeta dll. Sangat jelas bahwa perjalanan haji ke Mekkah pasti mempunyai signifikansi politik sebagaimana signifikansi politik pemilihan Paus pada Roman Katolik atau pemberian sangsi kepada pendeta di sebuah negara.

Ketiga, sikap partisipan politik dalam kehidupan politik (authoritas negara, partai politik, politisi, oposisi dll) terhadap agama dan komunitas agama. Ranah kajian ini akan berbicara tentang hubungan antara kelompok agama dengan negara seperti bagaimana konstitusi negara (negara seculer atau teokrasi), keberadaan kebebasan agama dalam hukum negara, hubungan antara partai politik yang berbau agama, oposis yang berbau agama dll.

Keempat, bentuk-bentuk aksi sosial dan politik yang kelihatannya sama sekali tidak berhubungan dengan agama tetapi mempunyai konsekwensi politik dan agama. Contohnya, proses tender pekerjaan dan jasa yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan agama secara umum, tetapi jika hal ini terjadi di sebuah negara yang multi agama, tetapi semua kontrak pekerjaan itu hanya diberikan kepada kontraktor yang berasal dari agama tertentu, maka hal ini bisa memprovokasi komunitas agama lainnya untuk beraksi dan mempunyai konsekwensi politik yang signifikan.

Empat ranah kajian yang dikemukakan Jevtic di atas nampaknya sekarang ini sudah menjadi banyak perhatian para peneliti di berbagai negara termasuk di Indonesia. Hal ini tentu saja akan menguatkan thesis

bahwa hubungan agama dan politik memang tidak bisa diabaikan. Bahkan kajian-kajian kontemporer sekarang tentang isu-isu politik berbau agama diduga kuat sudah melebihi batas empat kajian yang dikemukakan Jevtic di atas. Wajar, jika klaim beberapa kalangan yang mengatakan bahwa peran agama dalam politik menurun dikatakan sebagai mitos belaka.

Menurut R. Stark (1999) David Martin adalah Sosiolog kontemporer pertama yang menolak thesis sekularisme secara total, bahkan ia mengusulkan agar konsep sekularisasi ini dihilangkan dari diskursus ilmiah ilmu sosial. Karena menurutnya, konsep ini kesannya sangat ideologis (bukan teoritis) dan menimbulkan banyak polemik. Lebih jauh, tidak ada bukti konkrit yang menunjukkan bahwa kehidupan manusia bergeser dari ’periode sangat beragama’ menuju ’periode sekuler’. Ketika melihat begitu populernya doktrin sekularisasi dikalangan para filosof abad delapan belas, Alexis de Tocqueville seperti dikutip Stark berkomentar:

Sayangnya, fakta di lapangan berbeda dengan teori. Ada beberapa penduduk tertentu di Eropa yang tidak mempunyai kepercayaan agama, penyebabnya adalah karena kebodohan mereka; sementara di Amerika, salah satu negara paling bebas dan paling tercerahkan di dunia, orang-orangnya penuh dengan semangat menyambut tugas-tugas keagamaan.

Lebih dari seratus lima puluh tahun sejak Tocqueville melakukan observasi itu, keberagamaan penduduk Amerika bukannya menurun tetapi justru keanggotaan gereja di Amerika naik lebih dari tiga kali lipat14, bahkan komitmen mereka terhadap agama menunjukkan kecenderungan naik. Kalau kasus di Amerika menunjukkan banyaknya

tantangan terhadap sekularisasi, sementara di Eropa juga menunjukkan bahwa sekularisasi tidak berhasil atau gagal. Buktinya, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan terjadinya penurunan partisipasi keagamaan masyarakat Eropa dalam waktu yang cukup panjang. Meskipun partisipasi keagamaan masyarakat di institusiinstitusi keagamaan di Eropa bervariasi dari waktu ke waktu (naik turun) karena alasan perang atau revolusi, tetapi yang penting untuk dicatat adalah bahwa partisipasi keagamaan masyarakat Eropa Utara dan Barat sangat rendah berabad-abad sebelum lahirnya modernisasi.

Alasan kedua untuk menolak klaim suksesnya sekularisasi di Eropa adalah data terkini tidak menunjukkan lahirnya masa ’atheisme ilmiah (scientific atheism)’. Tingkat religiusitas atau keberagamaan masyarakatnya sampai saat ini tetap tinggi. Karenanya pertanyaan penting tentang agama di Eropa adalah bukan mengapa orang Eropa tidak lagi percaya kepada agama, tetapi mengapa mereka tetap percaya kepada agama tetapi tidak melihat perlunya berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di institusi keagamaan.

Perlu ditekankan disini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan bahwa suatu hari agama akan menghilang dari kehidupan manusia. Mungkin barangkali suatu hari akan datang ketika agama telah dikesampingkan dari memori umat manusia atau dimusiumkan. Jika pun itu benar terjadi, hal demikian bukan disebabkan oleh modernisasi dan hilangnya keyakinan akan agama. Karenanya, marilah kita sama-sama mendeklarasikan berakhirnya keyakinan ilmu sosial terhadap teori sekularisasi, dengan mengungkapkan bahwa teori sekularisasi merupakan produk dari angan-angan pemikiran yang tidak akan terbukti.

Jika ada ilmuwan politik perbandingan masih memandang agama bukan sebuah subjek penelitian yang penting, hal ini mungkin saja terjadi karena para peneliti dalam ranah bidang ini masih terpengaruh oleh thesis sekularisme yang dianggap masih valid dan kuat. Padahal, fakta menguatnya kepercayaan keagamaan dan organisasi-organisasi agama hampir di semua negara di dunia menunjukkan bahwa menyepelekan atau mengabaikan agama berarti mengabaikan salah satu variabel penting dalam menjelaskan politik di suatu negara. Rintisan awal tentang kajian politik berbau agama yang mula-mula dikembangkan oleh Miroljub Jevtic seperti didiskusikan di atas, sekarang bahkan sudah melampaui. Ke depan, saya yakin subject matter kajian agama dan politik bahkan akan terus diminati oleh para ilmuan politik. Wajar jika jauh-jauh hari Stark sudah say good bye terhadap teori sekularisasi dengan catatannya Rest in Peace Secularization.

BAB 7

POLITIK AGAMA ATAU AGAMA POLITIK

A. Pandangan Tokoh tentang Ideologi Khilafah

Meski cenderung kontroversi namun tema tentang khilafah kerap menjadi kajian yang menarik untuk dibedah dan dibahas sampai akarnya terlebih jika menyangkut dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gerakan ini memiliki sejarah yang mengacu dan bertaklid pada model kekhilafahan awal keislaman. adahal sistem pemerintahan awal Islam ini, sebagaimana disebutkan oleh Muhammad „Âbid al-Jâbirî, masih berada dalam kekosongan perundang-undangan.[74]

Khilafah adalah bentuk masdar dari fi‟‟il madhi khalafa, yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Khala‟‟if merupakan bentuk plural dari khalifah, sedangkan kata kata khulafa adalah bentuk plural dari khalif. Khalifah adalah penguasa tertinggi (as-sultan al-a‟‟zam).[75]

Khilafah dalam terminologi politik Islam adalah suatu sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah dengan segala aspeknya berdasarkan al-Qur‟‟an dan as-Sunnah. Sedangkan khalifah adalah pemimpin tertinggi umat Islam (khalifatul muslimin).

Menurut Munawir Sadzali penyebab runtuhnya kerajaankerajaan besar pasca kerajaan Abbasiyah seperti Turki Utsmani lebih disebabkan oleh disintegrasi politik dengan

[74] Muhammad „Âbid al-Jâbirî,al-Dîn wa-al-Dawlah wa-al-Tatbîq al-Sharî‘ah((Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru,2001), 70-73.

[75] Ali Abd ar-Raziq,Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan.(Yogyakarta: Jendela, 2002), hal. 3

melemahnya otoritas di masing-masing pemerintah pusat dan munculnya penguasa semi otonom di berbagai daerah dan provinsi negara-negara tersebut, disertai dengan disalokasi sosial, memburuknya situasi ekonomi akibat persaingan dagang dengan negara-negara Eropa, kalah perang, serta merosotnya spiritualitas dan moralitas masyarakat, terutama para penguasa.[76]

Sejak itu telah ada umat Islam di berbagai negara di dunia selalu berusaha menemukan kembali dan membangun kembali sistem politik Islam. Seperti gagasan mengembalikan khilafah dimulai dengan Hasan al-Banna, yang mendirikan gerakan Ikhwanul Muslimin Muslim pada tahun 1928. Namun, gerakan-gerakan ini bersifat bermusuhan dan para penguasa menindas bahkan di negara-negara Muslim sendiri,

Gerakan ini menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk salah satunya negeri Indonesia. Isu ini menjadi kontroversial karena menimbulkan dua pandangan yaitu pro dan kontra yang diusung oleh gerakan tersebut.

Sebelum dibubarkan salah satu organisasi masyarakat yang bertujuan untuk mendirikan organisasi di Indonesia adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Kala itu HTI mengklaim bahwa problematika yang menjadi permasalahan umat Muslim adalah disebabkan karena tidak diberlakukannya hukum-hukum Islam di tengah kehidupan masyarakat.

[76] Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Edisi 5, (Jakarta: PT. UI Press), 1993, hlm.111

Salah satu gagasannya ini banyak ditentang oleh ormas-ormas besar di Indonesia seperti Naudathul Ulama, Muhammadiyah dan al-Washliyah. Adapun salah satu alasan penolakan gagasan tersebut karena berlandaskan Pancasila dihuni oleh berbagai macam kebudayaan yang berbeda.

Din Syamsudin sebagai salah satu tokoh Muhammadiyah pernah membuat pernyataan akan diperbolehkannya HTI menganggap khilafah islamiyah sebagai kemimpinan islam. Namun Din Syamsudin menegaskan bahwa makna khilafah itu sangat luas yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak persepsi di masyarakat.

Kemudian Al-Wasliyah juga mengatakan bahwa sistem demokrasi yang ditegakkan di Indonesia itu sudah mengacu kepada undang-undang yang dalam perancangannya berlandaskan kepada Qur'an dan Sunnah. Bahkan Al Wasliyah pernah mengutip dari Prof. Dr. Syeikh Said Thanthawi, sebetulnya negara islam itu tidak ada namun yang ada itu negara islami. Hal ini menunjukkan bahwa apapun bentuk dari suatu negara selama tidak bertentangan dengan udang-undang negaranya dan hukum islam yang dijalankan.

Sementara itu Naudhatul Ulama mengatakan bahwa khilfah itu hanya ada setelah 30 tahun wafatnya Rasulullah dimana fase tersebut dilewati oleh para Sahabat, Abu Bakar, Usman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Setelah masa ini dunia dipimpin oleh raja yang berkuasa dengan tangan besi.

Dalam menerapkan sistem Khilafah, Hizbut Tahrir berpendapat tidak seharusnya dengan menggunakan cara

kekerasan (senjata) tetapi dengan cara damai atau yang mereka sebut Thalabun Nusrah (mencari bantuan) dari Ahlul nusrah yang tidak lain adalah Ahlul quwwah (pemegang kekuasaan) memberikan pendidikan politik Umat Islam tentang perlunya sistem khilafah. Paket Hizbut Tahrir tiga langkah untuk menerapkan sistem khilafah. Pertama fase tatsqif yang merupakan fase konstruktif dan personal untuk melahirkan individu-individu yang juga memahami sistem khilafah Pemikiran Islam sebagai kerangka gerakan. Kedua, tahap tafa'ul ma'al ummah, yaitu tahap interaksi dengan masyarakat hingga akhir tahun, masyarakat juga wajib melaksanakan khilafah menjadikannya masalah besar dalam hidupnya juga mencoba menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Tahap Ketiga, fase atau tahapan istilami hukm memperoleh kekuasaan dan menerapkan Islam secara keseluruhan luas, lalu membawanya seperti brosur di setiap sudut di dalam dunia.[77]

Secara umum prinsip dasar seluruh lembaga pendidikan Islam baik itu pesantren atau non pesantren tentu secara gamblang menolak segala bentuk tindak kekerasan terhadap isu-isu kemanusiaan. Segala bentuk pembelaan terhadap Islam yang dianggap radikal, dilakukan secara anarkis hingga menimbulkan pertumpahan darah dan melanggar hak asasi manusia.

Dalam sebuah jurnal penelitian yang berjudul "*The Establishment of Khilafah and the Distortion of the Meaning of Jihad Islamic Teaching: Views of Pesantren Kyai*. " dinyatakan

[77] M. Ismail Yusanto, *Khilafah jalan menuju kaffah*, (Yogyakarta:Irtikaz), 2016, hlm. 67.

ada salah satu pandangan dari Kyai yang mengelola Pesantren di wilayah Sumatera Selatan. Bicara terkait dengan salah satu bentuk pembelaan yang HTI pandang sebagai jihad.

Kyai pondok pesantren menjelaskan bahwa jihad tidak harus disamakan dengan dengan sebuah tindakan kekerasan, terlebih jika dikolerasikan dengan hak dan kebebasan berkeyakinan. Muzakkir sebagai salah satu pimpinan pesantren ternama di Sulawesi Selatan memberikan sumbangsih berupa suatu ideology atau pemikiran bahwasannya kelompok yang teridentifikasi sebagai kelompok radikal perlu dilakukan pembinaan. Jangan memaksakan gagasan dan pemikiran Barat terkait dengan pluralism yang dianut oleh masyarakat. Tafaqquh fi al-din lebih utama sehingga jihad seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kriterianya yaitu syarat, ilmu dan adab. Semua kriteria tersebut sangat jelas sudah menjadi budaya para ulama pesantren. Sehingga diharapkan peran pesantren untuk mengkaji, merumuskan, dan menosialisasikan konsep jihad yang sebenarnya.[78]

Dalam hal ini kyai sebagai pimpinan pesantren mempunyai sikap dan pemahaman tertentu kemungkinan jihad di masa sekarang. Makna Jihad harus dilandasi pemahaman yang lebih baik mendalam tentang historisitas jihad dan perjuangan untuk perdamaian dan kemenangan bersama-sama, tidak mencari superioritas atau memihak salah satu pihak sambil menghancurkan pihak lain.

[78] Nisa, W., Julaiha, S., Jannah, F., & Setiawan, A. (2021). The Establishment of Khilafah and the Distortion of the Meaning of Jihad Islamic Teaching: Views of Pesantren Kyai.

Beberapa penelitian juga sependapat dengan pendapat Kyai pesantren tersebut yaitu membantah tudingan tersebut Islam, khususnya Alquran, mengajarkan umatnya untuk melakukan tindakan kekerasan melalui konsep. jihad, perang sebenarnya adalah bagian dari solusi akhir saat ini. kontroversial diakui oleh hukum internasional.

Dalam fenomena diatas menjadi penting ketika pesantren harus berperan dalam pendidikan santri terutama menerapkan nilai-nilai moderat dalam setiap pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Keyakinan tentang islam adalah agama yang rahmatan lil alamin dan tidak mengumbar kekerasan menjadi sangat penting untuk disosialiasikan secara masif dilingkungan pesantren.

Beberapa pendapat diatas juga memperkuat apa yang disampaikan oleh Kyai Muhammad Lutfhi Yusuf NZ, MA sebagai salah satu pengurus yayasan pesantren Buntet Cirebon terkait dengan isu-isu Khilafah yang sempat menjadi pembicaraan hangat di Indonesia.

Beliau mengatakan bahwa sudah semestinya ulama di pesantren berada dalam posisi islam yang wasathiyah. Tidak berat ke kanan ataupun ke kiri dan sudah sepantasnya berada ditengah sebagai penyeimbang.

Kyai Lutfi juga mengingatkan bahwasannya kita harus mengingat hadist dari Nabi Muhammad Saw., yang berbunyi:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَاطُهَا

Artinya: "*Sebaik-baiknya perkara adalah yang pertengahan".*

Allah Swt., berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya : "*Dan demikianlah (sebagaimana Kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus), Kami jadikan kamu (wahai umat Muhammad) satu umat yang pilihan lagi adil, supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia (tentang yang benar dan yang salah) dan Rasulullah (Muhammad) pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu."*

Begitu besar peran pesantren Buntet karena merupakan salah satu tempat yang menjadi rujukan pesantren lain di Cirebon. Adapun salah satu contoh ketika isu pembubaran HTI oleh pemerintah dilakukan. Semua sesepuh ulama yang berada di Pesantren Buntet support pemerintah. Para ulama sepakat dengan pembubaran HTI. Sehingga setiap ucapan ulama pesantren Buntet menjadi sumber hukum dan rujukan bagi pesantren lain di wilayah Cirebon.

Pesantren Buntet yang merupakan dibawah naungan organisasi Naudathul Ulama (NU) pun memiliki pandangan yang sangat khas terkait khilafah islamiyah. Salah satu yang disampaikan oleh tokoh NU adalah hal yang penting itu bukan pada mempertahankan kata-kata khalifah atau khilafah namun pada substansi dan isninya, bahwa kepemimpinan yang mencerminkan persatuan dan kesejahteraan bersama.[79]

[79] KH. Tolhah, *Realistiskah Khilafah di Milenium Perubahan? Risalah Naudhatul Ulama*, edisi ke VI, hal 62.

B. Sikap Tokoh Terhadap Ideologi Khilafah

Menurut kamus bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwodarminto pengertian sikap adalah perbuatan yang didasari oleh keyakinan berdasarkan norma-norma yang ada di masyarakat dan biasanya norma agama. Namun demikian perbuatan yang akan dilakukan manusia biasanya tergantung apa permasalahannya serta benar-benar berdasarkan keyakinan atau kepercayaannya masing-masing.

Sikap adalah salah satu konsep dalam bidang ini psikologi emosional, persepsi dan perilaku. Makna sikap pada bahasa Inggris disebut sikap. Sikap merupakan cara bereaksi perangsang Emon untuk merespons suatu stimulus saat ini.

Ellis mengemukakan bahwa sikap melibatkan beberapa pengetahuan tentang sesuatu. Namun aspek yang esensial dalam sikap adalah adanya perasaan atau emosi, kecenderungan terhadap perbuatan yang berhubungan dengan pengetahuan. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Ellis, sikap melibatkan pengetahuan tentang sesuatu termasuk situasi. Situasi di sini dapat digambarkan sebagai suatu objek yang pada akhirnya akan mempengaruhi perasaan atau emosi dan kemudian memungkinkan munculnya reaksi atau respons atau kecenderungan untuk berbuat.

Dalam beberapa hal, sikap adalah penentu yang paling penting dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif yaitu senang (like) dan tidak senang (dislike) untuk melaksanakan atau menjauhinya. Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu adalah awal yang

mempengaruhi suatu sikap yang mungkin mengarah kepada suatu perbuatan.[80]

Sikap juga diartikan sebagai suatu cara untuk visibilitas aksi.andquot; Pahami sikap itu sendiri dapat dilihat dari berbagai elemen misalnya berkaitan dengan sikap terhadap kepribadian, motif, tingkah laku, kepercayaan, dan sebagainya. Namun maknanya dapat dimengerti mereka mempunyai karakteristik serupa. Sikap adalah perilaku yang mencakup keinginan untuk merespon objek sosial yang mengarah dan menghasilkan perilaku sesuatu yang nyata tentang sesuatu. Itu berarti sesuatu Perilaku dapat diprediksi jika sikapnya familiar. Meskipun tidak ada manifestasi dari sikap ini yang terlihat secara langsung, namun sikap dapat ditafsirkan daripada perilaku yang masih tertutup.

Untuk membentuk suatu sikap tentu diperlukan beberapa komponen. Pertama, struktur sikap merupakan suatu sikap yang terdiri dari tiga komponen yaitu kognitif, komponen afektif, dan komponen anaktif. Adapun komponen kognitif dapat berupa keyakinan terhadap seseorang (*behavior belief dan grop belief*). Kemudian untuk komponen afektif dapat menyangkut aspek emosional dan komponen konatif merupakan sebuah aspek dalam membentuk kecenderungan bertindak yang harus sesuai dengan sikapnya. Komponen yang dominan dalam aspek diatas yaitu komponen afektif atau emosional biasanya berakar paling dalam sebagai sebuah komponen dalam sikap yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan sikap seseorang.

[80] Ellis, Robert S..*Educational Psychology: a Problem Appr*

Faktor kedua yang mempengaruhi sikap yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini identic dengan finansial berupa uang. Semakin besar rasa aktualisasi seseorang maka uang tidak akan berfungsi artinya intensitas sikap seseorang terhadap uang menurun.

Faktor ketiga adalah kesadaran akan kebutuhan keselamatan (security) cukup jelas pada kebanyakan orang. Kita semua berharap dapat menghindari kecelakaan, perang, bencana alam, penyakit dan ketidakstabilan ekonomi. Namun, menyadari akan kebutuhan keamanan ini bukan merupakan faktor utama munculnya tingkah laku, hanya fungsi saja di latar belakang.

Seseorang yang sangat memperhatikan kebutuhan akan rasa aman menjadi kompetitif dan tidak kritis. Dia lebih bahagia berada dalam situasi aman, kurang siap menghadapi tantangan. Kreativitasnya juga belum berkembang dengan baik. Namun berbagai aspek kehidupan masyarakat, bahkan jika kita melihat kebutuhannya Ini merupakan kebutuhan yang sangat penting.

Faktor keempat, kebutuhan sosial Stanley Schachter telah menyelidiki bahwa kesenangan akan sosia- lisasi merupakan tujuan itu sendiri (an end in itself). Artinya, orang berhubungan karena hanya menyenangi hal itu, tidak ada tujuan yang lain. Kebutuhan sosial biasanya sangat dominan dalam kehidupan. Kebanyakan individu oerhubungan dengan orang-orang laii1 dan merasa menjadi anggota dan diterima dalam suatu kelompok sosiaI. Bagi orang- orang tertentu kebutuhan sosial ini lebih besar daripada orang-orang lain.

Faktor kelima, kebutuhan harga diri. Biasanya kebutuhan ini muncul dalam berbagai variasi bentuk. Pada tahap ini kekuasaan meupakan sumber yang memungkinkan seseorang dapat mempengaruhi orang lain. Kekuasaan juga bergantung pada capaian pribadi atau intensitas aktualisasi diri.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut yaitu pembentukan sikap seseorang, pengalaman pribadi, pengaruh kebudayaan, pengaruh media massa dan proses terjadinya pengaruh dari luar.

Adapun sikap tokoh dari Kyai Buntet terhadap segala aksi pemahaman ideology yang tersebar khususnya di kalangan para santri. Dalam pesantren ini diadakan salah satu kurikulum yang menyediakan muatan lokal seperti pendidikan kewarganegaraan. Selain itu juga ada pembelajaran terkait dengan ke NU an dimana dalam materi tersebut para santri diajarkan untuk mengambil islam tengah dan tetap di jalan islam yang santun. Hal ini sangat jelas sebagai bentuk representasi pesantren Buntet Cirebon karena lambang hijau dalam setiap pesantren melambangkan nilai-nilai ideology Naudathul Ulama (NU).

Beliau juga mengatakan dalam sebuah tayangan di media sosial youtube sudah sepantasnya kita sebagai umat muslim jangan terlalu keras dan teralu fundamentalis. Selain itu juga jangan terlalu liberal dan para santri dihimbau untuk seimbang karena ibadah yang berlebih tidak baik juga jika bekerja secara berlebihan tidak baik. Sudah jelas semuanya kembali pada

pemahaman beliau bahwasannya kita harus berada di islam wasyatiyah.

C. Kritik Terhadap Ideologi Khilafah

Kyai Lutfi sebagai salah satu pengurus yayasan Buntet Cirebon dengan tegas menolak hadirnya paham tentang khilafah. Sebagai aksi nyata tersebut beliau sangat mendukung pemerintah terhadap pembubaran paham-paham khilafah yang bersangkutan.

Menurut beliau jika sistem khilafah hanya sebatas seorang pemimpin yang menerapkan din islam tidak masalah. Namun jika penerapan hukum islam seperti zaman dahulu dengan salah satunya di potong tangan itu akan sangat repot jika diterapkan di Indonesia.

Misalnya di Aceh kan memisahkan diri dengan Indonesia sehingga mereka memiliki ketentuan hukum yang berbeda. Namun sepemahaman beliau di Aceh pun yang dibelakukan masih hukum cambuk saja belum ada hukum rajam.

Jika memang mau menerapkan hukum islam tentunya harus secara kompleks , artinya bahwa Allah menghukum pencuri itu dengan cara dipotong tangan namun esensinya bukan seperti itu. Salah satu tokoh modern Muhammad Iqbal tokoh pemikir tentang tokoh moderat tentang hukum dampk potong tangan bukan tentang potong tangannya atau hukumnya. Tujuan dipotong itu diharapkan bisa jera.

Zaharudin nasaruli pernah menyampaikan juga jika untuk membuat jera maka masih banyak cara yang bisa dilakukan salah satunya penerapan di Indonesia dengan

hukuman penjara. Bagi beliau ini adalah menjadi cara yang pas untuk diterapkan di Indonesia. Karena dampak dari hukum potong tangan tentu hanya akan menjadi masalah baru di kemudian hari. Misalnya pelaku yang mendapat hukum tersebut jadi tidak bisa bekerja secara maksimal dan pada akhirnya akan ada keluarga dan anak-anak yang terabaikan begitu saja.

D. Proteksi Terhadap paham Khilafah

Kembali pada pembahasan awal bahwasannya salah satu proteksi yang dilakukan pesantren adalah dengan memberikan pemahaman yang dapat menangkal paham-paham radikal. Salah satunya dengan memberikan pembelajaran kewarganegaraan juga muatan ke NU an diperdalam untuk memberikan perspektif baru kepada para santri bahwasannya posisi islam itu harus berada dalam koridoh wasathiyah (berada di jalan tengah). Sangat penting untuk terus mensosialisasikan hal-hal yang demikian kepada para santri.

Sebagai pihak pesantren pun Buntet selalu mengamati dan mengevaluasi terhadap santrinya. Jadi jika dirasa ada salah satu santri yang diduga memiliki pemahaman yang berbeda langkah awal yang dilakukan adalah melalukan mediasi dengan santri tersebut. Pada prosesnya santri akan diajak berdiskusi dan jika sudah diketahui dimana titik perbedaanya maka para pembimbing akan mulai meluruskan hal tersebut.

KESIMPULAN

Politik memang menjadi topic yang selalu hangat dan ramai dibicarakan oleh sebagian kalangan. Meski begitu fakta dilapangan memang tidak bisa dihindari bahwasannya diantara sebagian orang yang senang politik, tentu ada juga justru yang tidak tertarik sama sekali.

Namun Kiyai Luthfi memiliki pandangan bahwasannya pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam tidak diperkenankan untuk anti terhadap isu-isu politik yang berkembang saat ini di Indonesia. Justru politik menjadi salah satu hal yang harus beriringan dengan ilmu agama. Menurut beliau politik dan agama adalah satu tubuh yang harus berjalan berdampingan juga mengisi satu sama lain.

Para santri yang memang memiliki skill yang mumpuni dalam bidang politik tentu sangat diperkenankan untuk terjun langsung ke arena tersebut. Hal ini terbukti dari beberapa lulusan Pesantren Buntet Cirebon ada yang sudah berkecimpung dalam partai-partai politik yang ada di Indonesia.

Kata pamungkas terakhir yang selalu menjadi pesan terbaik beliau adalah pesantren dan santri sudah seharusnya menentukan posisi untuk selalu berada di tengah-tengah sebagai penyeimbang antara agama dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir B. Nambo Dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik). *Mimbar*: Xxi (2). April-Juni 2005

Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, Cet. Viii, 2003).

Ahmad, Jafar. *Ilmu Politik Praktis (Dari Teori Ke Implementasi)*. Jambi: Akademia Virtual Media.

Akhmad, Bachruddin Ali. (2019). *Komunikasi Politik*. Sleman: Aswaja Pressindo.

Alfred Stepan, *The World's Religious Systems And Democracy*: Crafting The "Twin Tolerations.

Ali Abd Ar-Raziq (2002) ,Islam Dan Dasar-Dasar Pemerintahan. Yogyakarta: Jendela.

Aniq Ifadah Dan Agus Machfud Fauzi. (2019). *Resistensi Santri Pada Fatwa Kiai (Studi Fenomenologi Di Pondok Pesantren Sunan Drajat)*. Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dhanik Sulistyarini, Dkk. (2020). *Buku Ajar Retorika*. Banten: Aa.Rizky.

David L. Sills (Ed.), (1969). *International Encyclopedia Of The Social Sciences*, Vol. Ix,. New York: The Macmillan Company & The Free Press.

Dennyj.A. (Ed.), *Menegakkan Demokrasi*, (Jakarta: Kelompok Studi Indonesia)

Ellis, Robert S.. *Educational Psychology: A Problem Appr*.

Eka Wahyu Kasih. (2018). Pelaksanaan Prinsip- Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. *Jurnal Kajian Lemhannas RI.*

Harun Nasution, (1975). *Pembaruan Dalam Islam* .Jakarta: Bulan Bintang

Harold Chrouch,(2010). *Political Reform In Indonesia After Soeharto*, Singapore: Institute Of Southeast Asian Studies.

Ismail Suny, (1987). *Mekanisme Demokrasi Kita*, Edisi VI, Jakarta: Aksara Baru.

Joel Krieger (Ed.), *Journal Of Democracy*, 2(2).

Kh. Tolhah, *Realistiskah Khilafah Di Milenium Perubahan? Risalah Naudhatul Ulama*, Edisi Ke VI.

Mahmudah, Dede. Komunikasi, Gaya Kepemimpinan, Dan Motivasi Dalam Organisasi. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*. 19 (2).

Muchtar, Khoiruddin. Komunikasi Politik Dan Pembentukan Citra Partai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2).

Muhaimin, Et Al. (2005). *Kawasan Dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Kencana.

Muhammad. (2001). *Âbid Al-Jâbirî,Al-Dîn Wa-Al-Dawlah Wa-Al-Tatbîq Al-Sharî'Ah.* Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.

Mulyana, Deddy. (2010). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya.

Munawir Sjadzali, (1993). *Islam Dan Tata Negara*, Edisi 5, Jakarta: Pt. UI Press.

M. Ismail Yusanto, (2016). *Khilafah Jalan Menuju Kaffah*, Yogyakarta:Irtikaz.

Nisa, W., Julaiha, S., Jannah, F., & Setiawan, A. (2021). *The Establishment Of Khilafah And The Distortion Of The Meaning Of Jihad Islamic Teaching: Views Of Pesantren Kyai.*

Oscar Maulana. Santri, Budaya Dan Moderasi Beragama. November 7, 2020. Https://Syariah.Uinsaid.Ac.Id/Santri-Budaya-Dan-Moderasi-Beragama/

Rod Hague Et Al. Dalam Miriam Budiardjo. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Susanto, Eko Harry. (2013*). Komunikasi Politik Pesan Kepemimpinan Dan Khalayak.* Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Saidin Ernas & Ferry Muhammadsyah Siregar. (2010). Dampak Keterlibatan Pesantren Dalam Politik: Studi Kasus Pesantren Di Yogyakarta, *Jurnal Kontekstualita*, 25(2).

Sulaiman, Adhi Iman. (2013). Komunikasi Politik Dalam Demokratisasi. Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika, *Observasi*: 11(2).

Thaib, Erwin Jusuf. (2019). Komunikasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Komunikasi, Ilmu Politik Dan Komunikasi Islam. Farabi *Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat Dan Dakwah*. 16 (1).

Turhamun. (2022). Desain Pesan Komunikasi Politik Perspektif Islam Di Era 4.0. *Jurnal Penelitian Agama* 23(2).

Wahid, Umaimah. (2016). *Komunikasi Politik: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Pada Era Media Baru*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Wawancara Pada Salah Satu Tokoh Kiyai Buntet Pesantren K.M Luthfi Yusuf Nz Ma Bidang Pendidikan Ylpi Buntet Pesantren Pada Tanggal 29/10/2023.

Sumber Lain:

Https://Bnp.Jambiprov.Go.Id/Periklanan-Pengertian-Fungsi-Jenis-Dan-Tujuan/ Dikunjungi Pada Tanggal 13/12/2023 Pukul 19.51.

Https://Www.Praxis.Co.Id/Stories/Read/354/High-Context-Dan-Low-Context-Communication-Di-Indonesia-Kamu-Termasuk-Yang-Mana- Dikinjungi Pada Tanggal 13/12/2023 Pukul 00.22.

Https://Alkhiyarohbuntet.Wordpress.Com/2020/11/03/Sejarah-Pondok-Al-Khiyaroh-Buntet-Pesantren/ Dikunjungi Pada Tanggal 27 November 2023 Pukul 03.26.

Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Hwz5chrnp9c&T=927s Dikunjungi Pada Tanggal 29 November 2023 Pukul 16.40.

Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=Hwz5chrnp9c&T=927s Dikunjungi Pada Tanggal 29 November 2023 Pukul 16.40.

Https://Www.Youtube.Com/Watch?V=0y8rg93dmgy Dikunjungi Pada Tanggal 29 November 2023 Pukul 15.57.

Https://Youtube.Com/Shorts/Mkvwcw8gmp0?Si=Kwluwab3dgylacb_ Dikunjungi Pada Tanggal 29 November 2023 Pukul 15.35.

Https://Binus.Ac.Id/Malang/Communication/2022/06/21/4-Jenis-Gaya-Komunikasi/ Dikunjungi Pada Tanggal 29 November 2023 Pukul 15.47.

Https://Www.Nationalgeographic.Com/Premium/Article/Napoleon-Bonaparte-Enlightened-Leader-Or-Tyrant Dikunjungi Pada Tanggal 28 November 2023 Pukul 02.36.

Https://Buntetpesantren.Id/Sejarah-Singkat/ Dikunjungi Pada Tanggal 28 November 2023 Pukul 04.05.

Https://Sc.Syekhnurjati.Ac.Id/Escamp/Risetmhs/Bab31410110107.Pdf Dikunjungipada Tanggal 26 November 2023 Pukul 01.05.

Https://Akupintar.Id/Info-Pintar/-/Blogs/Menggunakan-Gimmick-Saat-Mengajar Dikunjungi Pada Tanggal 11/12/2023 Pukul 02.01.

Https://Himso.Id/Pesan-Komunikasi-Politik-Political-Message/ Dikunjungi Pada Tangga; 14/12/2023 Pukul 01.23.

Https://Fisip.Umsu.Ac.Id/2023/07/26/Demokrasi-Di-Indonesia-Pengertian-Dan-Sejarahnya/ Dikunjungi Pada Tanggal 15/12/2023 Pukul 06.38.

Https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Apa-Itu-Demokrasi/ Dikunjungi Pada Tanggal 14/12/2023 Pukul 16.20.

Https://Www.Radarbanten.Co.Id/2023/10/22/Santri-Pun-Bisa-Berpolitik/ Encep Safrudin Muhyi. (2023). Santri Pun Bisa Berpolitik. Radar Banten. Dikunjungi Pada Tanggal 18/12/2023 Pukul 22.00

Https://Www.Kompasiana.Com/Salsabilaadilah/616fb191c01a4c545b3c1a32/Santri-Selaku-Agen-Pembawa-Perubahan-Dalam-Masyarakat Dikunjungi Pada Tanggal 18/12/2023 Pukul 16.20.

Https://News.Detik.Com/Berita/D-4259494/Menag-Hindari-Politik-Praktis-Di-Pesantren Dikunjungi Pada Tanggal 11/12/2023 Pukul 18.20.

Https://Almanhaj.Or.Id/57311-Menghormati-Orang-Lain.Html Dikunjungi Pada Tanggal 13/12/2023 Pukul 15.20

Https://Fahum.Umsu.Ac.Id/Budaya-Politik-Di-Indonesia/ Dikunjungi Pada Tanggal 14/12/2023 Pukul 20.20

Https://Lilisrinasanti.Smk2pekalongan.Sch.Id/Read/23/Budaya-Politik-Di-Indonesia Dikunjungi Pada Tanggal 15/12/2023 Pukul 18.45

Https://Www.Nu.Or.Id/Daerah/3-Sikap-Yang-Harus-Dimiliki-Santri-Dalam-Berperan-Di-Tengah-Masyarakat-Kbvqc Dikunjungi Pada Tanggal 17/12/2023 Pukul 18.23

Https://Www.Uin-Suska.Ac.Id/Blog/2017/02/14/Golput-Dalam-Perspektif-Islam-Am-Mahmud/ Dikunjungi Pada Tanggal 19/12/2023 Pukul 18.29

PROFIL PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si.

Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi dengan mahasiswa Prodi S2 Komunikasi Penyiaran Islam tahun 2023 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Komunikasi Politik Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia itu ditambah kebaikan dari pihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu: Komunikasi Politik: Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu: Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia: Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun facebook dengan alamat cecep suryana Majalengka dan akun instagram dengan alamat csuryana56.

A. Husain Haekal, S.Sos lahir di Kabupaten Cirebon 14 September 1993. Penulis merupakan mahasiswa Pascasrjana Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pengalaman Riset, antara lain: Revitalisasi Kesenian Tari Topeng Sebagai Media Alternatif (Tinjauan Sejarah Proses Islamisasi di Cirebon) tahun (2016). Komunikasi Transendental dalam Tradisi Srakalan (Studi Fenomenologi Tradisi Srakalan di Desa Japura (Japura Kidu, Japura Bakti dan Astana Japura)) tahun 2017. Sekarang peneliti sedang meneliti Komunikasi Politik Studi Narartif di pondok pesantren dan juga Studi Kelembagaan Dakwah di Yayasan Rehabilitas.

Pendidikan yang pernah ditempuh, penulis alumni Sarjana di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jurusan KPI (2018). Pernah mengikuti Pelatihan Bimtek Para Peneliti, Dosen dan Mahasiswa untuk Upgrade Diri dalam Penelitian Kualitatif dislenggarakan oleh PT Ebiz Prima Nusa (2023). Penulis aktif di Perjal (Perpustakaan Jalanan) Desa Japura Kidul dan pernah menjadi Pelatih Jurnalistik Siswa MTs Negeri 6 Cirebon (2022). Serta memiliki hobi Hiking. Penulis dapat dihubungi melalui *ahmadhusain762@gmail.com*.

Aprilia Nur Islami, S.Sos lahir di Bandung, 16 April 1999. Penulis mengawali pendidikan dari SDN 63 Payakumbuh, Sumbar (2011), SMPN 1 Ngamprah, KBB (2014), SMAN 1 Padalarang (2017), S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2021).

Saat ini sedang menempuh pendidikan pascasarjana magister Komunikasi dan Penyiaran Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis juga pernah mengenyam pendidikan non-formal di Pondok Pesantren Ar-Raaid Bandung, Pondok Pesantren Al Faqih Dua Bandung, Pondok Pesantren Al Futuhat Garut, dan Pondok Pesantren Pengkolan Nailul Kirom.

Semasa kuliah, penulis aktif mengikuti komunitas dan Lembaga Dakwah Kampus. Penulis memiliki hobi mendesain, *editing* foto video, dan *entrepreneur.* Penulis pernah menjadi tenaga pendidik bidang *Fiqh* di MI Al Adzkar Fullday School, *digital marketer* dan *Hostlive Streamer* di Kiciks Muslimah, Penyiar Radio RKSB Maja 107.7FM, dan Guru les private JagoCalistung. Serta penulis mulai merintis *brand fashion* @moeharami.id.

Penulis aktif di kegiatan sosial dan relawan di Senyum Indonesia, One Ummah Movement, KARISMA ITB, dan Shaf Muslimah. Mendirikan layanan sosial di Bandung Timur yang bernama DOBABA (Donasi Baju Bandung) serta aktif menjadi aktivis Salman ITB.

Penulis juga aktif di bidang kepenulisan Salman Reading Corner, dan pernah menulis 3 buku antologi yang berjudul *"Sedang Belajar Memaafkan"(2023), "Denganmu Aku Bahagia"(2023), "Dunia Setelah Hari Ini" (2023)* dan 1 publikasi jurnal *Asyahid Journal of Islamic and Quranic Studies(AJIQS)(2023).* Penulis dapat dihubungi melalui aprilianuri@yahoo.com.

Dias Ashari, S.Sos lahir di Bandung 22 Desember. Ketertarikannya terhadap dunia Kesehatan Islam membawa dirinya untuk melanjutkan pendidikan di Program Studi Farmasi dan Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini penulis sedang menempuh pendidikan Pascasarjana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Penulis sangat tertarik dengan bidang kajian Dakwah Terapeutik. Sehingga penulis mencoba belajar dan mengekplorasi bahkan berusaha menemukan kolerasi antara dunia dakwah dengan kesehatan. Dengan demikian penulis berharap kedua ilmu ini bisa saling berkontribusi di kemudian hari. Ketertarikan lainnya dalam bidang kuliner dan wisata juga membuat penulis sempat aktif dalam dunia kepenulisan menjadi salah satu kontributor di Ayo Media Network (ayobandung.com) dan Kompas (kompasiana.com).

Penulis memiliki pengalaman kerja di dunia Farmasi cukup lama yaitu selama Sembilan tahun. Setelah beberapa kali berkecimpung di sebuah perusahaan penulis banyak melihat berbagai macam problem dan memiliki kesempatan untuk belajar menyelesaikannya. Dengan demikian penulis mencoba mengimplementasikan ilmu beserta pengalamannya dengan terjun langsung di dunia Bisnis Kefarmasian.

Sejak kecil penulis juga memiliki ketertarikan terhadap dunia sastra anak yang sering diterbitkan di koran Pikiran Rakyat edisi mingguan pada rubik Percil (Pr Kecil). Hal ini juga menjadi salah satu inspirasi bagi penulis untuk membuat salah satu karya Novel yang Insya Allah bisa diterbitkan pada tahun 2024. Untuk kepentingan kerja sama atau kolaborasi bisa hubungi penulis via email diazazhari95@gmail.com.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Politik Inklusif di Kehidupan Pesantren

KM. Luthfi Yusuf NZ, MA

(Pembina Pondok Pesantren Al Khiyaroh Buntet Cirebon)

Seorang kiai muda asal Pondok Pesantren Buntet Cirebon, beliau lahir pada tahun 1979 di desa Mertapada Kulon, Astanajapura, Cirebon ini merupakan tenaga pendidik yang mengabdi pada di Yayasan Pendidikan Islam Buntet Pesantren. Beliau dipercayai sebagai Ketua Bidang Kepesantrenan dan Litbang.

Dalam pandangan politiknya, beliau menegaskan bahwa politisi yang tidak memiliki ilmu politik serta tidak mumpuni di bidangnya lebih baik mundur. Karena hal itu akan merusak sistem kenegaraan, artinya jika tampuk kepemimpinan dipegang oleh bukan ahlinya dan bukan bidangnya maka tunggulah kehancurannya.

Untuk mengabdi kepada negara tidak hanya dengan politik, bisa dengan bidang lain seperti bidang pendidikan, ekonomi, atau sebagainya. Pesantren merupakan awal pendidikan politik sehingga sebagai institusi dakwah, pesantren harus bersikap netral terhadap kehadiran politik. Siapapun yang datang ke pondok pesantren akan disambut dan dihormati selayaknya tamu yang datang berkunjung.

Menurut Kiai Luthfi, politik itu merupakan "kendaraan" bukan "tujuan". Jika berkendara dengan baik maka akan selamat sampai tujuan, begitupun sebaliknya. Jika tidak berkendara dengan baik maka celakalah karena tidak memumpuni dalam mobilisasi politik.

Dalam kancah perpolitikan, agama dan politik merupakan sesuatu yang searah sehingga harus seimbang antara Ulama dan Umaro. Agar menjadi kekuatan yang harmonis dan sinergis, sehingga umat tidak terombang-ambing akan opini publik yang semakin menghawatirkan.

Kita tidak boleh buta pada politik. Beliaupun walau tidak suka dengan politik praktis, namun beliau memahami perpolitikan baik lokal dan nasional serta menyukai politik ide atau gagasan.

Gunung Djati Publishing

9 786235 485706